



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
ASERSI FINAL



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di samping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Airlangga Hartarto

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ix
RINGKASAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	5
II. NERACA	6
III. LAPORAN OPERASIONAL	7
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
A. PENJELASAN UMUM	9
A.1. DASAR HUKUM	9
A.2. PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	9
A.3. RENCANA STRATEGIS	12
A.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	16
A.5. BASIS AKUNTANSI	16
A.6. DASAR PENGUKURAN	17
A.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI	17
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	23
B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	23
B.2. BELANJA NEGARA	25
B.2.1. BELANJA PEGAWAI	27
B.2.2. BELANJA BARANG	28
B.2.3. BELANJA MODAL	29
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	30
C.1. ASET LANCAR	30
C.1.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	31
C.1.2. KAS BENDAHARA LAINNYA DAN SETARA KAS	31
C.1.3. BELANJA DIBAYAR DIMUKA	31
C.1.4. PIUTANG BUKAN PAJAK	31

C.1.5.	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH-PIUTANG BUKAN PAJAK	32
C.1.6.	PERSEDIAAN	32
C.2.	ASET TETAP	32
C.2.1.	PERALATAN DAN MESIN	33
C.2.2.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	34
C.2.3.	ASET TETAP LAINNYA	34
C.2.4.	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	35
C.3.	ASET LAINNYA	35
C.3.1.	ASET TAK BERWUJUD	35
C.3.2.	DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	36
C.3.3.	ASET LAIN-LAIN	36
C.3.4.	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	37
C.4.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	38
C.4.1.	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	39
C.4.2.	UTANG YANG BELUM DITAGIHKAN	39
C.4.3.	HIBAH YANG BELUM DISAHKAN	39
C.4.4.	UANG MUKA DARI KPPN	39
C.4.5.	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	40
C.5.	EKUITAS	40
D.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	40
D.1.	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	41
D.2.	BEBAN PEGAWAI	41
D.3.	BEBAN PERSEDIAAN	42
D.4.	BEBAN BARANG DAN JASA	42
D.5.	BEBAN PEMELIHARAAN	43
D.6.	BEBAN PERJALANAN DINAS	44
D.7.	BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KE MASYARAKAT	44
D.8.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	44
D.9.	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	45
D.10.	KEGIATAN NON OPERASIONAL	45
E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	46
E.1.	EKUITAS AWAL	46
E.2.	SURPLUS (DEFISIT) LO	46
E.3.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	47

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH EKUITAS	47
E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	47
E.5.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	47
E.5.2. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG	48
E.6. EKUITAS AKHIR	48
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	49
F.1. REKENING PEMERINTAH	49
F.2. PENGUNGKAPAN ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, TARGET, DAN REALISASI RINCIAN OUTPUT BERDASARKAN FUNGSI APBN DAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	49
F.3. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN	51
F.3.1. LELANG BARANG MILIK NEGARA	51
F.3.2. REVISI DIPA PAGU ANGGARAN	51
F.3.3. INFORMASI HIBAH LUAR NEGERI	51
F.3.4. TRANSAKSI RESIPROKAL	54
F.3.5. TRANSAKSI DENGAN MENGGUNAKAN MEKANISME RPATA	55
F.3.6. DAMPAK PEMBENTUKAN KABINET MERAH PUTIH	55
F.3.7. INFORMASI TUNTUTAN HUKUM	56
F.3.8. PEMBAYARAN GAJI POKOK PEGAWAI PINDAH INSTANSI YANG MASIH DITANGGUNG OLEH KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN	56
LAMPIRAN PENDUKUNG	57

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	2
Tabel 3 Kualitas Piutang	19
Tabel 4 Masa Manfaat Aset Tetap	21
Tabel 5 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	21
Tabel 6 Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2024	23
Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024	24
Tabel 8 Perbandingan Rincian Realisasi PNBPN 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	24
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2024	25
Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024	26
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	27
Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024	28
Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	29
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	30
Tabel 15 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	31
Tabel 16 Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	32
Tabel 17 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	33
Tabel 18 Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin	33
Tabel 19 Rincian Mutasi Kurang Saldo Peralatan dan Mesin	34
Tabel 20 Rincian Mutasi Tambah Saldo Peralatan dan Mesin	34
Tabel 21 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024	35
Tabel 22 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	35
Tabel 23 Rincian Transaksi Aset tak Berwujud per 31 Desember 2024	36
Tabel 24 Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	37
Tabel 25 Mutasi Aset Lain-Lain	37
Tabel 26 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024	38
Tabel 27 Rincian Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	38
Tabel 28 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024	39
Tabel 29 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023	40
Tabel 30 Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	41

Tabel 31 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	41
Tabel 32 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	42
Tabel 33 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	43
Tabel 34 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	43
Tabel 35 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	44
Tabel 36 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	45
Tabel 37 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	45
Tabel 38 Rincian Beban Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	46
Tabel 39 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas	47
Tabel 40 Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL)	48
Tabel 41 Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	48
Tabel 42 Rincian Pengesahan Hibah	48
Tabel 43 Program/Kegiatan dalam PN I dan Fungsi APBN Ekonomi 04	50
Tabel 44 Capaian Program Prioritas Nasional Tahun 2024	50
Tabel 45 Transaksi Resiprokal	55
Tabel 46 Realisasi Belanja pada DIPA Kemenko Perekonomian yang Digunakan untuk dukungan Kemenko Bidang Pangan Per 31 Desember 2024	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Risalah Lelang
Lampiran II	Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Lampiran III	Rincian Kas dan Setara Kas
Lampiran IV	Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran V	Neraca
Lampiran VI	Laporan Operasional
Lampiran VII	Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran VIII	Barang Milik Negara
Lampiran IX	Laporan Barang Pengguna Tingkat KL Intrakomptabel
Lampiran X	Laporan Barang Pengguna Tingkat KL Ekstrakomptabel
Lampiran XI	Laporan Barang Pengguna Tingkat KL Aset Tak Berwujud
Lampiran XII	Rincian Persediaan Menurut Unit Kerja per 31 Desember 2024
Lampiran XIII	Monitoring dan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP atas Laporan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian s.d. 31 Desember 2024
Lampiran XIV	Capaian Rincian Output
Lampiran XV	Rincian Transaksi dengan Mekanisme RPATA
Lampiran XVI	Nota Kesepakatan Angka Asersi Final



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Airlangga Hartarto



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT**

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2024 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, Mei 2025
Inspektur


Mirza S. Mashudi

EXECUTIVE SUMMARY

RINGKASAN

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp848.759.521,00. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp478.650.907.543,00 atau sebesar 90,19% dari alokasi anggaran sebesar Rp530.730.496.000,00.

Ringkasan perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1
Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran

No.	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Negara dan Hibah	-	848.759.521	-	-	243.841.124	-
2	Belanja Negara	530.730.496.000	478.650.907.543	90,19%	524.390.687.000	519.230.088.328	99,02%

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per tanggal pelaporan. Nilai Aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp40.863.270.562,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp430.443.117,00, Aset Tetap sebesar Rp26.939.394.328,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp13.493.433.117,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp10.505.398.162,00 dan Rp30.357.872.400,00.

Ringkasan perbandingan Neraca per 31 Desember 2024 dengan Neraca 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5
Aset				
Aset Lancar	430.443.117	917.216.774	-486.773.657	(53,07%)
Aset Tetap	26.939.394.328	26.785.926.360	153.467.968	0,57%
Aset Lainnya	13.493.433.117	14.967.489.319	-1.474.056.202	(9,85%)
Jumlah Aset	40.863.270.562	42.670.632.453	-1.807.361.891	(4,24%)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	10.505.398.162	13.003.139.364	-2.497.741.202	(19,21%)
Ekuitas Dana			0	
Ekuitas	30.357.872.400	29.667.493.089	690.379.311	2,33%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	40.863.270.562	42.670.632.453	-1.807.361.891	(4,24%)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp69.583,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp789.780.252.544,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp789.780.182.961,00. Terdapat surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp515.485.559,00. Sedangkan untuk Pos-Pos Luar Biasa bersaldo nihil, sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp789.264.697.402,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp29.667.493.089,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp789.264.697.402,00, dikurangi koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp926.945.600,00, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp789.028.131.113,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp30.357.872.400,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

URAIAN	CATATAN	31-Dec-24		% thd Angg	31-Dec-23
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	848.759.521	-	243.841.124
JUMLAH PENDAPATAN		-	848.759.521	-	243.841.124
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	132.225.614.000	126.609.191.905	95,75%	108.996.042.072
Belanja Barang	B.2.2	388.081.898.000	341.628.669.901	88,03%	393.801.489.489
Belanja Modal	B.2.3	10.422.984.000	10.413.045.737	99,90%	16.432.556.767
JUMLAH BELANJA		530.730.496.000	478.650.907.543	90,19%	519.230.088.328

- Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp478.650.907.543,00 atau sebesar 90,19% dari total pagu anggaran setelah dikurangi pengembalian belanja.
- Sedangkan realisasi belanja per 31 Desember 2023 adalah Rp519.230.088.328,00 atau sebesar 99,02% dari pagu anggaran Rp524.390.687.000,00.

Jakarta, Mei 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Airlangga Hartarto

II. NERACA

NERACA

PER 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	CATATAN	31-Dec-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	5.932.500	302.947.831
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	9.743.220	10.431.410
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.1.5	(48.716)	(52.157)
Persediaan	C.1.6	414.816.113	603.889.690
JUMLAH ASET LANCAR		430.443.117	917.216.774
ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	98.355.874.721	93.889.973.772
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.2	2.231.461.587	2.231.461.587
Aset Tetap Lainnya	C.2.3	163.179.000	146.140.500
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.4	(73.811.120.980)	(69.481.649.499)
JUMLAH ASET TETAP		26.939.394.328	26.785.926.360
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tidak Berwujud	C.3.1	9.798.216.045	11.090.945.832
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2	5.883.862.135	7.842.606.562
Aset Lain-Lain	C.3.3	11.516.428.317	6.827.053.199
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.4	(13.705.073.380)	(10.793.116.274)
JUMLAH ASET LAINNYA		13.493.433.117	14.967.489.319
JUMLAH ASET		40.863.270.562	42.670.632.453
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	10.505.308.162	12.995.753.627
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.4.3	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.4.4	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.5	90.000	7.385.737
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		10.505.398.162	13.003.139.364
EKUITAS	C.5		
Ekuitas	C.5	30.357.872.400	29.667.493.089
JUMLAH EKUITAS		30.357.872.400	29.667.493.089
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		40.863.270.562	42.670.632.453

Jakarta, Mei 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Airlangga Hartarto

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	CATATAN	31-Dec-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan PNPB	D.1	69.583	792.520
JUMLAH PENDAPATAN		69.583	792.520
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	126.574.827.071	109.295.553.146
Beban Persediaan	D.3	4.628.434.306	4.959.516.808
Beban Barang dan Jasa	D.4	498.186.946.209	333.704.220.483
Beban Pemeliharaan	D.5	7.005.823.699	8.135.106.582
Beban Perjalanan Dinas	D.6	142.613.040.421	170.987.306.946
Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat	D.7	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	10.771.184.279	9.948.936.617
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	(3.441)	10.362
Beban Lain-Lain		-	-
JUMLAH BEBAN		789.780.252.544	637.030.650.944
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Operasional		(789.780.182.961)	(637.029.858.424)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		403.120.800	(439.031.579)
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		112.364.759	192.118.986
Jumlah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional		515.485.559	(246.912.593)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(789.264.697.402)	(637.276.771.017)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa			
SURPLUS/DEFISIT LO		(789.264.697.402)	(637.276.771.017)

Jakarta, Mei 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Airlangga Hartarto

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	CATATAN	31-Dec-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	%
EKUITAS AWAL	E.1	29.667.493.089	17.351.852.200	12.315.640.889	70,98
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(789.264.697.402)	(637.276.771.017)	(151.987.926.385)	23,85
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-	-	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	926.945.600	(684.750)	927.630.350	(135.469,93)
Koreksi Atas Reklasifikasi		926.945.600	-	926.945.600	100,000
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-	-	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		-	(4.578.750)	4.578.750	(100,00)
Koreksi Lain-Lain		-	3.894.000	(3.894.000)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	789.028.131.113	649.593.096.656	139.435.034.457	21,46
KENAIKAN PENURUAN EKUITAS		690.379.311	12.315.640.889	(11.625.261.578)	(94,39)
EKUITAS AKHIR	E.8	30.357.872.400	29.667.493.089	690.379.311	2,33

Jakarta, Mei 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Airlangga Hartarto

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

Entitas

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

A.2. PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Profil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbentuk pada tanggal 25 Oktober 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN). Seiring dengan pergantian Pemerintahan, nama Kementerian juga ikut beberapa kali berubah. Nama "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian" sendiri baru dimulai pada tahun 2000.

Pada tahun 2024 terdapat pergantian kabinet yang baru dan menyebabkan perubahan pada struktur kelembagaan pemerintah pusat. Proses penataan organisasi pun dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk menyesuaikan rekomendasi restrukturisasi organisasi, berdasarkan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Penetapan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatur peranan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda Pembangunan nasional di bidang perekonomian;
- d. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan di bidang perekonomian;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- f. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
- g. penyelesaian permasalahan di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian; dan
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
- j. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kementerian Pariwisata; dan Instansi lain yang dianggap perlu.

Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 sesuai hal tersebut di atas, maka diperlukan turunan peraturan dimaksud untuk mengatur kelembagaan internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini terwujud dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan tanggal 26 November 2024. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatur struktur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata;
- g. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi;
- h. Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa;
- i. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital;
- j. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan
- k. Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi.

Struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



A.3. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2021-2024 yang merupakan penerjemahan dari visi dan misi Presiden-Wakil Presiden. Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2021-2024 adalah **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**. Mengacu pada visi yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan visi Kementerian sebagai berikut.

“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Pembangunan ekonomi dalam mewujudkan visi-misi Presiden diharapkan dapat diselenggarakan melalui perluasan kesempatan dan akses pada seluruh rakyat Indonesia dalam berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan serta peningkatan produktivitas perekonomian dengan tetap memperhatikan kesinambungan antar generasi. Visi tersebut menjadi landasan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang

perekonomian, serta berfokus dalam mewujudkan sinergi antar Kementerian/Lembaga di bidang perekonomian untuk memastikan terwujudnya sasaran pembangunan di bidang perekonomian dalam RPJMN tahun 2021 - 2024.

Visi Presiden-Wakil Presiden 2021-2024 tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden-Wakil Presiden yang meliputi:

- 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;**
- 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;**
- 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;**
- 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;**
- 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;**
- 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;**
- 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;**
- 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan**
- 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.**

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Presiden-Wakil Presiden yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan Misi Kementerian sebagai berikut:

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke 1, 2, 3, dan 4, sebagai Koordinator dalam Pelaksanaan Inisiatif dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian dalam rangka:

- 1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas;**
- 2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan;**
- 3. Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; dan**
- 4. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian.**

Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dicapai melalui Misi/Peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Koordinator Kementerian Teknis di bidang perekonomian dalam mewujudkan 4 (empat) sasaran pembangunan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan peningkatan daya saing ekonomi.

Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dirumuskan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah:

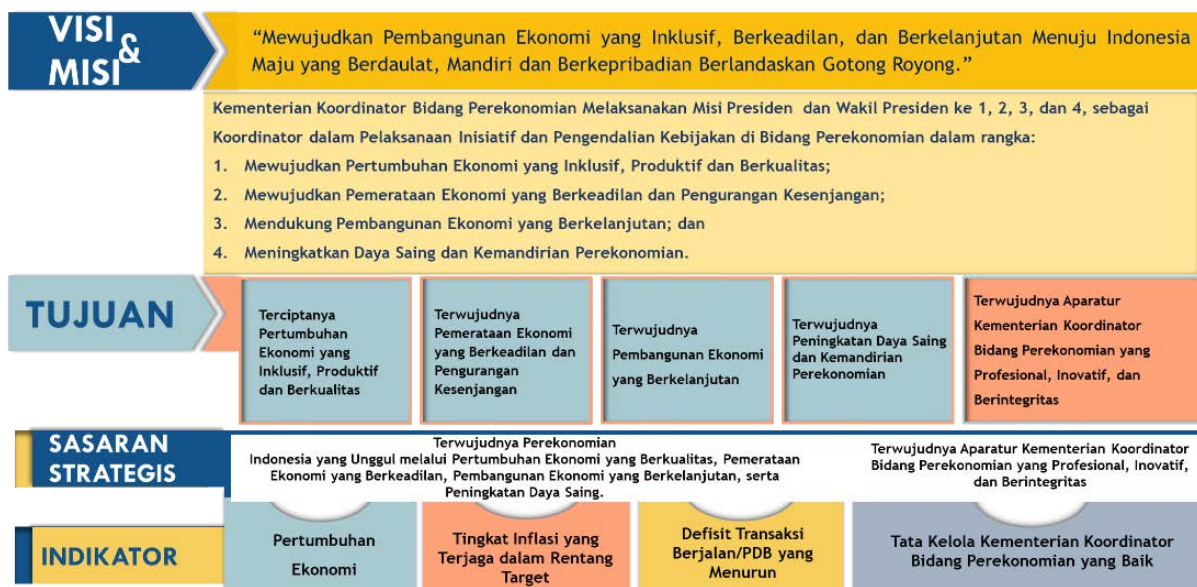
1. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas;
2. Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan;
3. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
4. Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian; dan
5. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dari visi, misi, dan tujuan diatas terdapat kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diantaranya:

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
1.	Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkualitas	Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.	Pertumbuhan Ekonomi
2.	Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan		Tingkat Inflasi yang Terjaga dalam Rentang Target
3.	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan		

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
4.	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian		Defisit Transaksi Berjalan/PDB yang Menurun
5.	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik



Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk tingkat pelaporan Eselon I, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Untuk periode pelaporan di tahun anggaran 2024, satuan kerja yang dicakup dalam Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi dua satuan kerja, yaitu Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) dan Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755), yang keduanya dikonsolidasikan dalam satu unit pelaporan tingkat Eselon I pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Basis Akuntansi

A.5. BASIS AKUNTANSI

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.6. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan menggunakan kebijakan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

(3) Belanja

Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/ atau telah

dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO), apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah]; dan
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

*Penyusutan Aset
Tetap*

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel

Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

*Piutang Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i>	4 tahun
<i>Franchise</i>	5 tahun

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kemenko Bidang Perekonomian memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp530.730.496.000,00. Selama tahun 2024, dilakukan revisi atas DIPA Awal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Berikut ini adalah perubahan revisi terkait dengan pagu anggaran Kemenko Bidang Perekonomian:

Tabel 6
Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2024

Uraian	2024	
	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	152.470.734.000	132.225.614.000
Belanja Barang	364.334.710.000	388.081.898.000
Belanja Modal	7.236.829.000	10.422.984.000
Jumlah Belanja	524.042.273.000	530.730.496.000

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu belanja pegawai sebesar Rp20.245.120.000,00, penambahan pagu belanja barang sebesar Rp23.747.188.000,00, dan penambahan belanja modal sebesar Rp3.186.155.000,00.

B.1.PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp848.759.521

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp848.759.521,00, tidak terdapat estimasi pendapatan yang ditetapkan pada anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 7
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pendapatan dari Pemindahan BMN Lainnya	-	404.565.800	-
2	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	69.583	-
3	Pendapatan dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	-	18.199.968	-
4	Pendapatan dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	-	423.549.170	-
5	Pendapatan dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	-	2.375.000	-
Jumlah		-	848.759.521	-

Realisasi PNBP per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp604.918.397,00 atau naik sebesar 248,08% dibandingkan realisasi PNBP pada 31 Desember 2023. Perbandingan realisasi PNBP disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8
Perbandingan Rincian Realisasi PNBP
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31-Dec	31-Dec	Kenaikan (Penurunan)	
		TA 2024	TA 2023		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	404.565.800	6.789.999	397.775.801	5858,26%
2	Pendapatan dan Penerimaan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	69.583	792.520	(722.937)	(91,22%)
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	18.199.968	14.858.314	3.341.654	22,49%
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	423.549.170	221.400.291	202.148.879	91,30%
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	2.375.000	-	2.375.000	100,00%
Jumlah		848.759.521	243.841.124	604.918.397	248,08%

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut

- a. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN merupakan penerimaan atas lelang berdasarkan Risalah Lelang berikut:
 - 1) Risalah Lelang Nomor 129/07.01/2024-01 tanggal 17 April 2024 sebesar Rp31.059.000,00.

- 2) Risalah Lelang Nomor 711/07.01/2024-01 tanggal 8 November 2024 sebesar Rp21.743.800,00.
- 3) Risalah Lelang Nomor 713/07.01/2024-01 tanggal 8 November 2024 sebesar Rp172.628.000,00.
- 4) Risalah Lelang Nomor 743/07.01/2024-01 tanggal 19 November 2024 sebesar Rp169.490.000,00.
- 5) Risalah Lelang Nomor 892/07.01/2024-01 tanggal 19 Desember 2024 sebesar Rp9.645.000,00.

Informasi mengenai aset yang dilelang dapat dilihat di laporan pendukung pada Lampiran I;

- b. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp69.583,00
- c. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL atas kelebihan gaji pegawai tahun 2023 sebesar Rp18.199.968,00;
- d. Penerimaan kembali belanja barang TAYL terdiri atas setoran perjadi, PPNPN, Honorarium Tim sebesar Rp423.549.170,00; dan
- e. Penerimaan kembali belanja modal TAYL atas meja sudut sebesar Rp2.375.000,00.

B.2.BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja
Negara
Rp478.650.907.543

Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp478.650.907.543,00 atau mencapai 90,19% dari alokasi anggaran sebesar Rp530.730.496.000,00. Realisasi belanja tersebut seluruhnya merupakan realisasi belanja dari transaksi kas, setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp247.051.300,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2024 berdasarkan program dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2024

Kode Program	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Netto (Rp)	(%)	Pengembalian Belanja (Rp)
WA	Program Dukungan Manajemen	303.397.676.000	290.704.821.413	95,82%	79.855.049
CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	227.332.820.000	187.946.086.130	82,67%	167.196.251
Jumlah		530.730.496.000	478.650.907.543	90,19%	247.051.300

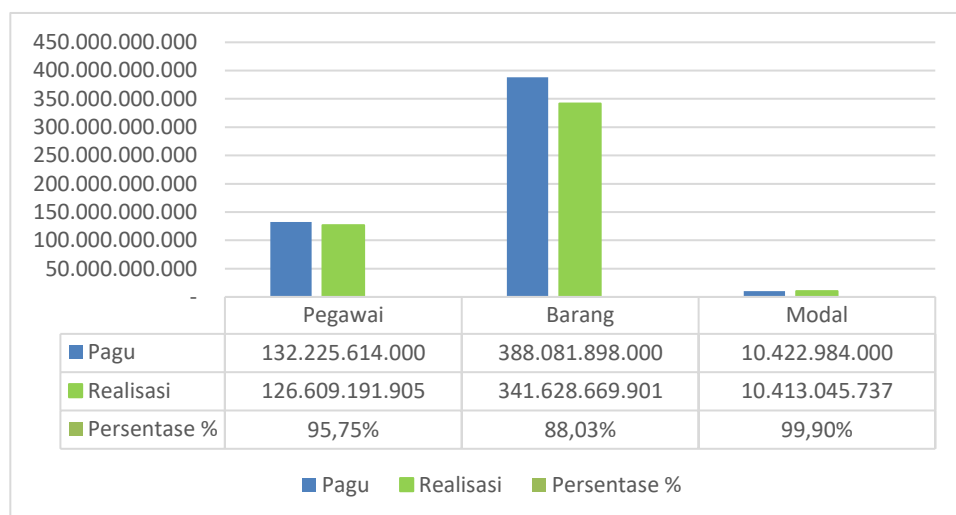
Realisasi belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 31 Desember 2024, seluruhnya bersumber dari dana Rupiah Murni sebesar

Rp478.650.907.543,00. Berdasarkan jenis belanja, rincian anggaran dan persentase realisasi terhadap anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	132.225.614.000	126.609.191.905	5.616.422.095	95,75%
52	Belanja Barang	388.081.898.000	341.628.669.901	46.453.228.099	88,03%
53	Belanja Modal	10.422.984.000	10.413.045.737	9.938.263	99,90%
Jumlah Belanja		530.730.496.000	478.650.907.543	52.079.588.457	90,19%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Persentase realisasi atas jenis belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 31 Desember 2024 paling tinggi adalah belanja modal yakni 99,90% atau sebesar Rp10.413.045.737,00 dari pagu anggaran belanja modal sebesar Rp10.422.984.000,00. Adapun untuk belanja pegawai terealisasi senilai 95,75% atau sebesar Rp126.609.191.905,00, sedangkan belanja barang sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi 88,03% atau sebesar Rp341.628.669.901,00. Perbandingan realisasi belanja pada periode 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja	
		31-Dec TA 2024 (Rp)	31-Dec TA 2023 (Rp)
51	Belanja Pegawai	126.609.191.905	108.996.042.072
52	Belanja Barang	341.628.669.901	393.801.489.489
53	Belanja Modal	10.413.045.737	16.432.556.767
Jumlah		478.650.907.543	519.230.088.328

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai
Rp126.609.191.905

Pada periode anggaran sampai dengan 31 Desember 2024, pagu Belanja Pegawai telah terealisasi sebesar 95,75% atau sebesar Rp126.609.191.905,00 dari pagu sebesar Rp132.225.614.000,00. Nominal pagu dan realisasi terbesar pada Belanja Pegawai adalah akun Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) yang digunakan untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai PNS, yang terealisasi sebesar 95,57% dari total pagu kelompok belanja dimaksud.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan capaian masing-masing sebesar Rp126.609.191.905,00 dan Rp108.996.042.072,00 atau naik sebesar 16,16%. Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan dikarenakan terdapat penambahan pegawai dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024. Adapun Pengembalian Belanja Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp51.059.695,00 dan Rp12.310.022,00. Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024

Kelompok Belanja	Uraian	31-Dec-24			Realisasi 31 Desember	Perbandingan Realisasi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tahun 2023 (Rp)	Naik (turun) (Rp)	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	32.668.466.000	31.408.303.490	96,14%	28.389.979.340	3.018.324.150	10,63%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	619.000	524.091	84,67%	413.600	110.491	26,71%
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.907.024.000	1.896.278.600	99,44%	1.662.179.110	234.099.490	14,08%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	503.828.000	487.709.426	96,80%	421.386.834	66.322.592	15,74%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	3.073.609.000	3.029.220.000	98,56%	2.522.165.000	507.055.000	20,10%
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.914.699.000	2.801.552.000	96,12%	2.456.494.000	345.058.000	14,05%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	535.891.000	481.791.088	89,90%	245.806.566	235.984.522	96,00%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.428.884.000	1.422.546.060	99,56%	1.390.753.680	31.792.380	2,29%
511129	Belanja Uang Makan PNS	3.935.378.000	3.890.539.000	98,86%	3.707.888.000	182.651.000	4,93%
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	713.257.000	677.960.000	95,05%	858.900.000	(180.940.000)	(21,07%)
511152	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	293.199.000	249.375.000	85,05%	284.375.000	(35.000.000)	(12,31%)
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.803.296.000	1.717.620.600	95,25%	-	1.717.620.600	100,00%
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	39.000	34.618	88,76%	-	34.618	100,00%
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	53.024.000	49.571.340	93,49%	-	49.571.340	100,00%
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	12.692.000	10.918.952	86,03%	-	10.918.952	100,00%
511623	Belanja Tunj. Struktural PPPK	57.000.000	39.375.000	69,08%	-	39.375.000	100,00%
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	282.180.000	276.756.000	98,08%	-	276.756.000	100,00%
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	66.000.000	62.498.460	94,69%	-	62.498.460	100,00%
511628	Belanja Uang Makan PPPK	235.853.000	226.037.000	95,84%	-	226.037.000	100,00%
512211	Belanja Uang Lembur	419.791.000	412.437.000	98,25%	184.836.000	227.601.000	123,14%
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	10.800.000	2.611.000	24,18%	-	2.611.000	100,00%
512411	Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja)	78.834.337.000	75.343.114.084	95,57%	66.883.174.964	8.459.939.120	12,65%
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2.475.748.000	2.173.478.791	87,79%	-	2.173.478.791	100,00%
Pengembalian Belanja Pegawai		-	(51.059.695)	-	(12.310.022)	(38.749.673)	314,78%
Jumlah Kelompok Belanja Pegawai		132.225.614.000	126.609.191.905	95,75%	108.996.042.072	17.613.149.833	16,16%

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja
Barang
Rp341.628.669.901

Pada periode 31 Desember 2024, pagu Belanja Barang telah terealisasi sebesar 88,03% atau sebesar Rp341.628.669.901,00 dari pagu sebesar Rp388.081.898.000,00.

Nominal pagu dan realisasi terbesar pada Belanja Barang adalah akun Belanja Sewa yang terealisasi sebesar Rp70.120.359.793,00 atau 97,34% dari total anggaran belanja tersebut sebesar Rp72.035.681.000,00. Terbesar kedua adalah Belanja Jasa Lainnya yang terealisasi sebesar Rp58.567.210.846,00 atau 97,25% dari total anggaran belanja tersebut sebesar Rp60.220.609.000,00.

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2024 jika dibandingkan 31 Desember 2023, dengan capaian realisasi masing-masing adalah sebesar Rp341.628.669.901,00 dan Rp393.801.489.489,00. Realisasi anggaran Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp52.172.819.588,00 atau 13,25%.

Adapun Pengembalian Belanja Barang pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp195.991.605,00 dan Rp946.944.912,00. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13
Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Kode Akun	Uraian	Realisasi 31 Desember 2024			Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Perbandingan Realisasi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Naik (turun) (Rp)	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	7.005.550.000	6.837.836.901	97,61%	6.048.922.246	788.914.655	13,04%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	41548.000	32.026.630	77,08%	15.783.000	16.243.630	102,92%
521115	Belanja Honor Operasional Satker	946.956.000	899.174.000	94,95%	1621850.000	(722.676.000)	(44,56%)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4.603.238.000	3.346.926.663	72,71%	3.032.754.632	314.172.031	10,36%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID -19	-	-	0,00%	521686.877	(521686.877)	(100,00%)
521211	Belanja Bahan	17.974.884.000	13.880.291056	77,22%	15.619.435.539	(1739.144.483)	(11,13%)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5.789.456.000	4.620.486.149	79,81%	6.967.685.000	(2.347.198.851)	(33,69%)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	959.983.000	941878.067	98,11%	1069.826.287	(127.948.220)	(11,96%)
521241	Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	0,00%	11379.720	(11379.720)	(100,00%)
521252	Belanja Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	23.200.000	15.893.325	68,51%	87.880.750	(71987.425)	(81,91%)
521311	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.334.490.000	4.465.997.269	83,72%	4.974.595.830	(508.598.561)	(10,22%)
521332	Belanja Barang Persediaan Lainnya	507.000.000	493.524.242	97,34%	555.472.885	(61948.643)	(11,15%)
521341	Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	0,00%	41011000	(41011000)	(100,00%)
522111	Belanja Langganan Listrik	4.737.313.000	4.708.235.743	99,39%	4.677.080.489	31155.254	0,67%
522112	Belanja Langganan Telepon	75.156.000	67.607.635	89,96%	57.801017	9.806.618	16,97%
522113	Belanja Langganan Air	72.000.000	70.763.040	98,28%	17.608.385	53.154.655	100,00%
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	9.255.233.000	8.935.666.430	96,55%	6.907.665.543	2.028.000.887	29,36%
522131	Belanja Jasa Konsultan	13.043.146.000	10.056.085.047	77,10%	14.335.906.468	(4.279.821421)	(29,85%)
522141	Belanja Sewa	72.035.681000	70.120.359.793	97,34%	64.450.248.209	5.670.111584	8,80%
522151	Belanja Jasa Profesi	5.570.851000	4.451060.000	79,90%	4.582.469.325	(131409.325)	(2,87%)
522191	Belanja Jasa Lainnya	60.220.609.000	58.567.210.846	97,25%	79.151882.361	(20.584.671515)	(26,01%)
522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	0,00%	5.924.000	(5.924.000)	(100,00%)
523111	Belanja Pemeliharaan gedung dan Bangunan	2.865.726.000	2.805.373.308	97,89%	4.132.991239	(1327.617.931)	(32,12%)
523112	Belanja Barang Persediaan Gedung dan Bangunan	199.766.000	-	0,00%	-	-	-
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.860.781000	3.745.172.744	97,01%	3.563.829.890	131342.854	5,09%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.852.243.000	26.339.602.983	80,18%	29.624.360.440	(3.284.757.457)	(11,09%)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1125.755.000	975.690.000	86,67%	1098.650.500	(122.960.500)	(11,19%)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	42.480.338.000	32.814.506.917	77,25%	30.854.740.188	1959.766.729	6,35%
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	51496.959.000	42.008.484.586	81,57%	65.178.712.910	(23.170.228.324)	(35,55%)
524211	Belanja Perjalanan Biasa-Luar Negeri	16.189.401000	16.189.094.785	100,00%	11.141131830	5.047.962.955	45,31%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	28.814.635.000	24.435.713.347	84,80%	34.399.147.841	(9.963.434.494)	(28,96%)
Pengembalian Belanja Barang			(195.991.605)		(946.944.912)	750.953.307	(79,30%)
Jumlah Kelompok Belanja Barang		388.081.898.000	341.628.669.901	88,03%	393.801.489.489	(52.172.819.588)	(13,25%)

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Pada periode 31 Desember 2024, pagu Belanja Modal telah terealisasi sebesar 99,90% atau sebesar Rp10.413.045.737,00 dari pagu sebesar Rp10.413.045.737
Rp10.413.045.737 Rp10.422.984.000,00. Nominal pagu terbesar pada Belanja Modal terdapat

pada kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.325.944.000,00, kemudian diikuti Belanja Modal Lainnya sebesar Rp97.040.000,00 yang digunakan untuk perolehan Aset Tak Berwujud dalam bentuk perangkat lunak komputer (*software*). Capaian nominal terbesar realisasi Belanja Modal terdapat pada kelompok Belanja Peralatan Mesin, yang terealisasi sebesar Rp10.317.236.087,00 atau 99,92%. Sedangkan untuk Belanja Modal Lainnya terealisasi sebesar Rp95.809.650,00 atau 98,73%. Perbandingan realisasi belanja modal pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 dengan 31 Desember 2023, masing-masing sebesar Rp10.413.045.737,00 dan Rp16.432.556.767,00. Rincian belanja modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Kelompok Belanja	Uraian	Realisasi 31 Desember 2024			Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Perbandingan Realisasi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Naik (turun) (Rp)	%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.325.944.000	10.317.236.087	99,92%	15.744.576.682	(5.427.340.595)	(34,47%)
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	0,00%	17.076.240	(17.076.240)	(100,00%)
5361	Belanja Modal Lainnya	97.040.000	95.809.650	98,73%	670.903.845	(575.094.195)	0,00%
Pengembalian Belanja Modal		-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		10.422.984.000	10.413.045.737	99,90%	16.432.556.767	(6.019.511.030)	(36,63%)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1.ASET LANCAR

Aset Lancar
Rp430.443.117

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp430.443.117,00 dan Rp917.216.774,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Aset Lancar	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	5.932.500	302.947.831
3	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)		-
4	Piutang Bukan Pajak	9.743.220	10.431.410
5	Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Bukan Pajak	(48.716)	(52.157)
6	Persediaan	414.816.113	603.889.690
Jumlah		430.443.117	917.216.774

C.1.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 bersaldo sebesar Rp0,00 dan saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) per 31 Desember 2024 yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian atas Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan pada Lampiran II.

C.1.2. KAS BENDAHARA LAINNYA DAN SETARA KAS

*Kas Bendahara
Lainnya dan
Setara Kas
Rp5.932.500*

Kas Bendahara Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 bersaldo Rp5.932.500,00 dan Rp302.947.831,00. Kas lainnya setara kas per 31 Desember 2024 merupakan kas yang berada di penguasaan bendahara yang bukan berasal dari UP/TUP. Rincian saldo kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- Penerimaan uang pengembalian belanja lewat tahun sebesar Rp5.842.500,00; dan
 - Penerimaan uang potongan pajak yang belum disetor sebesar Rp90.000,00.
- Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing satker dapat dilihat pada Lampiran III.

C.1.3. BELANJA DIBAYAR DIMUKA

*Belanja Dibayar
Dimuka Rp0*

Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.1.4. PIUTANG BUKAN PAJAK

*Piutang Bukan
Pajak Rp9.743.220*

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp9.743.220,00 dan Rp10.431.410,00 yang

merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

C.1.5. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH-PIUTANG BUKAN PAJAK

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Piutang
Bukan Pajak
Rp(48.716)*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar minus Rp48.716,00 dan minus Rp52.157,00. Nilai tersebut merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2024 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian digolongkan dalam piutang dengan kualitas lancar. Dengan demikian perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek sesuai dengan yang diatur di PMK Nomor 69/PMK/06/2014 menggunakan nilai penyisihan sebesar 0,5%.

C.1.6. PERSEDIAAN

*Persediaan
Rp414.816.113*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp414.816.113,00 dan Rp603.889.690,00. Persediaan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31-Dec-24			31-Dec-23		
		Satuan Kerja		Jumlah (Rp)	Satuan Kerja		Jumlah (Rp)
		427752 (Rp)	427755 (Rp)		427752 (Rp)	427755 (Rp)	
1	Barang Konsumsi	166.102.594	94.274.446	260.377.040	172.022.934	219.213.865	391.236.799
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	215.12.485	12.068.800	33.581.285	39.572.080	30.113.033	69.685.113
3	Persediaan Lainnya	120.857.788	-	120.857.788	142.967.778	-	142.967.778
Jumlah		308.472.867	106.343.246	414.816.113	354.562.792	249.326.898	603.889.690

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 berdasarkan metode FIFO. Saldo persediaan menurut unit kerja per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran XII.

C.2.ASET TETAP

*Aset Tetap
Rp26.939.394.328*

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp26.939.394.328,00 dan Rp26.785.926.360,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Aset Tetap
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31-Dec-24			31-Dec-23		
		Satuan Kerja		Jumlah (Rp)	Satuan Kerja		Jumlah (Rp)
		427752 (Rp)	427755 (Rp)		427752 (Rp)	427755 (Rp)	
1	Peralatan dan Mesin	84.832.052.970	13.523.821.751	98.355.874.721	85.916.013.348	7.973.960.424	93.889.973.772
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.231.461.587	-	2.231.461.587	2.231.461.587	-	2.231.461.587
3	Aset Tetap Lainnya	163.179.000	-	163.179.000	146.140.500	-	146.140.500
	Total Nilai Perolehan	87.226.693.557	13.523.821.751	100.750.515.308	88.293.615.435	7.973.960.424	96.267.575.859
	Akumulasi Penyusutan	- 70.088.398.684	- 3.722.722.296	- 73.811.120.980	- 67.242.077.781	- 2.239.571.718	- 69.481.649.499
	Jumlah	17.138.294.873	9.801.099.455	26.939.394.328	21.051.537.654	5.734.388.706	26.785.926.360

C.2.1. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan Mesin
Rp98.355.874.721

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp98.355.874.721,00 dan Rp93.889.973.772,00. Penambahan nilai Peralatan dan Mesin terdiri pembelian sebesar Rp10.317.236.087,00, aset dari belanja pemeliharaan sebesar Rp70.794.135,00, reklas masuk sebesar Rp2.699.562.680,00. Terdapat mutasi kurang berupa reklas keluar sebesar Rp2.699.562.680,00 dikarenakan adanya kesalahan kodefikasi barang dan Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp5.922.129.273,00. Rincian mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin

Uraian Transaksi	Saldo (Rp)	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023		93.889.973.772
Mutasi Tambah		
Pembelian	10.317.236.087	
Aset dari belanja pemeliharaan	70.794.135	
Reklas Masuk Kodefikasi Barang	2.699.562.680	
Total Mutasi Tambah	13.087.592.902	
Mutasi Kurang		
Reklas Keluar Kodefikasi Barang	2.699.562.680	
Penghentian Penggunaan	5.922.129.273	
Total Mutasi Kurang	8.621.691.953	
Nilai Perolehan per 31 Desember 2024		98.355.874.721
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2024		72.730.090.235
Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024		25.625.784.486

Transaksi penambahan dan pengurangan pada Peralatan dan Mesin terdiri dari:

Tabel 19
Rincian Mutasi Kurang Saldo Peralatan dan Mesin

No	Kode Barang	Jumlah (Unit)	Rupiah Aset (Rp)
301	Alat Bantu	1	226.644.146
302	Alat Angkutan Darat	14	923.833.000
303	Alat Ukur	4	38.040.000
305	Alat Kantor & Rumah Tangga	939	6.345.180.891
306	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	25	368.055.695
307	Alat Kedokteran	3	78.128.400
308	Alat Laboratorium	-	-
309	Alat Khusus Kepolisian	-	-
310	Alat Komputer	70	632.809.821
Total		1.056	8.612.691.953

Tabel 20
Rincian Mutasi Tambah Saldo Peralatan dan Mesin

Kelompok BMN	Mutasi Peralatan dan Mesin	Kuantitas	Nilai (Rp)
A. Saldo Transaksi Pembelian dan Transfer Masuk			
301	Alat Bantu	0	-
302	Alat Angkutan	1	3.608.100
303	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	-
305	Alat Kantor & Rumah Tangga	435	3.272.292.229
306	Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	95	3.666.022.843
307	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4	63.462.585
308	Alat Laboratorium	1	60.420.000
309	Alat Khusus Kepolisian	0	-
310	Komputer	299	6.021.787.145
319	Peralatan Olahraga	0	-
Total Saldo Pembelian dan Transfer Masuk		835	13.087.592.902
B. Transaksi Pengembangan Nilai Aset			
301	Alat Besar		-
310	Komputer		-
Total Transaksi Pengembangan Nilai Aset			-
C. Transaksi Pengembangan Melalui KDP			
301	Alat Besar		-
310	Komputer		-
Total Transaksi Pengembangan Nilai Aset			-
Mutasi Peralatan dan Mesin s.d 31 Desember 2024		835	13.087.592.902

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp2.231.461.587

C.2.2. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.231.461.587,00 dan Rp2.231.461.587,00. Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu berupa Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil. Tidak terdapat mutasi tambah dan/atau kurang pada saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024.

Aset Tetap lainnya
Rp163.179.000

C.2.3. ASET TETAP LAINNYA

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp163.179.000,00 dan Rp146.140.500,00. Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara fisik berupa wayang, lukisan dan artwork. Penambahan saldo aset tetap lainnya pada tahun 2024 dikarenakan terdapat pembelian wayang dan dekorasi.

C.2.4. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp73.811.120.980)

Saldo yang dilaporkan dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar minus Rp73.811.120.980,00 dan minus Rp69.481.649.499,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 21
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	98.355.874.721	(72.730.090.235)	25.625.784.486
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.231.461.587	(1.081.030.745)	1.150.430.842
3	Aset Tetap Lainnya	163.179.000	-	163.179.000
Jumlah		100.750.515.308	(73.811.120.980)	26.939.394.328

C.3.ASET LAINNYA

Aset Lainnya
Rp13.493.433.117

Saldo Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.493.433.117,00 dan Rp14.967.489.319,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Tabel 22
Rincian Aset Lainnya
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31-Dec-24			31-Dec-23		
		Satuan Kerja		Jumlah (Rp)	Satuan Kerja		Jumlah (Rp)
		427752 (Rp)	427755 (Rp)		427752 (Rp)	427755 (Rp)	
1	Aset Tak Berwujud	9.166.312.200	631.903.845	9.798.216.045	10.378.741.987	712.203.845	11.090.945.832
2	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	5.883.862.135	-	5.883.862.135	7.842.606.562	-	7.842.606.562
3	Aset Lain-lain	11516.428.317	-	11516.428.317	6.808.133.199	18.920.000	6.827.053.199
Total Nilai Perolehan		26.566.602.652	631.903.845	27.198.506.497	25.029.481.748	731.123.845	25.760.605.593
Akumulasi Penyusutan		-	13.636.110.880	-	10.670.908.774	-	10.793.116.274
Jumlah		12.930.491.772	562.941.345	13.493.433.117	14.358.572.974	608.916.345	14.967.489.319

C.3.1. ASET TAK BERWUJUD

Aset Tak Berwujud
Rp9.798.216.045

Saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.798.216.045,00 dan

Rp11.090.945.832,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupa *Software*, Hasil Kajian/Penelitian, dan Aset Tak Berwujud Lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun rincian mutasi Aset Tak Berwujud sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Transaksi Aset tak Berwujud per 31 Desember 2024

Jenis Transaksi Aset Tak Berwujud	Nilai (Rp)
Saldo Awal	11.090.945.832
- <i>Software</i>	4.884.433.200
- Hasil Kajian/Penelitian	5.318.010.000
- Aset Tak Berwujud Lainnya	888.502.632
Mutasi Tambah	
- Reklas Masuk Aset Tak Berwujud Lainnya	985.333.100
- Pembelian Aset Tak Berwujud Lainnya	78.771.150
Mutasi Kurang	
- Penghentian <i>Software</i> Komputer	970.002.150
- Reklas Keluar <i>Software</i> Komputer	985.333.100
- Penghentian Aset Tak Berwujud Lainnya	401.498.787
Saldo ATB Per 31 Desember 2024	9.798.216.045
- <i>Software</i>	2.929.097.950
- Hasil Kajian/Penelitian	5.318.010.000
- Aset Tak Berwujud Lainnya	1.551.108.095

C.3.2. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

*Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp5.883.862.135*

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.883.862.135,00 dan Rp7.842.606.562,00. Saldo tersebut merupakan saldo transaksi RPATA pada rekening penampungan yang akan dilakukan pembayaran pada TA 2025 setelah pekerjaan TA 2024 telah selesai dilaksanakan. Rincian transaksi dengan mekanisme RPATA dapat dilihat pada Lampiran XV.

C.3.3. ASET LAIN-LAIN

*Aset Lain-lain
Rp11.516.428.317*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.516.428.317,00 dan Rp6.827.053.199,00. Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) terdiri atas aset tetap dan aset tak berwujud yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan

dalam operasional entitas, atau dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, terdiri atas:

Tabel 24
Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	4.795.613.027	1205.008.172
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	6.720.815.290	5.622.045.027
Jumlah		11.516.428.317	6.827.053.199

Mutasi atas saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Mutasi Aset Lain-Lain

Uraian	Nilai (Rp)
Nilai perolehan per 31 Desember 2023	6.827.053.199
Mutasi Tambah	
Penghentian Aset Dari Penggunaan Aset Tetap	5.922.129.273
Penghentian Aset Dari Penggunaan Aset Tak Berwujud	1371500.937
Mutasi Kurang	
Penghapusan Aset Tetap	2.331524.418
Penghapusan Aset Tak Berwujud	272.730.674
Saldo Akhir 31 Desember 2024	11.516.428.317

Akumulasi

Penyusutan Aset

Lain-lain

Rp(13.705.073.380)

C.3.4. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN

Saldo yang dilaporkan dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar minus Rp13.705.073.380,00 dan minus Rp10.793.116.274,00.

Tabel 26
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	2.929.097.950	(2.789.069.450)	140.028.500
2	Hasil Kajian/Penelitian	5.318.010.000	-	5.318.010.000
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	1.551.108.095	-	1.551.108.095
Jumlah A. Aset Tak Berwujud		9.798.216.045	(2.789.069.450)	7.009.146.595
B	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan			
1	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan		-	-	-
C	Aset Lainnya			
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	4.795.613.027	(4.792.207.427)	3.405.600
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	6.720.815.290	(6.123.796.503)	597.018.787
Jumlah B. Aset Lainnya		11.516.428.317	(10.916.003.930)	600.424.387
D	Aset Lainnya Yang Belum Diregister			
1	Aset Lainnya Yang Belum Diregister	-	-	-
Aset Lainnya Yang Belum Diregister		-	-	-
Total		21.314.644.362	(13.705.073.380)	7.609.570.982

C.4.KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek
Rp10.505.398.162

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.505.398.162,00 dan Rp13.003.139.364,00 yang merupakan kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Tabel 27
Rincian Utang Jangka Pendek
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	31-Dec-24			31-Dec-23		
		Satuan Kerja		Jumlah	Satuan Kerja		Jumlah
		427752 (Rp)	427755 (Rp)		427752 (Rp)	427755 (Rp)	
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	10.109.986.457	395.321.705	10.505.308.162	12.703.623.912	292.129.715	12.995.753.627
2	Utang Yang Belum Ditagihkan	-	-	-	-	-	-
3	Hibah Yang Belum Disahkan	-	-	-	-	-	-
4	Uang Muka dari KPPN	-	-	-	-	-	-
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	90.000	-	90.000	7.385.737	-	7.385.737
Jumlah		10.110.076.457	395.321.705	10.505.398.162	12.711.009.649	292.129.715	13.003.139.364

C.4.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

*Utang Kepada Pihak
ketiga
Rp10.505.308.162*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp10.505.308.162,00 dan Rp12.995.753.627,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel 28
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2024

Uraian Akun	31-Dec-24			Keterangan
	Satuan Kerja		Jumlah	
	427752 (Rp)	427755 (Rp)		
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	4.462.024.642	387.648.887	4.849.673.529	Tagihan atas belanja pegawai yang belum menjadi SP2D
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	294.947.533	7.672.838	302.620.351	Tagihan atas belanja barang yang belum menjadi SP2D
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	5.353.014.282	-	5.353.014.282	Saldo atas kas yang masuk ke rekening bendahara namun belum diserahkan ke penerima dan pajak bendahara yang belum disetor
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	Tagihan atas belanja modal yang belum menjadi SP2D
Total	10.109.986.457	395.321.705	10.505.308.162	-

C.4.2. UTANG YANG BELUM DITAGIHKAN

*Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0*

Saldo Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo tersebut merupakan saldo atas pencatatan Surat Perintah Bayar dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan yang belum dilakukan penerbitan Surat Perintah Pembayaran.

C.4.3. HIBAH YANG BELUM DISAHKAN

*Hibah Yang Belum
Disahkan Rp0*

Saldo Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2024 merupakan saldo atas dana hibah uang yang diterima dan belum dilakukan pengesahan.

C.4.4. UANG MUKA DARI KPPN

*Uang Muka Dari
KPPN Rp0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.4.5. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp90.000*

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 bersaldo Rp90.000,00 dan Rp7.385.737,00. Utang Jangka Pendek Lainnya pada per tanggal 31 Desember 2024 merupakan saldo kas yang berasal dari pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo Utang Pajak Bendahara Yang Belum Disetor per 31 Desember 2024 sebesar Rp90.000,00 yang terdiri atas Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp90.000,00.

Tabel 29
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

No	Uraian	31-Dec-24			31-Dec-23		
		Satuan Kerja		Jumlah (Rp)	Satuan Kerja		Jumlah (Rp)
		427752 (Rp)	427755 (Rp)		427752 (Rp)	427755 (Rp)	
1	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	90.000	-	90.000	7.385.737	-	7.385.737
	Jumlah	90.000	-	90.000	7.385.737	-	7.385.737

C.5.EKUITAS

*Ekuitas
Rp30.357.872.400*

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp30.357.872.400,00 dan Rp29.667.493.089,00.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Rp69.583

D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp69.583,00. Pendapatan PNBP TA 2024 merupakan pendapatan atas bunga/giro.

Tabel 30
Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Naik/Turun (%)
Pendapatan PNBP Lainnya				
- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	69.583	792.520	(722.937)	-91%
Jumlah	69.583	792.520	(722.937)	(91%)

Beban Pegawai
Rp126.574.827.071

D.2. BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp126.574.827.071,00 dan Rp109.295.553.146,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah Beban Pegawai mengalami kenaikan dibandingkan 31 Desember 2023 dikarenakan terdapat penambahan pegawai dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024. Terdapat perbedaan saldo pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran dikarenakan terdapat jurnal balik dan jurnal penyesuaian akhir tahun 2024. Rincian Beban Pegawai untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Beban Pegawai
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	31-Dec-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%	Saldo LRA 31 Desember 2024 (Rp)	Selisih LO dan LRA (Rp)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	31.392.241.111	28.384.646.225	3.007.594.886	10,60%	31.392.241.111	-
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	524.091	413.512	110.579	26,74%	524.091	-
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.896.278.600	1.662.179.110	234.099.490	14,08%	1.896.278.600	-
511122	Beban Tunj. Anak PNS	487.709.426	421.386.834	66.322.592	15,74%	487.709.426	-
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	3.024.139.800	2.522.165.000	501.974.800	19,90%	3.024.139.800	-
511124	Beban Fungsional PNS	2.788.171.800	2.455.392.507	332.779.293	13,55%	2.788.171.800	-
511125	Beban Tunj. PPh PNS	481.791.088	245.806.566	235.984.522	96,00%	481.791.088	-
511126	Beban Tunj. Beras PNS	1.422.546.060	1.390.753.680	31.792.380	2,29%	1.422.546.060	-
511129	Beban Uang Makan PNS	3.890.153.250	3.707.888.000	182.265.250	4,92%	3.890.153.250	-
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	673.519.500	849.519.374	(175.999.874)	-20,72%	673.519.500	-
511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	249.375.000	284.375.000	(35.000.000)	-12,38%	249.375.000	-
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1.717.620.600	-	1.717.620.600	100,00%	1.717.620.600	-
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	34.618	-	34.618	100,00%	34.618	-
511621	Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	49.571.340	-	49.571.340	100,00%	49.571.340	-
511622	Beban Tunj. Anak PPPK	10.918.952	-	10.918.952	100,00%	10.918.952	-
511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	39.375.000	-	39.375.000	100,00%	39.375.000	-
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	276.756.000	-	276.756.000	100,00%	276.756.000	-
511625	Beban Tunj. Beras PPPK	62.498.460	-	62.498.460	100,00%	62.498.460	-
511628	Beban Uang Makan PPPK	226.037.000	-	226.037.000	100,00%	226.037.000	-
512211	Beban Uang Lembur	412.437.000	184.836.000	227.601.000	123,14%	412.437.000	-
512212	Beban Uang Lembur PPPK	2.611.000	-	2.611.000	100,00%	2.611.000	-
512411	Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja)	75.103.792.219	67.186.191.338	7.917.600.881	11,78%	75.331.403.418	(227.611.199)
512414	Beban Pegawai Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2.366.725.156	-	2.366.725.156	100,00%	2.173.478.791	193.246.365
Pengembalian Beban Pegawai		-	-	-	-	-	-
Jumlah		126.574.827.071	109.295.553.146	17.239.898.925	15,77%	126.609.191.905	(34.364.834)

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan
Rp4.628.434.306

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.628.434.306,00 dan Rp4.959.516.808,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Beban Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik / (Turun) (Rp)	%
593111	Beban Persediaan Konsumsi	4.112.800.074	4.378.794.744	(265.994.670)	(6,07%)
593149	Beban Persediaan Lainnya	515.634.232	580.722.064	(65.087.832)	(11,21%)
Jumlah Beban Persediaan		4.628.434.306	4.959.516.808	(331.082.502)	(6,68%)

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan
Jasa
Rp498.186.946.209

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp498.186.946.209,00 dan Rp333.704.220.483,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Kenaikan beban barang dan jasa pada TA 2024 dikarenakan adanya pengesahan hibah langsung. Terdapat perbedaan saldo pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran dikarenakan terdapat jurnal penyesuaian, pengesahan hibah langsung, dan penihilan transaksi RPATA. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%	Saldo LRA 31 Desember 2024 (Rp)	Selisih LO dan LRA (Rp)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	6.825.630.401	6.034.962.514	790.667.887	13,10%	6.837.066.201	(11.435.800)
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	32.026.630	15.783.000	16.243.630	102,92%	32.026.630	-
521115	Beban Honor Operasional Satker	899.174.000	1.613.038.000	(713.864.000)	(44,26%)	899.174.000	-
521119	Beban Barang Operasional lainnya	3.346.926.663	3.053.584.632	293.342.031	9,61%	3.346.926.663	-
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid	-	521.686.877	(521.686.877)	(100,00%)	-	-
521211	Beban Bahan	13.880.161.056	15.526.843.889	(1.646.682.833)	(10,61%)	13.880.161.056	-
521213	Beban Honor Output Kegiatan	4.577.140.774	6.897.649.868	(2.320.509.094)	(33,64%)	4.577.140.774	-
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	941.878.067	1.069.826.287	(127.948.220)	(11,96%)	941.878.067	-
521241	Beban Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi	-	11.379.720	(11.379.720)	(100,00%)	-	-
521252	Beban Peralatan dan Mesin- Ekstrakomptabel	15.893.325	86.780.750	(70.887.425)	(81,69%)	15.893.325	-
522111	Beban Langganan Listrik	4.713.208.654	4.667.311.260	45.897.394	0,98%	4.708.235.743	4.972.911
522112	Beban Langganan Telepon	66.952.055	57.815.321	9.136.734	15,80%	67.607.635	(655.580)
522113	Beban Langganan Air	70.763.040	17.608.385	53.154.655	100,00%	70.763.040	-
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8.935.593.688	6.947.577.176	1.988.016.512	28,61%	8.935.593.688	-
522131	Beban Jasa Konsultan	10.051.805.768	9.017.896.468	1.033.909.300	11,47%	10.056.085.047	(4.279.279)
522141	Beban Sewa	69.767.005.539	64.422.492.595	5.344.512.944	8,30%	70.120.359.793	(353.354.254)
522151	Beban Jasa Profesi	4.451.060.000	4.564.299.325	(113.239.325)	(2,48%)	4.451.060.000	-
522191	Beban Jasa Lainnya	369.611.726.549	209.170.660.416	160.441.066.133	76,70%	58.564.492.755	311.047.233.794
522192	Beban Jasa- Penanganan Pandemi Covid 19	-	5.924.000	(5.924.000)	(100,00%)	-	-
595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	-	1.100.000	(1.100.000)	(100,00%)	-	-
Pengembalian Beban Barang & Jasa		-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa		498.186.946.209	333.704.220.483	164.482.725.726	49,29%	187.504.464.417	310.682.481.792

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

*Beban Pemeliharaan
Rp7.005.823.699*

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.005.823.699,00 dan Rp8.135.106.582,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Terdapat perbedaan saldo pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran dikarenakan terdapat jurnal reklas pemeliharaan. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%	Saldo LRA 31 Desember 2024 (Rp)	Selisih LO dan LRA (Rp)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.745.235.173	4.099.889.644	(1.354.654.471)	(33,04%)	2.805.373.308	(60.138.135)
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.742.047.744	3.544.610.573	197.437.171	5,57%	3.742.047.744	-
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	518.540.782	490.606.365	27.934.417	5,69%	0	518.540.782
Jumlah		7.005.823.699	8.135.106.582	(1.129.282.883)	(13,88%)	6.547.421.052	458.402.647

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp142.613.040.421*

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp142.613.040.421,00 dan Rp170.987.306.946,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Terdapat perbedaan saldo pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran dikarenakan terdapat jurnal penyesuaian. Rincian beban perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)	%	Saldo LRA 31 Desember 2024	Selisih LO dan LRA
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)
524111	Beban Perjalanan Biasa	26.266.799.238	29.607.997.551	(3.341.198.313)	(11,28%)	26.270.965.238	(4.166.000)
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	974.895.000	1.098.350.500	(123.455.500)	(11,24%)	975.180.000	(285.000)
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32.808.631.917	30.666.404.188	2.142.227.729	6,99%	32.809.141.917	(510.000)
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	41.976.047.208	64.543.170.140	(22.567.122.932)	(34,96%)	41.976.928.708	(881.500)
524211	Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	16.189.094.785	11.141.131.830	5.047.962.955	45,31%	16.189.094.785	-
524219	Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	24.397.572.273	33.930.252.737	(9.532.680.464)	(28,09%)	24.397.572.273	-
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		142.613.040.421	170.987.306.946	(28.374.266.525)	(16,59%)	142.618.882.921	(5.842.500)

D.7. BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KE MASYARAKAT

*Beban Barang Untuk
Diserahkan ke
Masyarakat Rp0*

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat 31 Desember 2024 dan 31 Desember adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

D.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

*Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp10.771.184.279*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.771.184.279,00 dan Rp9.948.936.617,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.188.051.376	8.961.627.914	1.226.423.462	13,69%
Beban Penyusutan Jaringan	56.118.578	56.118.578	-	0,00%
Beban Amortisasi Software	356.861.625	737.767.375	(380.905.750)	(51,63%)
Beban Amortisasi Lisensi	-	5.259.375	(5.259.375)	(100,00%)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan	167.572.500	176.486.875	(8.914.375)	(5,05%)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	2.580.200	11.676.500	(9.096.300)	0,00%
Beban Penyusutan aset tetap lainnya	-	-	-	0,00%
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	10.771.184.279	9.948.936.617	822.247.662	8,26%

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
(Rp3.441)*

D.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar minus Rp3.441,00 dan Rp10.362,00. Saldo atas Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih terjadi atas penyesuaian atas saldo pada akun penyisihan piutang tak tertagih periode berjalan dengan periode sebelumnya. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Jenis Belanja	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang- TP/TGR	-	-	-	100,00%
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(3.441)	10.362	(13.803)	(133,21%)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(3.441)	10.362	(13.803)	(133,21%)

*Kegiatan Non
Operasional
Rp515.485.559*

D.10. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2024 sebesar Rp515.485.559,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38
Rincian Beban Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional				
- Surplus (Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar	403.120.800	(439.031.579)	842.152.379	(191,82%)
# Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	404.565.800	6.789.999	397.775.801	5858,26%
# Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1.445.000	445.821.578	(444.376.578)	100,00%
- Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	112.364.759	192.118.986	(79.754.227)	(41,51%)
# Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	112.364.759	192.118.986	(79.754.227)	(41,51%)
a. Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL	12.070.982	14.858.314	(2.787.332)	(18,76%)
b. Penerimaan kembali Belanja Barang TAYL	97.918.777	177.260.672	(79.341.895)	(44,76%)
c. Penerimaan Kembali Modal TAYL	2.375.000		2.375.000	
d. Pendapat Perolehan Aset Lainnya	-		-	-
# Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-		-	-
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	515.485.559	(246.912.593)	762.398.152	(308,77%)

Surplus dari pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2024 dikarenakan adanya pendapatan atas lelang atas barang inventaris kantor sesuai Risalah Lelang Nomor: 129/07.01/2024-01 tanggal 17 April 2024 sebesar Rp31.059.000,00. Informasi mengenai aset yang dilelang dapat dilihat di laporan pendukung pada Lampiran I. Adapun surplus (defisit) dari kegiatan Non Operasional Lainnya diperoleh dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu atas Belanja Pegawai sebesar Rp12.070.800,00, atas Belanja Barang sebesar Rp63.268.077,00, dan atas Belanja Modal sebesar Rp2.375.000,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

E.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp29.667.493.089

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp29.667.493.089,00 dan Rp17.351.852.200,00.

E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Surplus (Defisit) LO
Rp(789.264.697.402)

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah defisit sebesar Rp(789.264.697.402,00) dan (Rp637.276.771.017,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Rp0 Tidak terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH EKUITAS

Koreksi yang Menambah Ekuitas Rp926.945.600 Saldo Koreksi yang menambah ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah bersaldo Rp926.945.600,00. Adapun pada 31 Desember 2023 bersaldo minus Rp684.750,00. Saldo koreksi yang menambah ekuitas merupakan koreksi atas reklasifikasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp926.945.600,00.

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas Rp789.028.131.113 Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp789.028.131.113,00 dan Rp649.593.096.656,00. Transfer masuk merupakan transfer aset berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp0,00. Terdapat pengesahan hibah langsung sebesar Rp317.914.198.524,00. Rincian Transaksi antar Entitas s.d. 31 Desember 2024 terdiri dari:

Tabel 39
Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Jenis Beban	Nilai (Rp)
Diterima dari Entitas Lain	(848.759.521)
Ditagihkan ke Entitas Lain	471.962.692.110
Transfer Masuk	
Pengesahan Hibah Langsung	317.914.198.524
Jumlah	789.028.131.113

E.5.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan Bendahara Umum Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar (Rp848.759.521,00), sedangkan DKEL sebesar Rp471.962.692.110,00. Rincian DDEL dan DKEL per satker adalah sebagai berikut:

*Diterima dari Entitas
Lain (Rp848.759.521)*

Tabel 40
Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Jenis Beban	Nilai (Rp)
Satker 427752	(794.287.571)
Satker 427755	(54.471.950)
Jumlah	(848.759.521)

*Ditagihkan ke Entitas
Lain
Rp471.962.692.110*

Tabel 41
Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Jenis Beban	Nilai (Rp)
Satker 427752	408.970.722.440
Satker 427755	62.991.969.670
Jumlah	471.962.692.110

E.5.2. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

*Pengesahan Hibah
Langsung
Rp317.914.198.524*

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp317.914.198.524,00. Detail mengenai kegiatan pengesahan hibah langsung TA 31 Desember 2024 dapat dilihat pada poin F.3.3. Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Pengesahan Hibah

Satker	Nilai (Rp)
Satker 427752	317.914.198.524
Satker 427755	-
Jumlah	317.914.198.524

E.6. EKUITAS AKHIR

*Ekuitas Akhir
Rp30.357.872.400*

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp30.357.872.400,00 dan Rp29.667.493.089,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. REKENING PEMERINTAH

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan dua rekening untuk menampung uang keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN, yaitu:

- Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) mengelola rekening Induk pada Bank Mandiri Kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening 1030007727577, yang bersaldo sebesar Rp0,00 per tanggal 31 Desember 2024.
- Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755) mengelola rekening Induk pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening 651164277551000 yang bersaldo sebesar Rp0,00 per tanggal 31 Desember 2024.

F.2. PENGUNGKAPAN ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, TARGET, DAN REALISASI RINCIAN OUTPUT BERDASARKAN FUNGSI APBN DAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024

F.2.1 PELAPORAN ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, TARGET, DAN REALISASI RINCIAN OUTPUT TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) I dan Fungsi APBN Ekonomi 04.

Pagu Anggaran PN I Adalah Rp16.200.000.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp15.439.790.772,00. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN I dan Fungsi APBN Ekonomi 04 antara lain sebagai berikut:

Tabel 43
Program/Kegiatan dalam PN I dan Fungsi APBN Ekonomi 04

Program	Subprogram	Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Anggaran Tercapai Tahun Kebijakan	Target Volume Kebijakan	Realisasi Volume Kebijakan	Persentase Realisasi Volume Kebijakan	
Program Koordinasi Kebijakan	2518. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri	2518.001. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor	900.000.000	890.249.089	98,93%	1,00	1,00	100,00%	
		2518.002. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor	900.000.000	896.376.971	99,59%	1,00	1,00	100,00%	
		2518.003. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi	900.000.000	899.462.438	99,93%	1,00	1,00	100,00%	
	2523. Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan	2523.001. Rekomendasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan Ekspor yang Bermilai Tambah Tinggi	1.000.000.000	971.636.647	97,18%	1,00	1,00	100,00%	
		2523.002. Rekomendasi Kebijakan Perdagangan dan Peningkatan Tata Niaga Perdagangan Internasional	1.000.000.000	888.883.184	88,89%	1,00	1,00	100,00%	
	4545. Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	4545.001. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Harmonisasi Ketenagakerjaan	1.500.000.000	1.344.234.923	89,62%	1,00	1,00	100,00%	
	4550. Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Karya	4550.001. Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Karya	10.200.000.000	9.823.642.482	96,31%	1,00	1,00	100,00%	
	Total			26.000.000.000	25.408.784.718	97,73%			

F.2.2 CAPAIAN RINCIAN OUTPUT TAHUN 2024

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun 2024 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian antara lain sebagaimana disajikan pada Lampiran XIV.

F.2.3 CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) I dan Fungsi APBN Ekonomi 04.

Tabel 44
Capaian Program Prioritas Nasional Tahun 2024

Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
015.01. Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan							
2523. Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan							
2523.PB8.001 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bermilai Tambah Tinggi	1.000.000.000	971.636.647	97,18%	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%
2523.PB8.002 Rekomendasi Kebijakan Perdagangan dan Peningkatan Tata Niaga Perdagangan Internasional	1.000.000.000	888.883.184	88,89%	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%
2518. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri							
2518.PB4.001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor	900.000.000	895.184.089	99,46%	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%
2518.PB4.002 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor	700.000.000	696.376.971	99,51%	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%
2518.PB4.003 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi	900.000.000	899.462.438	99,93%	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%
4545. Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan							
4545.PB4.001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	1.500.000.000	1.344.234.923	89,62%	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%
4550. Koordinasi Kebijakan Cipta Karya							
4550.PB4.001 Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Karya	10.200.000.000	9.823.642.482	96,31%	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%

F.3. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.3.1. LELANG BARANG MILIK NEGARA

Terhadap barang inventaris yang tidak dapat digunakan kembali, telah disampaikan usulan permohonan lelang BMN kendaraan bermotor kepada Kepala KPKNL Jakarta I. Pendapatan atas lelang tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Lelang sebagai berikut:

- a. Risalah Lelang Nomor: 129/07.01/2024-01 tanggal 17 April 2024 sebesar Rp31.059.000,00;
- b. Risalah Lelang Nomor 711/07.01/2024-01 tanggal 08 November 2024 sebesar Rp21.743.800,00;
- c. Risalah Lelang Nomor 713/07.01/2024-01 tanggal 08 November 2024 sebesar Rp172.628.000,00;
- d. Risalah Lelang Nomor 743/07.01/2024-01 tanggal 19 November 2024 sebesar Rp169.490.000,00;
- e. Risalah Lelang Nomor 892/07.01/2024-01 tanggal 19 Desember 2024 sebesar Rp9.645.000,00.

F.3.2. REVISI DIPA PAGU ANGGARAN

Terdapat revisi yang dilakukan atas DIPA Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (BA.035) yaitu pada:

- Satuan Kerja 427752 (Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) melaksanakan Revisi DIPA Nomor DIPA-035.01.1.427752/2024 sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan tanggal revisi terakhir 31 Desember 2024 dengan besaran pagu sebesar Rp461.745.242.000,00.
- Satuan Kerja 427755 (Satker Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus) melaksanakan Revisi DIPA Nomor DIPA-035.01.1.427755/2024 sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan tanggal revisi terakhir 27 Desember 2024 dengan besaran pagu sebesar Rp68.985.254.000,00.

F.3.3. INFORMASI HIBAH LUAR NEGERI

Informasi mengenai Hibah Langsung tahun 2024 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

a. HIBAH PROSPERA

Hibah Jasa tersebut berdasarkan pada perjanjian hibah yang tertuang dalam Subsidiary Arrangement (SA) antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia tanggal 4 Desember 2017, dengan masa perjanjian oleh kedua belah

pihak untuk periode 1 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2023 dengan total alokasi nilai hibah sebesar AUD 145.000.000 dan teregister dengan nomor 23TSV7CA. Kegiatan hibah yang dibiayai dari pemerintah Australia dilaksanakan melalui proyek Program Kerjasama Indonesia Australia untuk Perekonomian (PROSPERA) yang dilaksanakan oleh 26 Instansi Pemerintah. Pada tanggal 27 Maret 2023 telah dilakukan pengajuan perpanjangan program kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPPR sampai dengan 28 Februari 2026 dengan alokasi nilai hibah menjadi sebesar AUD 259.000.000

Realisasi kegiatan hibah untuk tahun 2019 sebesar Rp76.836.389.526,00, untuk kegiatan Tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp141.911.292.772,00, untuk kegiatan Tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp128.058.431.254,00 dan untuk kegiatan hibah tahun 2023 sebesar Rp124.368.030.608,00. Pada Tahun 2024 telah dilakukan dua kali serah terima melalui berita acara serah terima nomor BA-1/SET.M.EKON.1/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan telah dilakukan pengesahan hibah dengan nilai sebesar Rp142.346.277.989,00, serta berita acara serah terima nomor BAST/4/SET.M.EKON.1/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 dan telah dilakukan pengesahan hibah dengan nilai sebesar Rp150.370.380.608,00.

b. Hibah KIAT

Hibah Jasa Fasilitas Kemitraan Indonesia dan Australia untuk Infrastruktur (KIAT) telah teregistrasi di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan nomor 2FR4C6KA, dengan masa perjanjian oleh kedua belah pihak untuk periode 13 Februari 2017 sampai dengan 13 September 2027 dengan alokasi pagu sebesar AUD 150.000.000. Sampai dengan Tahun 2023 telah dilakukan BAST dan pengesahan hibah dengan nilai sebesar Rp3.362.101.029,00 dari kegiatan Tahun 2017 s.d. 2023. Pada tahun 2024 telah dilakukan dua kali serah terima melalui berita acara serah terima nomor BA-3/SET.M.EKON.1/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 dan telah dilakukan pengesahan hibah dengan nilai sebesar Rp7.748.809.890,00 serta berita acara serah terima nomor BAST/05/SET.M.EKON.1/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 dan telah dilakukan pengesahan hibah dengan nilai sebesar Rp1.917.628.840,00.

c. Hibah Jutpi Phase 3

Hibah Jasa Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) Phase 3 telah teregistrasi di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Kementerian Keuangan dengan nomor register 2YT3M6QA dengan pagu sebesar JPY 418.206.000. Hibah tersebut dituangkan dalam perjanjian hibah antara Pemerintah Jepang dan Indonesia dengan periode 26 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2025. Untuk kegiatan hibah tahun 2022 dan 2023 belum ada BAST dari *budget plan* Tahun 2022 sebesar JFY 167,00 Juta dan Tahun 2023 sebesar JFY 111,00 Juta.

d. Hibah FOLUR – UNDP

Hibah FOLUR-UNDP telah teregistrasi di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dengan nomor register 2ELXFXTA dengan pagu sebesar USD 8.511.012,34. Hibah Jasa dan Uang tersebut dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan UNDP dengan periode 03 Maret 2023 s.d. 28 Februari 2028. Realisasi kegiatan hibah jasa tahun 2023 adalah sebesar Rp4.174.833.926,00 dan untuk realisasi Hibah Uang tahun 2023 adalah sebesar Rp6.677.583.142,00. Pada Tahun 2024 telah dilakukan serah terima hibah jasa melalui berita acara serah terima nomor BAST/08/SET.M.EKON.1/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 dan telah dilakukan pengesahan hibah dengan nilai sebesar Rp5.842.320.758,00.

Pada tahun 2024 Kemenko Bidang Perekonomian menerima dana Hibah Uang yang berasal dari UNDP untuk kegiatan hibah FOLUR sebesar Rp8.910.406.695,00. Atas dana tersebut, telah diajukan pengesahan hibah uang melalui KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar Rp6.487.978.208,00 dengan SP2HL nomor 07674T dan telah dilakukan pengembalian dana ke donor sebesar Rp2.422.428.487,00.

e. Hibah FOLUR – FAO

Hibah FOLUR-FAO telah teregistrasi di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dengan nomor register 2KUKEPQA dengan pagu sebesar USD 460.065,00. Hibah tersebut dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan FAO dengan periode 10 Maret 2023 s.d. 28 Februari 2028. Realisasi kegiatan hibah jasa tahun 2023 adalah sebesar Rp429.271.039,00. Pada tahun 2024 telah dilakukan serah terima hibah jasa melalui berita acara serah terima nomor BAST/07//SET.M.EKON.1/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 dan telah dilakukan pengesahan hibah dengan nilai sebesar Rp597.865.006,00.

Pada tahun 2024 Kemenko Bidang Perekonomian menerima dana Hibah Uang yang berasal dari FAO untuk kegiatan hibah FOLUR sebesar Rp201.683.475,00. Atas dana tersebut, telah diajukan pengesahan hibah uang melalui KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar Rp200.237.225,00 dengan SP2HL nomor 07677T dan telah dilakukan pengembalian dana ke donor sebesar Rp1.446.250,00.

f. Hibah TVET SYSTEM REFORM 2.0

Hibah TVET System Reform 2.0 telah teregistrasi di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dengan nomor register 2V71C36A dengan pagu sebesar EUR 4.000.000. Hibah tersebut dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Jerman dengan periode 23 Agustus 2021 s.d. 31 Maret 2025.

g. Hibah Land Value Capture - Asian Development Bank (ADB)

Hibah Land Value Capture telah teregistrasi di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dengan nomor register 2YGQ7PQA dengan pagu sebesar USD 150.000.000. Hibah tersebut dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan ADB pada tanggal 7 Juli 2023. Pada tahun 2024 telah dilakukan serah terima melalui berita acara serah terima nomor BAST-4.1/SET.M.EKON.1/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 dan telah dilakukan pengesahan hibah dengan nilai sebesar Rp2.402.700.000,00.

h. Hibah Rebana Area Development - Japan International Cooperation Agency (JICA)

Hibah Rebana Area Development telah teregistrasi di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dengan nomor register 2FLG7GNA dengan pagu sebesar JPY 132.680.000. Hibah tersebut dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan JICA pada tanggal 7 Desember 2023.

F.3.4. TRANSAKSI RESIPROKAL

Sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-3/PB/2025 tanggal 1 Januari 2025 tentang Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Kementerian/Lembaga, bahwasanya terdapat transaksi resiprokal antara Kemenko Bidang Perekonomian dengan Instansi Pemerintah Lainnya diantaranya sebagai berikut:

Tabel 45
Transaksi Resiprokal
Kemenko Bidang Perekonomian dengan Instansi Pemerintah Lainnya
Per 31 Desember 2024

No	Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Belanja	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Pendapatan
1	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	158.980.000	450417	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA	158.980.000
2	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	34.000.000	237200	BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPIMPINAN PERTANIAN (BBPMKP)	34.000.000
3	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	6.160.000	418934	PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.160.000
4	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	60.000.000	418929	PUSAT DATA, INFORMASI, DAN JASA TEKNIS KEARSIPAN	60.000.000

F.3.5. TRANSAKSI DENGAN MENGGUNAKAN MEKANISME RPATA

Pada Tahun 2024 terdapat pekerjaan belanja kontraktual yang pembayarannya menggunakan mekanisme RPATA. Rincian transaksi dengan mekanisme RPATA dapat dilihat pada Lampiran XV.

F.3.6. DAMPAK PEMBENTUKAN KABINET MERAH PUTIH

Sehubungan dengan adanya pembentukan Kabinet Merah Putih sesuai Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, terdapat beberapa penyesuaian tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang menyebabkan adanya perubahan/pemisahan/penggabungan Kementerian/Lembaga. Berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-179/PB/2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan salah satu K/L yang mengalami pemisahan, yakni menjadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dasar hukum pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah Perpres 143 Tahun 2024. Untuk menyesuaikan tugas dan fungsi sesuai dengan perpres tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan Permenko Nomor 15 TA 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-381/MK.2/2024, Kemenko Bidang Perekonomian menjadi K/L Pengampu bagi Kemenko Bidang Pangan. Rincian realisasi belanja pada DIPA Kemenko Bidang Perekonomian yang digunakan untuk dukungan Kemenko Bidang Pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Realisasi Belanja pada DIPA Kemenko Perekonomian yang Digunakan untuk dukungan
Kemenko Bidang Pangan Per 31 Desember 2024

No	Kode/Urutan Eselon I	Jenis Belanja	Penggunaan Anggaran untuk K/I Hasil Pemisahan		Keterangan
			Operasional Menteri/Wakil Menteri/Pimpinan Lembaga	Program/Kegiatan yang Relevan	
1	Kemenko Bidang Pangan	52	3.390.776.536	1.801.803.598	Digunakan untuk Dukungan Kegiatan Kemenko Bidang Pangan

F.3.7. INFORMASI TUNTUTAN HUKUM

Terdapat informasi tuntutan hukum atas perkara nomor 451/PK/PDT/2019 dengan pokok gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh penyelenggara negara dalam hal pelaksanaan ganti rugi harta benada materiil dan immateriil pasca kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999. Terkait dengan progres penyelesaian perkara tersebut, saat ini masih dalam proses perhitungan alokasi ganti rugi oleh Tim Panel yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial dan belum ada perkembangan lanjutan mengenai informasi posisi terakhir atas tindak lanjut putusan pengadilan dimaksud antara lain terkait dengan informasi posisi terakhir atas tindak lanjut pengadilan dimaksud termasuk atas penganggaran dan nilai tertanggungnya.

F.3.8. PEMBAYARAN GAJI POKOK PEGAWAI PINDAH INSTANSI YANG MASIH DITANGGUNG OLEH KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN

Terdapat pembayaran gaji atas nama AKM yang berdasarkan SK BKN Nomor 00002/KEP/CU/23500/2024 tanggal 18 Januari 2024 terhitung mulai 1 Februari 2024 ditetapkan bahwa pegawai yang bersangkutan dipindahkan ke atau dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Jawa Timur. Pembayaran gaji tersebut dilakukan sampai dengan Desember 2024, dan berakhir di Desember 2024 setelah terbitnya SKPP Nomor 000032/KU.01.01/SET.M.EKON/SKPP/2024 tanggal 2 Desember 2024. Pembayaran gaji tersebut mempertimbangkan Pergub Jatim Nomor 52 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pembayaran gaji masih ditanggung instansi lama (Kemenko Bidang Perekonomian).

LAMPIRAN PENDUKUNG

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Ade Yoska, S.E
NIP 19890808 201502 1 004

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 129/07.01/2024-01

—Pada hari ini Rabu tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (17-04-2024), dimulai pukul sepuluh lebih tiga puluh menit (10:30) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: —

----- Ade Yoska, Sarjana Ekonomi, NIP 19890808 201502 1 004 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 121/KM.06/2019 tanggal 15 Mei 2019, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-459/KNL.0701/2024 tanggal 26 Maret 2024 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di KPKNL Jakarta I, Jln. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta.. -----

—Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Susiwijono Sekretaris Kementerian Koordinator Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor BM.3.11/1013/SES.M.EKON/09/2023 tanggal 20 November 2023, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-676/KNL.0701/2024 tanggal 25 Maret 2024 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor B/BM.03.11/193/SES.M.EKON/08/2023 Tanggal 23 Agustus 2023. -----

—Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Rangga Septiana berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor SK Nomor 7/2023 Tanggal 16 Januari 2023 dan B/BM.03.11/89/SET.M.EKON.4/04/2024 Tanggal 16 April 2024 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Jakarta I. -----

—Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
Set. Kemenkoordinator bid Perekonomian : 1 (satu) Paket Barang Inventaris Kantor Kondisi Rusak Berat di Kota Jakarta Pusat -----
Nilai Limit : Rp30.059.000,00 (tiga puluh juta lima puluh sembilan ribu rupiah) -----
Barang bergerak tersebut saat ini berada di Jakarta Pusat. -----
dilelang apa adanya. -----

—Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran Nomor : BM.03.11/5/SET.M.EKON.4/04/2024 tanggal 05 April 2024. -----

—Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

—Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

—Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

—Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai

berikut:../Lembar Kedua

Ttd.

Ade Yoska, S.E
NIP 19890808 201502 1 004

berikut: -----

- a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----
- b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----
- c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

- a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----
- b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----
- c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

-----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

-----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan

Ttd.

Ade Yoska, S.E
NIP 19890808 201502 1 004

Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----

2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----

2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----

2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Dalam hal.../Lembar Keempat

Ttd.

Ade Yoska, S.E
NIP 19890808 201502 1 004

- Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
- Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----
- Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----
- Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----
- Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----
- Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----
- Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----
- Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----
- Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----
- Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----
- Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----
- Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 129/07.01/2024-01 tanggal 17 April 2024

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp31.059.000,00 (tiga puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 15 (lima belas) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Rangga Septiana

Ade Yoska, S.E
NIP 19890808 201502 1 004

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya
Tanggal: 24 APR 2024
Kepala KPKNL Jakarta I


Warsudin
NIP 19660812 199103 1 003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I

JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA 10410
TELEPON : (021) 34835237 ; FAKSIMILE : (021) 34835131 ; SITUS : www.djkn.kemenkeu.go.id

RINCIAN PENGELUARAN UANG PEMBAYARAN LELANG
KEPADA YANG BERHAK

Nomor Risalah Lelang : 129/07.01/2024-01
Tanggal Lelang : 17 April 2024
Pejabat Lelang : Ade Yoska

1 Pokok Lelang	Rp.	31.059.000,00
2 Hasil Bersih Lelang Untuk Pemohon Lelang	Rp.	31.059.000,00
3 Bea Lelang		
a. Bea Lelang Pembeli	Rp.	621.180,00
b. Bea Lelang Penjual	Rp.	-
c. Bea Lelang Batal	Rp.	-
4 Pph Final	Rp.	-
5 Uang Jaminan Penawaran Lelang Pembeli Wanprestasi	Rp.	-

Jumlah Rp. 31.680.180,00

(tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah)

Mengetahui,
Plh. Kepala Seksi Hukum dan Informasi



Jakarta, 18 April 2024
Bendahara Penerimaan

Putu Eka Riniawan
NIP 199506122018011005



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA 10410
TELEPON : (021) 34835237 ; FAKSIMILE : (021) 34835131 ; SITUS : www.dikn.kemenkeu.go.id

KUITANSI

NOMOR : 097 /KW/2024

Risalah Lelang Nomor : 129/07.01/2024-01 tanggal 17 April 2024

Sudah Terima dari : Ahmad Musayer
Alamat JL. A GG VII No.35, RT.014, RW.006, Kel/Desa Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Prov DKI Jakarta

Banyaknya Uang : Rp31.680.180,00
(tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah)

Keterangan : Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang atas permintaan Sekretariat Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pejabat Lelang Ade Yoska, berupa 1 (satu) Paket Barang Inventaris Kantor Kondisi Rusak Berat di Kota Jakarta Pusat

RINCIAN :

- Harga Pokok Lelang	Rp.	31.059.000,00
- Bea Lelang Pembeli	Rp.	621.180,00
Jumlah	Rp.	31.680.180,00

Mengetahui,
Kepala Seksi Hukum dan Informasi



Jakarta, 17 April 2024
Bendahara Penerimaan

Putu Eka Piriawan
NIP 199506122018011005



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240418513313
Tanggal Billing	: 18-04-2024 10:18:58
Tanggal Kedaluwarsa	: 25-04-2024 10:18:58
Tanggal Bayar	: 18-04-2024 11:35:31
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	: 035 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Eselon I	: 01 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Satuan Kerja	: 427752 - MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Total Disetor	: 31.059.000 (IDR)
Terbilang	: Tiga Puluh Satu Juta Lima Puluh Sembilan Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000032049
NTPN	: CF10C55DF99AE8D1

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Kode Akun	: 425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Jumlah Setoran	: 31.059.000 (IDR)
Keterangan	: HBL RL-129/07.01/2024-01 17.04.2024



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240418510468
Tanggal Billing	: 18-04-2024 10:11:29
Tanggal Kedaluwarsa	: 25-04-2024 10:11:29
Tanggal Bayar	: 18-04-2024 11:35:30
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 537721 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
Total Disetor	: 621.180 (IDR)
Terbilang	: Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000027992
NTPN	: 3C8C10NA04DCD5K4

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	: 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 621.180 (IDR)
Keterangan	: RL-129/07.01/2024-01

Ttd.

Rachman Sucipto, S.E., M.M.
NIP 19850724 201012 1 006

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 711/07.01/2024-01

-----Pada hari ini Jumat tanggal delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh empat (08-11-2024), dimulai pukul empat belas (14:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

Rachman Sucipto, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, NIP 19850724 201012 1 006 -----

Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 02/KM.6/UP.11/2013 tanggal 08 April 2013, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-1794/KNL.0701/2024 tanggal 30 Oktober 2024 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10 DKI Jakarta. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Susiwiwono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor KEK/271.3/SES.M.EKON/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-2907/KNL.0701/2024 tanggal 25 Oktober 2024 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor B/BM.03.11/245.1/SES.M.EKON/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----

Noviar Iskandar, S.E., M.Si. untuk dan atas nama berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor BM.03.11/3.3/SES.M.EKON/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Jakarta I. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----

1 (satu) paket BMN berupa peralatan mesin dan inventaris kantor dalam kondisi rusak berat -----

Nilai Limit : Rp15.243.800,00 (lima belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Gedung MNC Tower, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 Jakarta Pusat. -----

dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 31 Oktober 2024. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah

menunjukkan identitas.../Lembar Kedua

menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----
 - b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----
 - c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----
 - b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----
 - c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
- Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----
 1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----
 2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----
 - Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----
 1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----
 2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----
 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
 - Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --
 1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----
 2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----
 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta

Ttd.

Rachman Sucipto, S.E., M.M.
NIP 19850724 201012 1 006

lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh

saya Pejabat.../Lembar Keempat

Ttd.

Rachman Sucipto, S.E., M.M.
NIP 19850724 201012 1 006

saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----

-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun

uang pembelian.../Lembar Kelima

Ttd.

Rachman Sucipto, S.E., M.M.
NIP 19850724 201012 1 006

uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Jakarta I. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah enam penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1 (satu) paket BMN berupa peralatan mesin dan inventaris kantor dalam kondisi rusak berat -----

Harga Lelang ----- : Rp21.743.800,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) -----

Pembeli ----- : Septia Karmili, NIK 3303055109940001, Wiraswasta,
----- beralamat di Bancar RT/RW.001/004 Kelurahan/Desa
----- Bancar Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga
----- Provinsi Jawa Tengah -----

Banyaknya barang.../Lembar Terakhir

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/terjual: Rp21.743.800,00 (dua puluh satu juta
tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 18 (delapan belas) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Noviar Iskandar, S.E., M.Si.

Rachman Sucipto, S.E., M.M.
NIP 19850724 201012 1 006

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

Tanggal: 13 NOV 2024
Kepala KPKNL Jakarta I



Edy Purnomo
NIP 19710410 199703 1 003



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I**

JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA 10410
TELEPON : (021) 34835237 ; FAKSIMILE : (021) 34835131 ; SITUS : www.djkn.kemenkeu.go.id

**RINCIAN PENGELUARAN UANG PEMBAYARAN LELANG
KEPADA YANG BERHAK**

Nomor Risalah Lelang : 711/07.01/2024-01
Tanggal Lelang : 8 November 2024
Pejabat Lelang : Rachman Sucipto

1 Pokok Lelang	Rp.	21.743.800,00
2 Hasil Bersih Lelang Untuk Pemohon Lelang	Rp.	21.743.800,00
3 Bea Lelang		
a. Bea Lelang Pembeli	Rp.	434.876,00
b. Bea Lelang Penjual	Rp.	-
c. Bea Lelang Batal	Rp.	-
4 Pph Final	Rp.	-
5 Uang Jaminan Penawaran Lelang Pembeli Wanprestasi	Rp.	-

Jumlah **Rp. 22.178.676,00**

(dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah)

Mengetahui,
Kepala Seksi Hukum dan Informasi



Jakarta, 19 November 2024
Bendahara Penerimaan

Putu Eka Piliawan
NIP 199506122018011005



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA 10410
TELEPON : (021) 34835237 ; FAKSIMILE : (021) 34835131 ; SITUS : www.djkn.kemenkeu.go.id

KUITANSI

NOMOR : 436 /KW/2024

Risalah Lelang Nomor : 711/07.01/2024-01 tanggal 8 November 2024

Sudah Terima dari : Septia Karmili
Alamat Bancar, RT.001, RW.004, Kel/Desa Bancar, Kec. Purbalingga, Kab.
Purbalingga, Prov. Jawa Tengah

Banyaknya Uang : Rp22.178.676,00
(dua puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam
rupiah)

Keterangan : Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang atas permintaan Sekretariat Jenderal,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pejabat Lelang Rachman Sucipto,
berupa 1 (satu) paket BMN berupa peralatan mesin dan inventaris kantor dalam kondisi
rusak berat

RINCIAN :

- Harga Pokok Lelang	Rp.	21.743.800,00
- Bea Lelang Pembeli	Rp.	434.876,00
Jumlah	Rp.	22.178.676,00

Mengetahui,
Kepala Seksi Hukum dan Informasi



Agus Yulianto
NIP 197601211996031001

Jakarta, 12 November 2024
Bendahara Penerimaan

Ratu Eka Piriawan
NIP 199506122018011005



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820241112458971
Tanggal Billing	: 12-11-2024 13:28:52
Tanggal Kedaluwarsa	: 19-11-2024 13:28:52
Tanggal Bayar	: 12-11-2024 14:21:00
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	: 035 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Eselon I	: 01 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Satuan Kerja	: 427752 - MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Total Disetor	: 21.743.800 (IDR)
Terbilang	: Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 666277021588
NTPN	: 3906C2G4VQ6R0PMR

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Kode Akun	: 425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Jumlah Setoran	: 21.743.800 (IDR)
Keterangan	: HBL RL-711/07.01/2024-01 08.11.24



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820241112459403
Tanggal Billing	: 12-11-2024 13:26:18
Tanggal Kedaluwarsa	: 19-11-2024 13:26:18
Tanggal Bayar	: 12-11-2024 14:20:59
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 537721 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
Total Disetor	: 434.876 (IDR)
Terbilang	: <i>Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 183385021245
NTPN	: 0DCD448VVFBJQQ4B

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	: 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 434.876 (IDR)
Keterangan	: RL-711/07.01/2024-01

Ttd.

Rachman Sucipto, S.E., M.M.
NIP 19850724 201012 1 006

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 713/07.01/2024-01

-----Pada hari ini Jumat tanggal delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh empat (08-11-2024), dimulai pukul empat belas lebih sepuluh menit (14:10) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----
Rachman Sucipto, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, NIP 19850724 201012 1

006 -----

Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 02/KM.6/UP.11/2013 tanggal 08 April 2013, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-1793/KNL.0701/2024 tanggal 30 Oktober 2024 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10 DKI Jakarta. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor KEK/271.2/SES.M.EKON/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-2909/KNL.0701/2024 tanggal 25 Oktober 2024 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-152/MK.6/KNL.0701/2024 tanggal 17 Juli 2024. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----

Noviar Iskandar, S.E., M.Si. untuk dan atas nama berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor BM.03.11/3.3/SES.M.EKON/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 melaksanakan penjualan lelang dengan perantaraan KPKNL Jakarta I. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----

1. 1 (satu) unit Mobil Nissan X-TRAIL 2.0 2WD M/T No Rangka MHBFB2CG3FBJ005078 No Mesin MR20011852R Tahun 2011 No. Polisi B 1498 PQQ Kondisi Rusak Berat Warna Hitam -----

Nilai Limit : Rp80.692.000,00 (delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Gedung MNC Tower, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 Jakarta Pusat. -----

2. 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina XV A/T No Rangka MHBG1CG1ABJ056475 No Mesin HR15975973A Tahun 2011 No. Polisi B 1496 PQQ Kondisi Rusak Berat Warna Abu abu metalik -----

Nilai Limit : Rp45.629.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Gedung MNC Tower, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 Jakarta Pusat. -----

3. 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina XV A/T No Rangka MHBG1CG1ABJ058006 No Mesin HR15976279A Tahun 2011 No. Polisi B 1497 PQQ Kondisi Rusak Berat Warna Abu abu metalik -----

Nilai Limit : Rp47.370.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu

rupiah).../Lembar Kedua

rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Gedung MNC Tower, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 Jakarta Pusat. -----

4. 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina XV A/T No Rangka MHBG10G1ABJ058007 No Mesin HR15976271A Tahun 2011 No. Polisi B 1499 PQQ Kondisi Rusak Berat Warna Abu abu metalik -----

Nilai Limit : Rp45.629.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Gedung MNC Tower, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 Jakarta Pusat. -----

5. 1 (satu) unit Server dengan kondisi Rusak Berat -----

Nilai Limit : Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Gedung MNC Tower, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 Jakarta Pusat. -----

dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Surat Kabar Harian Koran Jakarta tanggal 31 Oktober 2024. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

-----Penawaran lelang.../Lembar Ketiga

-----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

-----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----

2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawar

Ttd.

Rachman Sucipto, S.E., M.M.
NIP 19850724 201012 1 006

tertinggi yang sama tersebut. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota klining, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----

-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan

lelang yang.../Lembar Kelima

Ttd.

Rachman Sucipto, S.E., M.M.
NIP 19850724 201012 1 006

lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Jakarta I. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa.../Lembar Keenam

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah dua puluh tiga penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1. 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina XV A/T No Rangka
MHBG1CG1ABJ056475 No Mesin HR15975973A Tahun 2011 No. Polisi B 1496
PQO Kondisi Rusak Berat Warna Abu abu metalik -----

Harga Lelang ----- : Rp53.629.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus dua
puluh sembilan ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : H. Abdul Chamid, NIK 3402121407570004, Wiraswasta,
beralamat di Jogoragan RT/RW.006/- Kelurahan/Desa
Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta -----

2. 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina XV A/T No Rangka
MHBG1CG1ABJ058006 No Mesin HR15976279A Tahun 2011 No. Polisi B 1497
PQO Kondisi Rusak Berat Warna Abu abu metalik -----

Harga Lelang ----- : Rp61.370.000,00 (enam puluh satu juta tiga ratus tujuh
puluh ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : Supardi, Haji, NIK 3321012406560002, Pedagang,
beralamat di Brumbung RT/RW.011/001 Kelurahan/Desa
Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
Provinsi Jawa Tengah -----

3. 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina XV A/T No Rangka
MHBG10G1ABJ058007 No Mesin HR15976271A Tahun 2011 No. Polisi B 1499
PQO Kondisi Rusak Berat Warna Abu abu metalik -----

Harga Lelang ----- : Rp57.629.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus dua
puluh sembilan ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : Supardi, Haji, NIK 3321012406560002, Pedagang,
beralamat di Brumbung RT/RW.011/001 Kelurahan/Desa
Brumbung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
Provinsi Jawa Tengah -----

4. 1 (satu) unit Server dengan kondisi Rusak Berat -----

Harga Lelang ----- : Rp2.314.000,00 (dua juta tiga ratus empat belas ribu
rupiah) -----

Pembeli ----- : Ahmad Nadi, NIK 3528050311980003, Petani/Pekebun,
beralamat di Dsn Danglebar RT/RW.000/000
Kelurahan/Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten
Pamekasan Provinsi Jawa Timur -----

Barang yang tidak terjual/ditahan: -----
1 (satu) unit Mobil Nissan X-TRAIL 2.0 2WD M/T No Rangka
MHBF2CG3FBJ005078 No Mesin MR20011852R Tahun 2011 No. Polisi B 1498
PQO Kondisi Rusak Berat Warna Hitam -----

Banyaknya barang yang dilelang: 5 (lima) -----
 Banyaknya barang yang laku/terjual: 4 (empat) -----
 Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp174.942.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) -----
 Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp80.692.000,00 (delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) -----
 Jumlah harga barang yang ditahan: -----
 Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 19 (sembilan belas) -----
 Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Noviar Iskandar, S.E., M.Si.

Rachman Sucipto, S.E., M.M.
 NIP 19850724 201012 1 006

CATATAN:

Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara Ahmad Nadi NIK 3528050311980003 alamat Jalan Dsn Danglebar RT/RW.000/000 Kelurahan/Desa Panaguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, dibatalkan penunjukan pemenangnya karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak melunasi kewajiban pembayaran harga lelang. -----

Jakarta, 18 November 2024

Pejabat Lelang

Ttd.

Rachman Sucipto, S.E., M.M.

NIP 19850724 201012 1 006

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

Tanggal: 18 NOV 2024
 Kepala BKNL Jakarta I



Edy Purnomo
 NIP 19710410 199703 1 003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I

JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA 10410
TELEPON : (021) 34835237 ; FAKSIMILE : (021) 34835131 ; SITUS : www.djkn.kemenkeu.go.id

RINCIAN PENGELUARAN UANG PEMBAYARAN LELANG
KEPADA YANG BERHAK

Nomor Risalah Lelang : 713/07.01/2024-01
Tanggal Lelang : 8 November 2024
Pejabat Lelang : Rachman Sucipto

1 Pokok Lelang	Rp.	172.628.000,00
2 Hasil Bersih Lelang Untuk Pemohon Lelang	Rp.	172.628.000,00
3 Bea Lelang		
a. Bea Lelang Pembeli	Rp.	3.452.560,00
b. Bea Lelang Penjual	Rp.	-
c. Bea Lelang Batal	Rp.	-
4 Pph Final	Rp.	-
5 Uang Jaminan Penawaran Lelang Pembeli Wanprestasi	Rp.	137.000,00

Jumlah **Rp. 176.217.560,00**

(seratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Mengetahui,
Kepala Seksi Hukum dan Informasi



Agus Yulianto
NIP-197601211996031001

Jakarta, 19 November 2024
Bendahara Penerimaan

Putu Eka Firdiawan
NIP 199506122018011005

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA 10410
TELEPON : (021) 34835237 ; FAKSIMILE : (021) 34835131 ; SITUS : www.djkn.kemenkeu.go.id

KUITANSI

NOMOR : 433 /KW/2024

Risalah Lelang Nomor : 713/07.01/2024-01 tanggal 8 November 2024

Sudah Terima dari : H. Abdul Chamid
Alamat Jogoragan, RT.006, Kel/Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul,
Prov DI Yogyakarta

Banyaknya Uang : Rp54.701.580,00
(lima puluh empat juta tujuh ratus satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

Keterangan : Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang atas permintaan Sekretariat Jenderal,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pejabat Lelang Rachman Sucipto,
berupa Lot 1 : 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina XV A/T Th 2011 Nopol B 1496
PQO di Kota Jakarta Pusat (kode lot : JRAXH7)

RINCIAN :

- Harga Pokok Lelang	Rp.	53.629.000,00
- Bea Lelang Pembeli	Rp.	1.072.580,00
Jumlah	Rp.	54.701.580,00

Mengetahui,
Kepala Seksi Hukum dan Informasi



Agus Yulianto
NIP 197601211996031001

Jakarta, 11 November 2024
Bendahara Penerimaan

Putu Eka Piriawan
NIP 199506122018011005

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA 10410
TELEPON : (021) 34835237 ; FAKSIMILE : (021) 34835131 ; SITUS : www.djkn.kemenkeu.go.id

KUITANSI

NOMOR : 426 /KW/2024

Risalah Lelang Nomor : 713/07.01/2024-01 tanggal 8 November 2024

Sudah Terima dari : Supardi, Haji
Alamat Brumbung, RT.011, RW.001, Kel/Desa Brumbung, Kec. Mranggen, Kab.
Demak, Prov. Jawa Tengah

Banyaknya Uang : Rp62.597.400,00
(enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

Keterangan : Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang atas permintaan Sekretariat Jenderal,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pejabat Lelang Rachman Sucipto,
berupa Lot 3 : 1 (satu) Unit Mobil Nissan Grand Livina XV A/T Th 2011 Nopol B 1497
PQO di Kota Jakarta Pusat (kode lot: KEUIC0)

RINCIAN :

- Harga Pokok Lelang	Rp.	61.370.000,00
- Bea Lelang Pembeli	Rp.	1.227.400,00
Jumlah	Rp.	62.597.400,00

Mengetahui,
Kepala Seksi Hukum dan Informasi



Agus Yulianto
NIP 197601211996031001

Jakarta, 11 November 2024
Bendahara Penitikan


Putu Eka Priawan
NIP 199506122018011005

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA 10410
TELEPON : (021) 34835237 ; FAKSIMILE : (021) 34835131 ; SITUS : www.djkn.kemenkeu.go.id

KUITANSI

NOMOR : 427 /KW/2024

Risalah Lelang Nomor : 713/07.01/2024-01 tanggal 8 November 2024

Sudah Terima dari : Supardi, Haji
Alamat Brumbung, RT.011, RW.001, Kel/Desa Brumbung, Kec. Mranggen, Kab.
Demak, Prov. Jawa Tengah

Banyaknya Uang : Rp58.781.580,00
(lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh
rupiah)

Keterangan : Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang atas permintaan Sekretariat Jenderal,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pejabat Lelang Rachman Sucipto,
berupa Lot 4 : 1 (satu) Unit Mobil Nissan Grand Livina XV A/T Th 2011 Nopol B 1499
PQO di Kota Jakarta Pusat (kode lot: 4TPZZD)

RINCIAN :

- Harga Pokok Lelang	Rp.	57.629.000,00
- Bea Lelang Pembeli	Rp.	1.152.580,00
Jumlah	Rp.	58.781.580,00

Mengetahui,
Kepala Seksi Hukum dan Informasi



Agus Yulianto
NIP 197601211996031001

Jakarta, 11 November 2024
Bendahara Penyerahan

Putu Eka Pirlawan
NIP 199506122018011005



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820241118275791
Tanggal Billing	: 18-11-2024 09:46:40
Tanggal Kedaluwarsa	: 25-11-2024 09:46:40
Tanggal Bayar	: 18-11-2024 12:21:34
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	: 035 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Eselon I	: 01 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Satuan Kerja	: 427752 - MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Total Disetor	: 172.628.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 445823369369
NTPN	: 2342A1JNFKVKK5A6F

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Kode Akun	: 425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Jumlah Setoran	: 172.628.000 (IDR)
Keterangan	: HBL RL-713/07.01/2024-01 08.11.24



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820241118273239
Tanggal Billing : 18-11-2024 09:33:45
Tanggal Kedaluwarsa : 25-11-2024 09:33:45
Tanggal Bayar : 18-11-2024 12:21:31
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga : 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I : 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja : 537721 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
Total Disetor : 3.452.560 (IDR)
Terbilang : Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 790614368664
NTPN : 613C47QLUPLB07MN

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli -
3.Lelang Nonsekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun : 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran : 3.452.560 (IDR)
Keterangan : RL-713/07.01/2024-01



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

ata Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820241118275511
Tanggal Billing	: 18-11-2024 09:44:07
Tanggal Kedaluwarsa	: 25-11-2024 09:44:07
Tanggal Bayar	: 18-11-2024 12:21:33
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 537721 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
Total Disetor	: 137.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 432812368985
NTPN	: 9D2C62G4VQ7019TN

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - E.Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli yang Wanprestasi - 1.Lelang Eksekusi dan Noneksekusi Wajib
Kode Akun	: 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 137.000 (IDR)
Keterangan	: Wanprestasi RL-713/07.01/2024-01 08.11.24 Lot 5 a.n. Ahmad Nadi

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Agung Purwoko, SH
NIP 19760124 199703 1 001

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 743/07.01/2024-01

-----Pada hari ini Selasa tanggal sembilan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh empat (19-11-2024), dimulai pukul empat belas (14:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- Agung Purwoko, Sarjana Hukum, NIP 19760124 199703 1 001 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1437/KM.1/UP.11/2021 tanggal 02 Desember 2021, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-1907/KNL.0701/2024 tanggal 13 November 2024 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di KPKNL Jakarta I, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Suswijono, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor B/MB.03.09/310/SES.M.EKON/11/2024 tanggal 08 November 2024, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-3104/KNL.0701/2024 tanggal 08 November 2024 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-226/MK.6/KNL.0701/2024 Tanggal 19 September 2024. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Rangga Septiana berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor BM.03.09/1177/SET.M.EKON.4/11/2024 tanggal 18 November 2024 melaksanakan penjualan lelang dengan perantaraan KPKNL Jakarta I. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
1 (satu) paket bongkaran (scrap) Elevator Lift dan server dalam kondisi rusak berat atas nama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia terletak di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat -----
Nilai Limit : Rp9.953.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
Barang bergerak tersebut saat ini berada di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat. -----

dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 11 November 2024. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

Pejabat Lelang

Ttd.

Agung Purwoko, SH

NIP 19760124 199703 1 001

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----
 - b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----
 - c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----
 - b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----
 - c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
- Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----
 1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----
 2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----
 1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----
 2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----
3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --
 1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----
 2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----
3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
- Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran

tertinggi secara.../Lembar Ketiga

Pejabat Lelang

Ttd.

Agung Purwoko, SH

NIP 19760124 199703 1 001

tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pejabat Lelang

Ttd.

Agung Purwoko, SH
NIP 19760124 199703 1 001

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----
-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----
-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ----
-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----
-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----
-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----
-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----
-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----
-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----
-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----
-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----
-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran

Pejabat Lelang

Ttd.

Agung Purwoko, SH
NIP 19760124 199703 1 001

keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Jakarta I. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah sembilan belas penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1 (satu) paket bongkaran (scrap) Elevator Lift dan server dalam kondisi rusak berat atas nama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia terletak di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat -----

Harga Lelang ----- : Rp169.490.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : Abdul Manan, NIK 3527051011930008, Karyawan Swasta, bertempat di Dsn Danglebar, Kel/Desa Badung, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur -----

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 743/07.01/2024-01 tanggal 19 November 2024

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp169.490.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 10 (sepuluh) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Rangga Septiana

Agung Purwoko, SH
NIP 19760124 199703 1 001

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya
Tanggal: 21 NOV 2024
Kepala KPKNL Jakarta I



Rofli Fidi Purnomo
NIP 19710410 199703 1 003



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I**

JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA 10410
TELEPON : (021) 34835237 ; FAKSIMILE : (021) 34835131 ; SITUS : www.djkn.kemenkeu.go.id

**RINCIAN PENGELUARAN UANG PEMBAYARAN LELANG
KEPADA YANG BERHAK**

Nomor Risalah Lelang : 743/07.01/2024-01
Tanggal Lelang : 19 November 2024
Pejabat Lelang : Agung Purwoko

1 Pokok Lelang	Rp.	169.490.000,00
2 Hasil Bersih Lelang Untuk Pemohon Lelang	Rp.	169.490.000,00
3 Bea Lelang		
a. Bea Lelang Pembeli	Rp.	3.389.800,00
b. Bea Lelang Penjual	Rp.	-
c. Bea Lelang Batal	Rp.	-
4 Pph Final	Rp.	-
5 Uang Jaminan Penawaran Lelang Pembeli Wanprestasi	Rp.	-

Jumlah Rp. 172.879.800,00

(seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)

Mengetahui,
Kepala Seksi Hukum dan Informasi



Jakarta, 22 November 2024
Bendahara Penerimaan

Putu Eka Pirlawan
NIP 199506122018011005



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I

JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA 10410
TELEPON : (021) 34835237 ; FAKSIMILE : (021) 34835131 ; SITUS : www.djkn.kemenkeu.go.id

KUITANSI

NOMOR : 451 /KW/2024

Risalah Lelang Nomor : 743/07.01/2024-01 tanggal 19 November 2024

Sudah Terima dari : Abdul Manan
Alamat Dsn. Danglebar, Kel/Desa Badung, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur

Banyaknya Uang : Rp172.879.800,00
(seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)

Keterangan : Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang atas permintaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pejabat Lelang Agung Purwoko, berupa 1 (satu) Paket bongkaran scrap elevator lift dan server dalam kondisi rusak berat di Jakarta Pusat

RINCIAN :

- Harga Pokok Lelang	Rp.	169.490.000,00
- Bea Lelang Pembeli	Rp.	3.389.800,00
Jumlah	Rp.	172.879.800,00

Mengetahui,
Kepala Seksi Hukum dan Informasi



Jakarta, 21 November 2024
Bendahara Penerimaan

Putu Eka Piriawan
NIP 199506122018011005



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820241121965155
Tanggal Billing	: 21-11-2024 12:35:27
Tanggal Kedaluwarsa	: 28-11-2024 12:35:27
Tanggal Bayar	: 21-11-2024 17:02:01
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	: 035 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Eselon I	: 01 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Satuan Kerja	: 427752 - MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Total Disetor	: 169.490.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 740929675048
NTPN	: F060661QV4GLMT33

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Kode Akun	: 425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Jumlah Setoran	: 169.490.000 (IDR)
Keterangan	: HBL RL-743/07.01/2024-01 19.11.24



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820241121963306
Tanggal Billing	: 21-11-2024 12:26:53
Tanggal Kedaluwarsa	: 28-11-2024 12:26:53
Tanggal Bayar	: 21-11-2024 17:02:01
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 537721 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
Total Disetor	: 3.389.800 (IDR)
Terbilang	: <i>Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 465183667846
NTPN	: D899D7QLUPLEGR9A

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	: 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 3.389.800 (IDR)
Keterangan	: RL-743/07.01/2024-01

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Agung Purwoko, SH
NIP 19760124 199703 1 001

SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor 892/07.01/2024-01

-----Pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (19-12-2024), dimulai pukul sepuluh lebih dua puluh menit (10:20) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- Agung Purwoko, Sarjana Hukum, NIP 19760124 199703 1 001 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1437/KM.1/UP.11/2021 tanggal 02 Desember 2021, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-2157/KNL.0701/2024 tanggal 12 Desember 2024 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di KPKNL Jakarta I, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Susiwijiono, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian R.I., berkedudukan di Jakarta, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor B/BM.03.11/308.1/SES.M.EKON/11/2024 tanggal 07 November 2024, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-3512/KNL.0701/2024 tanggal 09 Desember 2024 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-226/MK.6/KNL.0701/2024 Tanggal 19 September 2024. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Rangga Septiana berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor BM.03.09/1177/SET.M.EKON.4/11/2024 tanggal 18 November 2024 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Jakarta I. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 125 TD Nomor Polisi : B 6809 PRQ -----
Tahun : 2011 Warna : HITAM Nomor Rangka : MH1J881158K745493 Nomor Mesin : J88JE1741487 Lokasi : Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Sawah Besar, Jakarta Pusat dalam kondisi rusak berat. -----

Nilai Limit : Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) -----
Barang bergerak tersebut saat ini berada di Areal Kantor Kmeneterian Koordinator Bidang Perkenomoian, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, 10470. -----

2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda New Mega Pro 150cc GL 15AIRRMT Nomor Polisi : B 6400 PTQ Tahun : 2012 Warna : Merah Hitam Nomor Rangka : MH1KC3111CK255476 Nomor Mesin : KC31E1255295 Lokasi : Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Sawah Besar, Jakarta Pusat dalam Kondisi Rusak Berat. -
Nilai Limit : Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) -----
Barang bergerak tersebut saat ini berada di Areal Kantor Kmeneterian Koordinator Bidang Perkenomoian, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, 10470. -----

dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 13 Desember 2024. -----

-----Hasil bersih.../Lembar Kedua

Lembar kedua dari Risalah Lelang Nomor : 892/07.01/2024-01 tanggal 19 Desember 2024

Pejabat Lelang

Ttd.

Agung Purwoko, SH
NIP 19760124 199703 1 001

- Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----
- Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----
- Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----
- Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----
1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----
 - b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----
 - c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
 2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----
 - b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----
 - c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
- Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----
1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----
 2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----
1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----
 2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----
 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

Lembar ketiga dari Risalah Lelang Nomor : 892/07.01/2024-01 tanggal 19 Desember 2024

Pejabat Lelang

Ttd.

Agung Purwoko, SH
NIP 19760124 199703 1 001

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----
2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----
3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
- Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----
1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----
- Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----
- Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----
- Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----
- Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari

pelaksanaan lelang,.../Lembar Keempat,

Lembar keempat dari Risalah Lelang Nomor : 892/07.01/2024-01 tanggal 19 Desember 2024

Pejabat Lelang

Ttd.

Agung Purwoko, SH
NIP 19760124 199703 1 001

pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ----

-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang

berupa tanah.../Lembar Kelima,

Lembar kelima dari Risalah Lelang Nomor : 892/07.01/2024-01 tanggal 19 Desember 2024

Pejabat Lelang

Ttd.

Agung Purwoko, SH
NIP 19760124 199703 1 001

berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Jakarta I. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah tiga penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda NF 125 TD Nomor Polisi : B 6809 PRQ -----
Tahun : 2011 Warna : HITAM Nomor Rangka : MH1J881158K745493 Nomor
Mesin : J88JE1741487 Lokasi : Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Sawah
Besar, Jakarta Pusat dalam kondisi rusak berat. -----

Harga Lelang ----- : Rp6.125.000,00 (enam juta seratus dua puluh lima ribu
----- rupiah) -----

Pembeli ----- : Ahmad Fauzi, NIK 1608191110900001, Wiraswasta,

beralamat di.../Lembar Keenam

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 892/07.01/2024-01 tanggal 19 Desember 2024

Banyaknya barang yang dilelang: 2 (dua) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 2 (dua) -----
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp9.645.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 10 (sepuluh) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Rangga Septiana

Agung Purwoko, SH
NIP 19760124 199703 1 001

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

Tanggal: 30 DEC 2024

Kepala KPKNL Jakarta I



Rofli Edy Purnomo

NIP 19710410 199703 1 003,



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I

JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA 10410
TELEPON : (021) 34835237 ; FAKSIMILE : (021) 34835131 ; SITUS : www.djkn.kemenkeu.go.id

RINCIAN PENGELUARAN UANG PEMBAYARAN LELANG
KEPADA YANG BERHAK

Nomor Risalah Lelang : 892/07.01/2024-01
Tanggal Lelang : 19 Desember 2024
Pejabat Lelang : Agung Purwoko

1 Pokok Lelang	Rp.	9.645.000,00
2 Hasil Bersih Lelang Untuk Pemohon Lelang	Rp.	9.645.000,00
3 Bea Lelang		
a. Bea Lelang Pembeli	Rp.	192.900,00
b. Bea Lelang Penjual	Rp.	-
c. Bea Lelang Batal	Rp.	-
4 Pph Final	Rp.	-
5 Uang Jaminan Penawaran Lelang Pembeli Wanprestasi	Rp.	-

Jumlah Rp. 9.837.900,00

(sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)

Mengetahui,
Kepala Seksi Hukum dan Informasi



Agus Yulianto
NIP 197601211996031001

Jakarta, 31 Desember 2024
Bendahara Penerimaan

Putu Eka Pirlawan
NIP 19950612018011005



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA 10410
TELEPON : (021) 34835237 ; FAKSIMILE : (021) 34835131 ; SITUS : www.djkn.kemenkeu.go.id

KUITANSI

NOMOR : 522 /KW/2024

Risalah Lelang Nomor : 892/07.01/2024-01 tanggal 19 Desember 2024

Sudah Terima dari : Ahmad Fauzi
Alamat Srimulyo, RT.016, RW.004, Kel/Desa Srimulyo, Kec. Belitang Mulya, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Prov. Sumatera Selatan

Banyaknya Uang : Rp6.247.500,00
(enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Keterangan : Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang atas permintaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pejabat Lelang Agung Purwoko, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda NF 125 TD, Tahun 2011, No. Polisi B 6809 PRQ dalam kondisi rusak berat

RINCIAN :

- Harga Pokok Lelang	Rp.	6.125.000,00
- Bea Lelang Pembeli	Rp.	122.500,00
Jumlah	Rp.	6.247.500,00

Mengetahui,
Kepala Seksi Hukum dan Informasi



Agus Yulianto
NIP 197601211996031001

Jakarta, 30 Desember 2024
Bendahara Penyerimaan

Putu Eka Piriawan
NIP 199506122018011005



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA 10410
TELEPON : (021) 34835237 ; FAKSIMILE : (021) 34835131 ; SITUS : www.djkn.kemenkeu.go.id

KUITANSI
NOMOR : 523 /KW/2024

Risalah Lelang Nomor : 892/07.01/2024-01 tanggal 19 Desember 2024

Sudah Terima dari : Ahmad Fauzi
Alamat Srimulyo, RT.016, RW.004, Kel/Desa Srimulyo, Kec. Belitang Mulya, Kab. Ogan
Komereng Ulu Timur, Prov. Sumatera Selatan

Banyaknya Uang : Rp3.590.400,00
(tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah)

Keterangan : Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang atas permintaan Sekretariat Jenderal,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pejabat Lelang Agung Purwoko,
berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda New Mega Pro 150cc, Tahun 2012,
No. Polisi B 6400 PTQ dalam kondisi rusak berat

RINCIAN :

- Harga Pokok Lelang	Rp.	3.520.000,00
- Bea Lelang Pembeli	Rp.	70.400,00
Jumlah	Rp.	3.590.400,00

Mengetahui,
Kepala Seksi Hukum dan Informasi



Agus Yulianto
NIP 197601211996031001

Jakarta, 30 Desember 2024
Bendahara Penerimaan


Putu Eka Priawan
NIP 199506122018011005



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820241230025091
Tanggal Billing	: 30-12-2024 16:12:11
Tanggal Kedaluwarsa	: 31-12-2024 23:59:00
Tanggal Bayar	: 30-12-2024 17:28:09
Bank/Pos/Pintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	: 035 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Eselon I	: 01 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Satuan Kerja	: 427752 - MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
Total Disetor	: 9.645.000 (IDR)
Terbilang	: Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 647586328361
NTPN	: C42B448VVFF3UKC3

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Kode Akun	: 425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Jumlah Setoran	: 9.645.000 (IDR)
Keterangan	: HBL RL-892/07.01/2024-01 19.12.24



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820241230024084
Tanggal Billing	: 30-12-2024 16:04:10
Tanggal Kedaluwarsa	: 06-01-2025 16:04:10
Tanggal Bayar	: 30-12-2024 17:28:10
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 537721 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
Total Disetor	: 192.900 (IDR)
Terbilang	: <i>Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 569915332635
NTPN	: A4AA66U8EV695JCK

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	: 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 192.900 (IDR)
Keterangan	: RL-892/07.01/2024-01

Lampiran II Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2024

No.	Kode Satker	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank / Kantor Pos	Kode	Surat Ijin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo
						Nomor	Tanggal		
1	427752	8100-1242-7752-1000	BPG 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	20	S-1044/WPB.12/KP.02/2020	27/05/2020	31/12/2024	Rp-
2	427752	8100-1242-7752-1001	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	23/12/2024	Rp-
3	427752	8100-1242-7752-1002	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	27/12/2024	Rp-
4	427752	8100-1242-7752-1003	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	30/12/2024	Rp-
5	427752	8100-1242-7752-1004	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	31/12/2024	Rp-
6	427752	8100-1242-7752-1005	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	12/12/2024	Rp-
7	427752	8100-1242-7752-1006	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	27/12/2024	Rp-

No.	Kode Satker	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank / Kantor Pos	Kode	Surat Ijin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo
						Nomor	Tanggal		
8	427752	8100-1242-7752-1007	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	31/12/2024	Rp-
9	427752	8100-1242-7752-1008	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	16/12/2024	Rp-
10	427752	8100-1242-7752-1009	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	16/12/2024	Rp-
11	427752	8100-1242-7752-1010	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	19/12/2024	Rp-
12	427752	8100-1242-7752-1011	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	19/12/2024	Rp-
13	427752	8100-1242-7752-1012	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	16/12/2024	Rp-
14	427752	8100-1242-7752-1013	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	31/12/2024	Rp-

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

No.	Kode Satker	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank / Kantor Pos	Kode	Surat Ijin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo
						Nomor	Tanggal		
15	427752	8100-1242-7752-1014	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-690/KPN.1202/2022	18/05/2022	30/12/2024	Rp-
16	427752	8100-1242-7752-1015	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-690/KPN.1202/2022	18/05/2022	-	Rp-
17	427752	1030010471304	RPL 140 PDHL KEMKO EKON untuk 2ELXFXTA	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	30	000348	06/04/2024	04/12/2024	Rp-
18	427752	1030010510069	RPL 140 PDH KEMKO EKON untuk 2ELXFXTA	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	30	000349	12/04/2024	31/12/2024	Rp-
19	427752	1030011339633	RPL 140 PDH KEMENKOEKON untuk 2KUKEPQA	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	30	000435	25/01/2024	31/12/2024	Rp-
20	427752	1030011348493	RPL 140 PDHL KEMENKOEKON untuk 2KUKEPQA	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	30	000434	25/01/2024	31/12/2024	Rp-
21	427755	6511-6427-7551-000	BPG 019 BA 69 PEREKONOMIAN	Bank Rakyat Indonesia KCP Departemen Keuangan	20	S-260/SES.M.EKON/05/2020	29/05/2020	31/12/2024	Rp-

Lampiran III Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Uraian	Satker		Jumlah (Rp)
		427752 (Rp)	427755 (Rp)	
1	Kas Lainnya di BendaharaPengeluaran	5.932.500	-	5.932.500
Jumlah		5.932.500	-	5.932.500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 035



Tgl Data : 07/05/25 8:18 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 2:52 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_kl_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	848,759,521	848,759,521	0	0	243,841,124	243,841,124	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	848,759,521	848,759,521	0	0	243,841,124	243,841,124	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	848,759,521	848,759,521	0	0	243,841,124	243,841,124	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	530,730,496,000	478,650,907,543	(52,079,588,457)	90.19	524,390,687,000	519,230,088,328	(5,160,598,672)	99.02
1. Belanja Pegawai	132,225,614,000	126,609,191,905	(5,616,422,095)	95.75	110,381,651,000	108,996,042,072	(1,385,608,928)	98.74
2. Belanja Barang	388,081,898,000	341,628,669,901	(46,453,228,099)	88.03	397,546,980,000	393,801,489,489	(3,745,490,511)	99.06
3. Belanja Modal	10,422,984,000	10,413,045,737	(9,938,263)	99.90	16,462,056,000	16,432,556,767	(29,499,233)	99.82
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 035



Tgl Data : 07/05/25 8:18 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 2:52 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_kl_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	530,730,496,000	478,650,907,543	(52,079,588,457)	90.19	524,390,687,000	519,230,088,328	(5,160,598,672)	99.02
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 07/05/25 2:53 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	33,498,647,000	32,668,466,000	31,408,303,490	16,062,379	31,392,241,111	96.14	1,276,224,889
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,081,000	619,000	524,091	0	524,091	84.67	94,909
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2,088,305,000	1,907,024,000	1,896,278,600	0	1,896,278,600	99.44	10,745,400
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	601,698,000	503,828,000	487,709,426	0	487,709,426	96.8	16,118,574
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	3,823,739,000	3,073,609,000	3,029,220,000	5,080,200	3,024,139,800	98.56	49,469,200
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,759,879,000	2,914,699,000	2,801,552,000	13,380,200	2,788,171,800	96.12	126,527,200
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	204,256,000	535,891,000	481,791,088	0	481,791,088	89.9	54,099,912
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,779,739,000	1,428,884,000	1,422,546,060	0	1,422,546,060	99.56	6,337,940
511129	Belanja Uang Makan PNS	7,136,075,000	3,935,378,000	3,890,539,000	385,750	3,890,153,250	98.86	45,224,750
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,047,488,000	713,257,000	677,960,000	4,440,500	673,519,500	95.05	39,737,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	52,940,907,000	47,681,655,000	46,096,423,755	39,349,029	46,057,074,726	96.68	1,624,580,274
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	264,799,000	293,199,000	249,375,000	0	249,375,000	85.05	43,824,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	264,799,000	293,199,000	249,375,000	0	249,375,000	85.05	43,824,000
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	2,749,236,000	1,803,296,000	1,717,620,600	0	1,717,620,600	95.25	85,675,400
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	241,000	39,000	34,618	0	34,618	88.76	4,382
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	274,924,000	53,024,000	49,571,340	0	49,571,340	93.49	3,452,660
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	116,854,000	12,692,000	10,918,952	0	10,918,952	86.03	1,773,048
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	0	57,000,000	39,375,000	0	39,375,000	69.08	17,625,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	685,160,000	282,180,000	276,756,000	0	276,756,000	98.08	5,424,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	180,471,000	66,000,000	62,498,460	0	62,498,460	94.69	3,501,540
511628	Belanja Uang Makan PPPK	547,452,000	235,853,000	226,037,000	0	226,037,000	95.84	9,816,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	4,554,338,000	2,510,084,000	2,382,811,970	0	2,382,811,970	94.93	127,272,030
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	199,791,000	419,791,000	412,437,000	0	412,437,000	98.25	7,354,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	20,000,000	10,800,000	2,611,000	0	2,611,000	24.18	8,189,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	219,791,000	430,591,000	415,048,000	0	415,048,000	96.39	15,543,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	94,490,899,000	78,834,337,000	75,343,114,084	11,710,666	75,331,403,418	95.57	3,502,933,582
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	2,475,748,000	2,173,478,791	0	2,173,478,791	87.79	302,269,209
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	94,490,899,000	81,310,085,000	77,516,592,875	11,710,666	77,504,882,209	95.33	3,805,202,791
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	152,470,734,000	132,225,614,000	126,660,251,600	51,059,695	126,609,191,905	95.79	5,616,422,095

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 07/05/25 2:53 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	8,340,464,000	7,005,550,000	6,837,836,901	770,700	6,837,066,201	97.61	168,483,799
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	20,000,000	0	0	0	0		0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	77,341,000	41,548,000	32,026,630	0	32,026,630	77.08	9,521,370
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,818,600,000	946,956,000	899,174,000	0	899,174,000	94.95	47,782,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3,823,706,000	4,603,238,000	3,346,926,663	0	3,346,926,663	72.71	1,256,311,337
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	14,080,111,000	12,597,292,000	11,115,964,194	770,700	11,115,193,494	88.24	1,482,098,506
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	14,064,377,000	17,974,884,000	13,880,291,056	130,000	13,880,161,056	77.22	4,094,722,944
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	11,110,520,000	5,789,456,000	4,620,486,149	43,345,375	4,577,140,774	79.81	1,212,315,226
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,688,064,000	959,983,000	941,878,067	0	941,878,067	98.11	18,104,933
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	23,200,000	15,893,325	0	15,893,325	68.51	7,306,675
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	26,862,961,000	24,747,523,000	19,458,548,597	43,475,375	19,415,073,222	78.63	5,332,449,778
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,538,701,000	5,334,490,000	4,465,997,269	1,620,000	4,464,377,269	83.72	870,112,731
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	810,000,000	507,000,000	493,524,242	0	493,524,242	97.34	13,475,758
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	6,348,701,000	5,841,490,000	4,959,521,511	1,620,000	4,957,901,511	84.9	883,588,489
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	4,977,324,000	4,737,313,000	4,708,235,743	0	4,708,235,743	99.39	29,077,257
522112	Belanja Langganan Telepon	143,400,000	75,156,000	67,607,635	0	67,607,635	89.96	7,548,365
522113	Belanja Langganan Air	0	72,000,000	70,763,040	0	70,763,040	98.28	1,236,960
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8,739,500,000	9,255,233,000	8,935,666,430	72,742	8,935,593,688	96.55	319,639,312
522131	Belanja Jasa Konsultan	19,265,770,000	13,043,146,000	10,056,085,047	0	10,056,085,047	77.1	2,987,060,953
522141	Belanja Sewa	79,581,526,000	72,035,681,000	70,120,359,793	0	70,120,359,793	97.34	1,915,321,207
522151	Belanja Jasa Profesi	8,956,450,000	5,570,851,000	4,451,060,000	0	4,451,060,000	79.9	1,119,791,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	58,702,661,000	60,220,609,000	58,567,210,846	2,718,091	58,564,492,755	97.25	1,656,116,245
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	180,366,631,000	165,009,989,000	156,976,988,534	2,790,833	156,974,197,701	95.13	8,035,791,299
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,420,000,000	2,865,726,000	2,805,373,308	0	2,805,373,308	97.89	60,352,692
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	199,766,000	0	0	0	0	199,766,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,406,290,000	3,860,781,000	3,745,172,744	3,125,000	3,742,047,744	97.01	118,733,256
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	5,826,290,000	6,926,273,000	6,550,546,052	3,125,000	6,547,421,052	94.58	378,851,948
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,987,711,000	32,852,243,000	26,339,602,983	68,637,745	26,270,965,238	80.18	6,581,277,762

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 07/05/25 2:53 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	896,440,000	1,125,755,000	975,690,000	510,000	975,180,000	86.67	150,575,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	38,535,540,000	42,480,338,000	32,814,506,917	5,365,000	32,809,141,917	77.25	9,671,196,083
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	39,255,048,000	51,496,959,000	42,008,484,586	31,555,878	41,976,928,708	81.57	9,520,030,292
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	110,674,739,000	127,955,295,000	102,138,284,486	106,068,623	102,032,215,863	79.82	25,923,079,137
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	500,000,000	16,189,401,000	16,189,094,785	0	16,189,094,785	100	306,215
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	19,675,277,000	28,814,635,000	24,435,713,347	38,141,074	24,397,572,273	84.8	4,417,062,727
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	20,175,277,000	45,004,036,000	40,624,808,132	38,141,074	40,586,667,058	90.27	4,417,368,942
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	364,334,710,000	388,081,898,000	341,824,661,506	195,991,605	341,628,669,901	88.08	46,453,228,099
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,066,829,000	10,325,944,000	10,317,236,087	0	10,317,236,087	99.92	8,707,913
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	7,066,829,000	10,325,944,000	10,317,236,087	0	10,317,236,087	99.92	8,707,913
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	150,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	150,000,000	0	0	0	0		0
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	20,000,000	97,040,000	95,809,650	0	95,809,650	98.73	1,230,350
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	20,000,000	97,040,000	95,809,650	0	95,809,650	98.73	1,230,350
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	7,236,829,000	10,422,984,000	10,413,045,737	0	10,413,045,737	99.9	9,938,263
	JUMLAH BELANJA	524,042,273,000	530,730,496,000	478,897,958,843	247,051,300	478,650,907,543	90.23	52,079,588,457

Lampiran V Neraca
NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN



Tgl Data07/05/25 8:18 AM
Tgl Cetak07/05/25 2:54 PM
Halaman1
lap_neraca_kl_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	5,932,500	302,947,831	(297,015,331)	(98.04)
Piutang Bukan Pajak	9,743,220	10,431,410	(688,190)	(6.60)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(48,716)	(52,157)	3,441	(6.60)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	9,694,504	10,379,253	(684,749)	(6.60)
Persediaan	414,816,113	603,889,690	(189,073,577)	(31.31)
JUMLAH ASET LANCAR	430,443,117	917,216,774	(486,773,657)	(53.07)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	98,355,874,721	93,889,973,772	4,465,900,949	4.76
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,231,461,587	2,231,461,587	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	163,179,000	146,140,500	17,038,500	11.66
AKUMULASI PENYUSUTAN	(73,811,120,980)	(69,481,649,499)	(4,329,471,481)	6.23
JUMLAH ASET TETAP	26,939,394,328	26,785,926,360	153,467,968	0.57
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	9,798,216,045	11,090,945,832	(1,292,729,787)	(11.66)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	5,883,862,135	7,842,606,562	(1,958,744,427)	(24.98)
Aset Lain-lain	11,516,428,317	6,827,053,199	4,689,375,118	68.69
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(13,705,073,380)	(10,793,116,274)	(2,911,957,106)	26.98
JUMLAH ASET LAINNYA	13,493,433,117	14,967,489,319	(1,474,056,202)	(9.85)
JUMLAH ASET	40,863,270,562	42,670,632,453	(1,807,361,891)	(4.24)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	10,505,308,162	12,995,753,627	(2,490,445,465)	(19.16)
Utang Jangka Pendek Lainnya	90,000	7,385,737	(7,295,737)	(98.78)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10,505,398,162	13,003,139,364	(2,497,741,202)	(19.21)
JUMLAH KEWAJIBAN	10,505,398,162	13,003,139,364	(2,497,741,202)	(19.21)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	30,357,872,400	29,667,493,089	690,379,311	2.33
JUMLAH EKUITAS	30,357,872,400	29,667,493,089	690,379,311	2.33
JUMLAH EKUITAS	30,357,872,400	29,667,493,089	690,379,311	2.33
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	40,863,270,562	42,670,632,453	(1,807,361,891)	(4.24)

NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data 07/05/25 8:18 AM

Tgl Cetak 07/05/25 2:54 PM

Halaman 2

lap_neraca_kl_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 2:55 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5,932,500	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	9,743,220	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	48,716
0.0	117111	Barang Konsumsi	260,377,040	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	33,581,285	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	120,857,788	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	98,355,874,721	0
0.0	134113	Jaringan	2,231,461,587	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	163,179,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	72,730,090,235
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	1,081,030,745
0.0	162151	Software	2,929,097,950	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	5,318,010,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1,551,108,095	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	5,883,862,135	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	4,795,613,027	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	6,720,815,290	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	4,792,207,427
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	2,789,069,450
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	6,123,796,503
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	4,849,673,529
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	302,620,351
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	5,353,014,282
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	90,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	471,962,692,110
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	848,759,521	0
0.0	391111	Ekuitas	0	29,667,493,089
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	317,914,198,524
0.0	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset	0	926,945,600
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	404,565,800
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	69,583
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	12,070,982
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	97,918,777
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	2,375,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	31,392,241,111	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	524,091	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,896,278,600	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	487,709,426	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 2:55 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	3,024,139,800	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,788,171,800	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	481,791,088	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,422,546,060	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	3,890,153,250	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	673,519,500	0
3.0	511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	249,375,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1,717,620,600	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	34,618	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	49,571,340	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	10,918,952	0
3.0	511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	39,375,000	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	276,756,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	62,498,460	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	226,037,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	412,437,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	2,611,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	75,103,792,219	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,366,725,156	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	6,825,630,401	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	32,026,630	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	899,174,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	3,346,926,663	0
3.0	521211	Beban Bahan	13,880,161,056	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	4,577,140,774	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	941,878,067	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	15,893,325	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	4,713,208,654	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	66,952,055	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	70,763,040	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8,935,593,688	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	10,051,805,768	0
3.0	522141	Beban Sewa	69,767,005,539	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	4,451,060,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	369,611,726,549	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,745,235,173	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,742,047,744	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	26,266,799,238	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 2:55 PM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	974,895,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32,808,631,917	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	41,976,047,208	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	16,189,094,785	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	24,397,572,273	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10,188,051,376	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	56,118,578	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	356,861,625	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	167,572,500	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	2,580,200	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	4,112,800,074	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	518,540,782	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	515,634,232	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	3,441
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	1,445,000	0
JUMLAH			919,009,974,144	919,009,974,144

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 2:55 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	478,650,907,543
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	848,759,521	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	404,565,800
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	69,583
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	18,199,968
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	423,549,170
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	2,375,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	31,408,303,490	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	16,062,379
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	524,091	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,896,278,600	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	487,709,426	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	3,029,220,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	5,080,200
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,801,552,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	13,380,200
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	481,791,088	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,422,546,060	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	385,750
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	3,890,539,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	677,960,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	4,440,500
3.0	511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	249,375,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,717,620,600	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	34,618	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	49,571,340	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	10,918,952	0
3.0	511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	39,375,000	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	276,756,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	62,498,460	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	226,037,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	412,437,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	2,611,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	75,343,114,084	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan	0	11,710,666
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,173,478,791	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	770,700
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6,837,836,901	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 2:55 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	32,026,630	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	899,174,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3,346,926,663	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	130,000
3.0	521211	Belanja Bahan	13,880,291,056	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	4,620,486,149	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	43,345,375
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	941,878,067	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	15,893,325	0
3.1	521811	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	1,620,000
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,465,997,269	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	493,524,242	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	4,708,235,743	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	67,607,635	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	70,763,040	0
3.1	522119	Pengembalian Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	72,742
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8,935,666,430	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultansi	10,056,085,047	0
3.0	522141	Belanja Sewa	70,120,359,793	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	4,451,060,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	58,567,210,846	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	2,718,091
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,805,373,308	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,745,172,744	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	3,125,000
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,339,602,983	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	68,637,745
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	510,000
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	975,690,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32,814,506,917	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	5,365,000
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	42,008,484,586	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	31,555,878
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	16,189,094,785	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	24,435,713,347	0
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar	0	38,141,074
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,317,236,087	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	95,809,650	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 2:55 PM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

JUMLAH	479,746,718,364	479,746,718,364
--------	-----------------	-----------------

Keterangan :
FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tgl Cetak : 07/05/25 2:56 PM
Halaman : 1
lap_lo_kl_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	69,583	792,520	(722,937)	(91.22)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	69,583	792,520	(722,937)	(91.22)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	69,583	792,520	(722,937)	(91.22)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	126,574,827,071	109,295,553,146	17,279,273,925	15.81
Beban Persediaan	4,628,434,306	4,959,516,808	(331,082,502)	(6.676)
Beban Barang dan Jasa	498,186,946,209	333,704,220,483	164,482,725,726	49.29
Beban Pemeliharaan	7,005,823,699	8,135,106,582	(1,129,282,883)	(13.882)
Beban Perjalanan Dinas	142,613,040,421	170,987,306,946	(28,374,266,525)	(16.594)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM

Tgl Cetak : 07/05/25 2:56 PM

Halaman : 2

lap_lo_kl_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	10,771,184,279	9,948,936,617	822,247,662	8.265
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(3,441)	10,362	(13,803)	(133.208)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	789,780,252,544	637,030,650,944	152,749,601,600	23.978
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(789,780,182,961)	(637,029,858,424)	(152,750,324,537)	23.979
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	403,120,800	(439,031,579)	842,152,379	(191.82)
Pendapatan Pelepasan Aset	404,565,800	6,789,999	397,775,801	5,858.26
Beban Pelepasan Aset	1,445,000	445,821,578	(444,376,578)	(99.676)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	112,364,759	192,118,986	(79,754,227)	(41.513)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	112,364,759	192,118,986	(79,754,227)	(41.513)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	515,485,559	(246,912,593)	762,398,152	(308.772)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(789,264,697,402)	(637,276,771,017)	(151,987,926,385)	23.85
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(789,264,697,402)	(637,276,771,017)	(151,987,926,385)	23.85

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM

Tgl Cetak : 07/05/25 2:57 PM

Halaman : 1

lap_lpe_kl_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	29,667,493,089	17,351,852,200	12,315,640,889	70.98
SURPLUS/DEFISIT-LO	(789,264,697,402)	(637,276,771,017)	(151,987,926,385)	23.85
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	926,945,600	(684,750)	927,630,350	(135,46 9.93)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	926,945,600	0	926,945,600	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(4,578,750)	4,578,750	(100)
LAIN-LAIN	0	3,894,000	(3,894,000)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	789,028,131,113	649,593,096,656	139,435,034,457	21.46
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	690,379,311	12,315,640,889	(11,625,261,578)	(94.39)
EKUITAS AKHIR	30,357,872,400	29,667,493,089	690,379,311	2.33

Keterangan :

FINAL

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl.Data : 07/05/25 1:23 PM
Tanggal : 07/05/25 2:59 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_kl_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	260,377,040
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	33,581,285
117199	Persediaan Lainnya	120,857,788
132111	Peralatan dan Mesin	98,355,874,721
134113	Jaringan	2,231,461,587
135121	Aset Tetap Lainnya	163,179,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(72,730,090,235)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1,081,030,745)
162151	Software	2,929,097,950
162171	Hasil Kajian/Penelitian	5,318,010,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1,551,108,095
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	4,795,613,027
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	6,720,815,290
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(4,792,207,427)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(2,789,069,450)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(6,123,796,503)
J U M L A H		34,963,781,423

Lampiran IX Laporan Barang Pengguna Tingkat KL Intrakomptabel

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL

INTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM

Tanggal : 07/05/25 2:59 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl_poc

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	8,470	93,889,973,772	835	13,087,592,902	1,056	8,621,691,953	8,249	98,355,874,721
30103	ALAT BANTU	38	5,566,171,266	0	0	1	226,644,146	37	5,339,527,120
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	20	4,427,662,155	0	0	4	909,128,000	16	3,518,534,155
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	27	62,910,650	1	3,608,100	10	23,705,000	18	42,813,750
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5	40,334,300	0	0	0	0	5	40,334,300
30303	ALAT UKUR	5	39,041,000	0	0	4	38,040,000	1	1,001,000
30501	ALAT KANTOR	1,111	10,672,239,132	175	1,396,536,080	230	3,771,367,591	1,056	8,297,407,621
30502	ALAT RUMAH TANGGA	4,731	28,577,927,278	260	1,875,756,149	709	2,573,813,300	4,282	27,879,870,127
30601	ALAT STUDIO	446	10,047,556,629	67	3,609,726,715	14	175,175,695	499	13,482,107,649
30602	ALAT KOMUNIKASI	158	1,018,701,940	28	56,296,128	11	192,880,000	175	882,118,068
30603	PERALATAN PEMANCAR	7	71,227,200	0	0	0	0	7	71,227,200
30701	ALAT KEDOKTERAN	59	877,303,590	4	63,462,585	3	78,128,400	60	862,637,775
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	9	36,256,800	0	0	0	0	9	36,256,800
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	14,115,000	0	0	0	0	3	14,115,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	13,358,400	0	0	0	0	1	13,358,400
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	4	68,056,000	1	60,420,000	0	0	5	128,476,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	0	0	0	0	0	0	0	0
30901	SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	1,127	20,961,296,478	213	4,907,030,000	19	267,571,631	1,321	25,600,754,847
31002	PERALATAN KOMPUTER	706	11,206,775,754	86	1,114,757,145	51	365,238,190	741	11,956,294,709
31501	ALAT DETEKSI	1	22,000,000	0	0	0	0	1	22,000,000
31503	ALAT SAR	1	3,280,000	0	0	0	0	1	3,280,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	11	163,760,200	0	0	0	0	11	163,760,200
134113	Jaringan	2	2,231,461,587	0	0	0	0	2	2,231,461,587
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	2,231,461,587	0	0	0	0	2	2,231,461,587
135121	Aset Tetap Lainnya	25	146,140,500	5	17,038,500	0	0	30	163,179,000
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	0	0	0	0	0	0	0	0
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	5	96,310,500	1	2,608,500	0	0	6	98,919,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	20	49,830,000	4	14,430,000	0	0	24	64,260,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	6	1,205,008,172	1,038	5,922,129,273	113	2,331,524,418	931	4,795,613,027
30103	ALAT BANTU	4	1,030,924,912	1	226,644,146	5	1,257,569,058	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	4	909,128,000	2	33,088,000	2	876,040,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	10	23,705,000	0	0	10	23,705,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	4	38,040,000	0	0	4	38,040,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM
Tanggal : 07/05/25 2:59 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl_poc

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30501	ALAT KANTOR	0	0	213	1,153,829,911	27	157,686,529	186	996,143,382
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	709	2,573,813,300	20	85,862,400	689	2,487,950,900
30601	ALAT STUDIO	0	0	13	93,150,695	12	77,790,350	1	15,360,345
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	11	192,880,000	1	4,950,000	10	187,930,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	3	78,128,400	0	0	3	78,128,400
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	19	267,571,631	19	267,571,631	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	2	174,083,260	51	365,238,190	27	447,006,450	26	92,315,000
TOTAL			97,472,584,031		19,026,760,675		10,953,216,371		105,546,128,335

Lampiran X Laporan Barang Pengguna Tingkat KL Ekstrakomptabel

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL

EKSTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM

Tanggal : 07/05/25 2:59 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_kl_poc

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	567	292,215,105	32	16,853,325	73	21,372,700	526	287,695,730
30103	ALAT BANTU	4	3,445,000	1	900,000	0	0	5	4,345,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	1,870,000	0	0	0	0	2	1,870,000
30303	ALAT UKUR	5	200,000	0	0	0	0	5	200,000
30501	ALAT KANTOR	11	3,188,400	0	0	4	986,700	7	2,201,700
30502	ALAT RUMAH TANGGA	420	225,463,555	11	5,830,535	58	17,226,000	373	214,068,090
30601	ALAT STUDIO	39	26,384,300	7	4,538,940	0	0	46	30,923,240
30602	ALAT KOMUNIKASI	17	8,041,000	0	0	8	2,200,000	9	5,841,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	6	1,518,000	0	0	0	0	6	1,518,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	12	3,538,090	6	3,419,500	0	0	18	6,957,590
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	13	2,053,760	4	1,204,350	0	0	17	3,258,110
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	3	960,000	3	960,000	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	3	2,500,000	0	0	0	0	3	2,500,000
31503	ALAT SAR	5	693,000	0	0	0	0	5	693,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	30	13,320,000	0	0	0	0	30	13,320,000
135121	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
60501	TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	70	20,412,700	8	2,200,000	62	18,212,700
30501	ALAT KANTOR	0	0	4	986,700	0	0	4	986,700
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	58	17,226,000	0	0	58	17,226,000
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	8	2,200,000	8	2,200,000	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			292,215,105		37,266,025		23,572,700		305,908,430

Lampiran XI Laporan Barang Pengguna Tingkat KL Aset Tak Berwujud

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL

ASET TAK BERWUJUD

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

Tgl Data : 07/05/25 1:23 PM

Tanggal : 07/05/25 2:59 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_atb_kel_kl_poc

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software	29	4,884,433,200	0	0	16	1,955,335,250	13	2,929,097,950
80101	ASET TAK BERWUJUD	29	4,884,433,200	0	0	16	1,955,335,250	13	2,929,097,950
162161	Lisensi	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0
162171	Hasil Kajian/Penelitian	1	5,318,010,000	0	0	0	0	1	5,318,010,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	5,318,010,000	0	0	0	0	1	5,318,010,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	3	888,502,632	12	1,064,104,250	1	401,498,787	14	1,551,108,095
80101	ASET TAK BERWUJUD	3	888,502,632	12	1,064,104,250	1	401,498,787	14	1,551,108,095
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	24	5,622,045,027	6	1,371,500,937	8	272,730,674	22	6,720,815,290
80101	ASET TAK BERWUJUD	24	5,622,045,027	6	1,371,500,937	8	272,730,674	22	6,720,815,290
TOTAL			16,712,990,859		2,435,605,187		2,629,564,711		16,519,031,335

Lampiran XII Rincian Persediaan Menurut Unit Kerja per 31 Desember 2024

No.	Satker	Unit Kerja	Nilai (Rp)
1	427752	Biro Umum	187.561.244
2	427752	Poliklinik	120.911.623
3	427752	Kelompok Substansi Keuangan	-
4	427752	Biro Hukum dan Organisasi	-
5	427752	Biro KLIP	-
6	427752	Biro Perencanaan	-
7	427752	Lintas Sektor	-
8	427752	Deputi I	-
9	427752	Deputi II	-
10	427752	Deputi III	-
11	427752	Deputi IV	-
12	427752	Deputi V	-
13	427752	Deputi VI	-
14	427752	Deputi VII	-
15	427752	KPPIP	-
16	427755	Setjen DN KEK	106.343.246
Jumlah			414.816.113

Lampiran XIII
Monitoring dan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian a.d. 31 Desember 2024

**MONITORING TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2023**

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Belanja Perjalanan Dinas Tidak Dilengkapi Bukti Pertanggungjawaban Sesuai Ketentuan Sebesar Rp182,09 Juta.	BPK merekomendasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar memerintahkan Sekretaris Kemenko Perekonomian untuk: a) Memberikan pembinaan kepada PPK Deputi 1, Deputi 3, Deputi 7, Lintas Sektor KPE-Pke, Biro KLIP, PPK KEK, dan PPK Hibah Folur UNDP-Kemenko Perekonomian atas ketidakcermatannya, dan untuk selanjutnya agar menagih sebesar Rp82.433.777,00 dan menyetorkan ke Kas Negara; dan b) Meningkatkan koordinasi dengan UNDP dan Kementerian Keuangan atas penggunaan Standar Biaya Masukan yang tidak konsisten pada seluruh klausul dalam PMK yang berlaku.	Sesmenko Perekonomian telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui : 1) Nota Dinas Nomor PW.06.04/128.1/SES.M.EKON/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 kepada Kepala Biro Perencanaan selaku Kuasa Pengguna Barang; 2) Nota Dinas Nomor PW.06.04/127.2/SES.M.EKON/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Untuk : 1) Memberikan pembinaan kepada PPK Deputi I, Deputi 3, Deputi 7, Lintas Sektor KPE-PKE, Biro KLIP, PPK KEK, dan PPK Hibah Folur UNDP – Kemenko Perekonomian atas ketidakcermatannya, dan untuk	Desember 2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			selanjutnya agar menarik dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp 82.433.777,00; dan 2) Meningkatkan koordinasi dengan UNDP dan Kementerian Keuangan atas penggunaan Standar Biaya Masukan yang tidak konsisten pada seluruh klausul dalam PMK yang berlaku Kepala Biro Perencanaan Kemenko Bidang Perekonomian selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menindaklanjuti Nota Dinas Sesmenko Perekonomian melalui: 1) Nota Dinas Nomor PW.05.02/5/SET.M.EKON.1/09/2024 tanggal 6 September 2024 kepada PPK Deputi I, III, VII, Lintas Sektor KPE-PKE, dan Biro KLIP agar lebih cermat dalam menerima bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas berupa DPR dari pelaksana dinas dan menagih kepada pelaksana perjalanan dinas dan menyetorkan ke kas negara. 2) Nota Dinas Nomor PW.05.02/4/SET.M.EKON.1/09/2024 tanggal 6 September 2024 kepada PPK Hibah Folur agar lebih cermat dalam menerima bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas berupa DPR dari pelaksana dinas dan		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			meningkatkan koordinasi dengan UNDP dan Kementerian Keuangan atas penggunaan Standar Biaya Masukan yang tidak konsisten pada sleuruh klausul dalam PMK yang berlaku. Kepala Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menindaklanjuti Nota Dinas Sesmenko Perekonomian melalui Nota Dinas Nomor PW.03.00/350/SJ.DNKEK/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 kepada Kepala Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK, Kepala Biro Pengendalian KEK, Kepala Biro Investasi, Kerja Sama dan Komunikasi, Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia, dan PPK untuk menyetorkan ke Kas Negara dan memberikan pembinaan kepada pegawai di unit kerja masing-masing.		
2.	Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Belum Tertib.	BPK merekomendasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar memerintahkan Sekretaris Kemenko Perekonomian melalui Kepala Biro Perencanaan selaku KPA untuk memberikan pembinaan kepada BP, BPP, dan PPK pada Deputi 2, 3, 5, 6, 7, Lintas Sektor, dan Sekretariat 1, 2, 3, dan 4 Kemenko Perekonomian atas kelalaiannya dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam penatausahaan kas.	Sesmenko Perekonomian telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui Nota Dinas Nomor PW.06.04/129.1/SES.M.EKON/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 kepada Kepala Biro Perencanaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk memberikan pembinaan kepada BP, BPP, dan PPK pada Deputi 2, 3, 5, 6, 7, Lintas Sektor, dan Sekretariat 1, 2, 3, dan 4 - Kemenko Perekonomian atas kekurangcermatannya dan untuk	Desember 2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			selanjutnya agar lebih cermat dalam penatausahaan kas. Kepala Biro Perencanaan Kemenko Bidang Perekonomian selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menindaklanjuti Nota Dinas Sesmenko Perekonomian melalui: 1) Nota Dinas Nomor PW.05.02/6/SET.M.EKON.1/09/2024 tanggal 6 September 2024 kepada Bendahara Pengeluaran agar lebih cermat dalam penatausahaan kas. 2) Nota Dinas Nomor PW.05.02/7/SET.M.EKON.1/09/2024 tanggal 6 September 2024 kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu agar lebih cermat dalam penatausahaan kas. 3) Nota Dinas Nomor PW.05.02/8/SET.M.EKON.1/09/2024 tanggal 6 September 2024 kepada PPK pada Deputi 2, 3, 5, 6, 7, Lintas Sektor, dan Sekretariat 1, 2, 3, dan 4 agar lebih cermat dalam penatausahaan kas.		
3.	Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Belum Memadai.	BPK merekomendasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar memerintahkan Sekretaris Kemenko Perekonomian melalui Kepala Biro Umum selaku KPB untuk memberikan pembinaan kepada Kepala Rumah Tangga dan Pengadaan-Biro Umum atas ketidakproaktifannya dan untuk selanjutnya	Sesmenko Perekonomian telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui Nota Dinas Nomor PW.06.04/127.1/SES.M.EKON/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang untuk memberikan pembinaan kepada	Desember 2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		agar lebih proaktif mengajukan permohonan reklasifikasi dalam daftar barang rusak berat dan daftar barang hilang atas barang yang telah rusak berat/hilang.	Kepala Rumah Tangga dan Pengadaan – Biro Umum atas ketidakproaktifannya dan untuk selanjutnya agar lebih proaktif mengajukan permohonan reklasifikasi dalam daftar barang rusak berat dan menelusuri keberadaan barang yang tidak ditemukan. Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang telah menindaklanjuti Nota Dinas Sesmenko Perekonomian melalui Nota Dinas Nomor PW.06.04/127.1/SES.M.EKON/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 kepada Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan agar lebih proaktif mengajukan permohonan reklasifikasi dalam daftar barang rusak berat dan daftar barang hilang atas barang yang telah rusak berat/hilang		

**MONITORING TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2022**

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Paket Pekerjaan Plafon Selasar Lantai 3 Gedung Ali Wardana Kemenko Perekonomian Sebesar Rp27.000.000,00.	BPK merekomendasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kemenko Perekonomian agar memberikan pembinaan kepada PPK Biro Umum atas ketidakcermatannya dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas tagihan dan menguji kelengkapan serta kebenaran materiil dokumen tagihan.	TL Semester II 2023 Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sesmenko Perekonomian telah menginstrusikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Nota Dinas nomor KU.05.01/196/SES.M.EKON/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk: a) Memberikan pembinaan kepada PPK Biro Umum atas ketidakcermatannya. b) Memerintahkan PPK Biro Umum untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas tagihan dan menguji kelengkapan serta kebenaran materiil dokumen tagihan. Menindaklanjuti Nota Dinas tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pembinaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen PPK) Biro Umum melalui Nota Dinas nomor PW.05.02/06/SET.M.EKON.1/09/2023 tanggal 5 September 2023 agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas tagihan dan menguji kelengkapan serta kebenaran materiil dokumen tagihan. PPK telah melakukan penyetoran nomor NTPN 04E0855DF02639L5 dengan nilai	Desember 2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			sebesar Rp 27.000.000,00 tanggal 15 Mei 2023 Catatan: Diminta untuk membuat Surat Teguran dan surat teguran tersebut ditembuskan kepada Inspektur Kemenko Perekonomian. TL Semester I 2024 Sesmenko Perekonomian telah membuat Surat Teguran kepada PPK Biro Umum TA 2022 melalui surat nomor PW.05.02/182.3/SES.M.EKON/06/2024 tanggal 27 Juni 2024		
2.	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun 2022 Sebesar Rp11.155.394,70.	BPK merekomendasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kemenko Perekonomian agar : a) Memberikan pembinaan kepada Petugas Pengadministrasian Kepegawaian atas ketidakcermatannya dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan perhitungan Tukin; dan b) Memerintahkan PPK untuk melakukan penagihan dan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp11.155.394,70.	TL Semester II 2023: Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sesmenko Perekonomian telah menginstrusikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Nota Dinas nomor KU.05.01/197/SES.M.EKON/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk: a) Memberikan pembinaan kepada Petugas Pengadministrasian Kepegawaian atas ketidakcermatannya dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan perhitungan Tukin; dan b) Memerintahkan PPK untuk melakukan penagihan dan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp11.155.394,70	Desember 2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			Menindaklanjuti Nota Dinas tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pembinaan kepada kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Pegawai melalui Nota Dinas nomor PW.05.02/07/SET.M.EKON.1/09/2023 tanggal 5 September 2023 agar lebih cermat dalam melakukan perhitungan Tunjangan Kinerja dan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp 11.155.394,70. Catatan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum terdapat pembinaan kepada Petugas Pengadministrasian Kepegawaian TL Semester I 2024 Sesmenko Perekonomian telah membuat Surat Teguran kepada Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai TA 2022 melalui surat nomor PW.05.02/182.4/SES.M.EKON/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 TL Semester II 2023 PPK Belanja Pegawai telah melakukan penyetoran ke kas negara dengan nomor NTPN sebagai berikut:		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			1. 37B1F1JNFMARO7JN sebesar Rp2.734.000,00 tanggal 03 Desember 2023 2. CD0FC55DF8VTTFIL sebesar Rp2.734.000,00 tanggal 09 Januari 2024 3. 230FB3CIFB9ESS0R sebesar Rp78.739,00 tanggal 19 September 2023 4. F61B20N9VRI9LSU4 sebesar Rp62.336,00 tanggal tanggal 19 September 2023 5. 76F116U8ELJ0GSFB sebesar Rp2.734.000,00 tanggal 21 September 2023 6. D8EB10N9VRKRKJNU sebesar Rp2.734.000,00 tanggal 09 Oktober 2023 7. 6FFB87QLUG1SUDBE sebesar Rp78.320,00 tanggal 07 Agustus 2023 Total penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp11.155.395,000 Catatan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena terdapat penyetoran pada tahun 2024 (CD0FC55DF8VTTFIL sebesar Rp 2.734.000,00 tanggal 09 Januari 2024) TL Semester I 2024 Terdapat penyetoran pada tahun 2024 (CD0FC55DF8VTTFIL sebesar Rp 2.734.000,00 tanggal 09 Januari 2024)		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
3.	Kewajiban Pada Kontrak PPNPN Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan, Terdapat Iuran BPJS Ketenagakerjaan PPNPN Pengemudi Pada Biro Umum yang Belum Dibayarkan Sebesar Rp5.513.822,00, dan Belum Seluruh PPNPN Berstatus Kepesertaan BPJS Kesehatan Aktif.	BPK merekomendasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kemenko Perekonomian agar: a) Memerintahkan PPK pada masing-masing unit kerja mempedomani SE KPA Kemenko Perekonomian tentang Tenaga Pendukung di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyusun kontrak PPNPN; b) Memerintahkan PPK Biro Umum, Biro Perencanaan, Biro Lintas Sektoral, Deputi 4, Deputi 6, dan Deputi 7 mengikuti SE KPA Kemenko Perekonomian terkait kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Tenaga Pendukung PPNPN di lingkungan Kemenko Perekonomian.	TL Semester II 2023 PPK telah melakukan penyetoran ke kas negara dengan nomor NTPN 215F70N9VRHTUJGS dengan nilai sebesar Rp5.513.822,00 tanggal 07 September 2023. TL Semester II 2023 Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sesmenko Perekonomian telah menginstruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Nota Dinas nomor KU.05.01/198/SES.M.EKON/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk: a) Memerintahkan PPK pada masing-masing unit kerja mempedomani SE KPA Kemenko Perekonomian tentang Tenaga Pendukung di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyusun kontrak PPNPN; b) Memerintahkan PPK Biro Umum untuk menarik dan menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi sebesar Rp5.513.822,00; dan c) Memerintahkan PPK Biro Umum, Biro Perencanaan, Biro Lintas Sektoral, Deputi 4, Deputi 6, dan Deputi 7 mengikuti SE KPA Kemenko Perekonomian terkait kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan	Desember 2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			bagi Tenaga Pendukung PPNN di lingkungan Kemenko Perekonomian. Menindaklanjuti Nota Dinas tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran telah menyampaikan Nota Dinas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Umum, PPK Biro Perencanaan, PPK Lintas Sektor, PPK Deputi IV, PPK Deputi VI, dan PPK Deputi VII melalui Nota Dinas nomor PW.05.02/04/SET.M.EKON.1/09/2023 tanggal 5 September 2023 agar mengikuti Surat Edaran KPA terkait kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Tenaga Pendukung PPNN dan melakukan monitoring serta pengendalian atas keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Menindaklanjuti Nota Dinas tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran telah menyampaikan Nota Dinas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker 427752 melalui Nota Dinas nomor PW.05.02/01/SET.M.EKON.1/09/2023 tanggal 5 September 2023 agar mempedomani Surat Edaran KPA tentang Tenaga Pendukung di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian dalam menyusun kontrak PPNN. Catatan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena menunggu hasil pemenuhan		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			kewajiban PPNPN pada tahun berikutnya (LK 2023) atas pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan		
4.	Pembayaran Biaya Taksi dan Transportasi Darat Perjalanan Dinas Tidak Dilengkapi Dengan Bukti Pertanggungjawaban Sesuai Pengeluaran Minimal Senilai Rp143.355.850,00.	BPK merekomendasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kemenko Perekonomian agar : a) Memberikan pembinaan kepada masing-masing PPK atas ketidakcermatannya dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan pengujian atas tagihan pembayaran belanja perjalanan dinas; dan b) Menginstruksikan masing-masing PPK untuk menagih kepada pelaksana perjalanan dinas dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp143.355.850,00.	TL Semester II 2023: Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sesmenko Perekonomian telah menginstruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Nota Dinas nomor KU.05.01/199/SES.M.EKON/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk: a) Memberikan pembinaan kepada masing-masing PPK atas ketidakcermatannya dan selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan pengujian atas tagihan pembayaran belanja perjalanan dinas; dan b) Menginstruksikan masing-masing PPK untuk menagih kepada pelaksana perjalanan dinas dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp143.355.850,00. Menindaklanjuti Nota Dinas tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran telah menyampaikan Nota Dinas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi III, PPK Deputi V, PPK Deputi VII, dan PPK Deputi G20 melalui Nota Dinas nomor PW.05.02/05/SET.M.EKON.1/09/2023 tanggal 5 September 2023 agar lebih cermat dalam melakukan pengujian atas tagihan pembayaran belanja perjalanan dinas, menagih kepada pelaksana	Desember 2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			perjalanan dinas dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp 143.355.850,00. Catatan: Diminta untuk membuat Surat Teguran dan surat teguran tersebut ditembuskan kepada Inspektur Kemenko Perekonomian. "TL Semester II 2023: PPK telah melakukan penyetoran ke kas negara dengan nomor NTPN sebagai berikut: 1) 6F3DD1JNFUMITDMV sebesar Rp70.000,00 tanggal 10 Januari 2024. 2) 5837655DF0JPP04V sebesar Rp5.229.200,00 tanggal 06 November 2023. 3) AFE6A55DF0K808I1 sebesar Rp38.806.250,00 tanggal 21 November 2023. 4) BFCD148VV64CGMH4 sebesar Rp44.370.000,00 tanggal 06 Desember 2023. 5) 1FCA70N9VRR7G8 sebesar Rp15.740.000,00 tanggal 22 Desember 2023. 6) D567B7QLUGELQK5G sebesar Rp39.140.400,00 tanggal 31 Desember 2023.		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			Total penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp143.355.850,00. Catatan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena terdapat penyetoran pada tahun 2024 (6F3DD1JNFUMITDMV sebesar Rp 70.000,00 tanggal 10 Januari 2024.)"		
5.	Kemenko Perekonomian Berpotensi Tidak Memperoleh Harga Sewa Laptop yang Paling Menguntungkan	BPK merekomendasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kemenko Perekonomian agar: a) Memberikan pembinaan kepada PPBJ atas ketidakcermatannya dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam memperhatikan jenis dan spesifikasi laptop dalam tahap klarifikasi dan negosiasi harga sewa; dan b) Menginstruksikan kepada masing-masing PPK terkait agar berkoordinasi dengan PPBJ dalam upaya menghasilkan harga sewa laptop yang lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.	TL Semester II 2023: Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sesmenko Perekonomian telah menginstruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Nota Dinas nomor KU.05.01/200/SES.M.EKON/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk: a) Memberikan pembinaan kepada PPBJ atas ketidakcermatannya dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam memperhatikan jenis dan spesifikasi laptop dalam tahap klarifikasi dan negosiasi harga sewa; dan b) Menginstruksikan kepada masing-masing PPK terkait agar berkoordinasi dengan PPBJ dalam upaya menghasilkan harga sewa laptop yang lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Plt. Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah	Desember 2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) melalui Nota Dinas nomor PW.05.02/636/SET.M.EKON.4/09/2023 tanggal 1 September 2023 agar memberikan pembinaan kepada PPBJ atas ketidakcermatannya dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam memperhatikan jenis dan spesifikasi laptop dalam tahap klarifikasi dan negoisasi harga sewa. Catatan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum terdapat pembinaan kepada PPBJ "TL Semester II 2023: Menindaklanjuti Nota Dinas nomor KU.05.01/200/SES.M.EKON/08/2023, Kuasa Pengguna Anggaran telah menyampaikan Nota Dinas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Umum, PPK Deputi II, dan PPK Deputi IV melalui Nota Dinas nomor PW.05.02/03/SET.M.EKON.1/09/2023 tanggal 5 September 2023 agar berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dalam upaya menghasilkan harga sewa laptop yang lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			Catatan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena menunggu hasil pembinaan pada tahun berikutnya (LK 2023) terkait sewa laptop"		

**MONITORING TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2021**

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kemenko Perkonomian Belum Memadai	Sesmenko memerintahkan Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang untuk: a. Melakukan inventarisasi BMN Aset Tetap secara berkala termasuk dalam memperbaharui kode ruangan atas BMN Aset Tetap ketika terjadi pemindahan BMN Aset Tetap; b. Menginstruksikan UAKPB untuk melengkapi label kodefikasi seketika BMN telah dicatat pada aplikasi SIMAK-BMN dan membuat perencanaan atas pengadaan label kodefikasi lebih terorganisir agar tidak terjadi kehabisan label Ketika BMN akan ditandai label kodefikasi; dan	Tindak Lanjut Semester II 2022 Sesmenko Bidang Perekonomian telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang melalui surat nomor KU.5.1-846/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar melakukan inventarisasi BMN Aset Tetap secara berkala termasuk dalam memperbaharui kode ruangan atas BMN Aset Tetap ketika terjadi pemindahan BMN Aset Tetap Telah diperoleh dokumen Data pemutakhiran Daftar Barang Ruangan per 5 Januari 2023 dan Daftar penempelan NUP Tahun 2021 keduanya dalam bentuk excel. Usulan Status: Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut Belum diperoleh dokumen yang dapat menunjukkan pelaksanaan inventarisasi BMN Aset Tetap secara berkala (Laporan Inventarisasi BMN Tahun 2022). -- Tindak Lanjut Semester I 2023 Kepala Biro Umum telah menginstruksikan kepada Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan	Desember 2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			melalui surat nomor KU.5.1-499/SET.M.EKON.4/06/2022 tanggal 2 Jun 2022 agar melakukan inventarisasi BMN Aset Tetap secara berkala termasuk dalam memperbaharui kode ruangan atas BMN Aset Tetap ketika terjadi pemindahan BMN Aset Tetap. Telah diperoleh Bukti Dukung Update DBR pada Biro KLIP, Graha Swala, Kabag RT, Kasubag Urdal, KPC-PEN, Loka Kergatama, Lounge Lantai 2, Biro Umum, Staf Rumah Tangga sebanyak 588 BMN Usulan Status: Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut Berdasarkan dokumen yang diperoleh pada tindak lanjut semester I 2023, hanya ada Instruksi dari Kepala Biro Umum kepada Kepala Bagian Rumah Tangga. Berdasarkan bukti dukung penempelan NUP dan Data Pemutakhiran DBR, inventarisasi BMN Aset Tetap belum dimutakhirkan. Bukti cetakan DBR akan disampaikan. Foto label BMN yang telah diinventarisasi akan disampaikan (sesuai cetakan DBR). Tindak Lanjut Semester II 2022 Sesmenko Bidang Perekonomian telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang melalui surat nomor KU.5.1-846/SES.M.EKON/06/2022 tanggal		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			2 September 2022 agar melengkapi label kodefikasi seketika BMN telah dicatat pada aplikasi SIMAK-BMN dan membuat perencanaan atas pengadaan label kodefikasi lebih terorganisir agar tidak terjadi kehabisan label ketika BMN akan ditandai label kodefikasi. Telah diperoleh Daftar penempelan NUP Tahun 2021 dalam bentuk excel. Usulan Status: Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut belum diperoleh foto dokumentasi atas penempelan label kodefikasi BMN dan bukti telah dilakukannya perencanaan yang lebih terorganisir atas pengadaan label kodefikasi agar tidak terjadi kehabisan label ketika BMN akan ditandai label kodefikasi. -- Tindak Lanjut Semester I 2023 Kepala Biro Umum telah menginstruksikan kepada Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan melalui surat nomor KU.5.1-499/SET.M.EKON.4/06/2022 tanggal 2 Jun 2022 agar melakukan inventarisasi BMN Aset Tetap secara berkala termasuk dalam memperbaharui kode ruangan atas BMN Aset Tetap ketika terjadi pemindahan BMN Aset Tetap. Usulan Status: Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			Dokumen POK TA 2023 halaman 8 yang menunjukkan adanya perencanaan/anggaran pengadaan label barcode BMN. Telah disampaikan foto penempelan label BMN. Terdapat Instruksi dari Kepala Biro Umum kepada Kepala Bagian Rumah Tangga terkait inventarisasi BMN Aset Tetap. Telah diperoleh Bukti Dukung berupa POK per Juli 2023 yang menampilkan anggaran pengadaan label barcode BMN sebagai perencanaan sebagai acuan untuk realisasi pengadaan label barcode BMN. Inspektur Kemenko Perekonomian diminta membuat surat pernyataan bahwa satker telah menempel seluruh label BMN dan Inspektur bertanggungjawab jika ada BMN yang belum ditempel label BMN.		
2.	Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Perorangan sebesar Rp3.002.363.636,00 Belum Sesuai dengan Ketentuan	Sesmenko agar: - Menegur KPA agar lebih cermat dalam mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan atas tenaga ahli yang bersifat rutin; - Menegur PPK terkait agar pemilihan tenaga ahli dilakukan secara terbuka yang diikuti oleh beberapa calon penyedia dan kualifikasi atas tenaga ahli lebih umum dan cenderung tidak mengarah kepada satu penyedia sehingga tercipta pemilihan yang transparan; dan	Tindak Lanjut Semester II 2022 Sesmenko Bidang Perekonomian melalui surat nomor KU.5.1-848/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 menginstruksikan agar KPA lebih cermat dalam mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan atas tenaga ahli yang bersifat rutin. Kepala Biro Umum selaku KPA melalui surat nomor KU.5.1500/SET.M.EKON.4/06/2022 tanggal 2 September 2022 menginstruksikan agar PPK KPPIP dan PPK Biro KLIP lebih cermat dalam mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan atas tenaga ahli yang bersifat rutin.	Desember 2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			Usulan Status: Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut Belum diperoleh dokumen yang dapat menunjukkan bahwa KPA sudah lebih cermat dalam mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan atas tenaga ahli yang bersifat rutin -- Tindak Lanjut Semester I 2023 Surat Nomor HM-180/SET.M.EKON.3/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 mengenai permintaan pengadaan jasa konsultansi perorangan TA 2023 ND No.47/PPK.KEG.4538/TA/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 dari PPK Kegiatan 4538 kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa terkait Permintaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan disertai dengan HPS dan KAK. Usulan Status: Belum Sesuai rekomendasi Telah diperoleh dokumen pendukung berupa HPS dan KAK untuk pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan. Tidak ada temuan berulang mengenai Jasa Konsultansi Perorangan pada Pemeriksaan LK TA 2022 Diminta untuk membuat Surat Teguran dan surat teguran tersebut ditembuskan kepada Inspektur Kemenko Perekonomian		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			Tindak Lanjut Semester I Tahun 2024: Sesmenko Perekonomian telah membuat Surat Teguran kepada Kuasa Pengguna Anggaran TA 2021 melalui surat nomor PW.05.02/179.1/SES.M.EKON/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 Tindak Lanjut Semester II 2022 Sesmenko Bidang Perekonomian melalui surat nomor KU.5.1-848/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 menginstruksikan agar KPA melakukan pembinaan kepada PPK terkait agar pemilihan tenaga ahli dilakukan secara terbuka yang diikuti oleh beberapa calon penyedia dan kualifikasi atas tenaga ahli lebih umum dan cenderung tidak mengarah kepada satu penyedia sehingga tercipta pemilihan yang transparan. Kepala Biro Umum selaku KPA melalui surat nomor KU.5.1500/SET.M.EKON.4/06/2022 tanggal 2 September 2022 menginstruksikan PPK KPPIP dan PPK Biro KLIP agar pemilihan tenaga ahli dilakukan secara terbuka yang diikuti oleh beberapa calon penyedia dan kualifikasi atas tenaga ahli lebih umum dan cenderung tidak mengarah kepada satu penyedia sehingga tercipta pemilihan yang transparan. Usulan Status: Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			Belum diperoleh dokumen yang dapat menunjukkan bahwa pemilihan tenaga ahli telah dilakukan secara terbuka yang diikuti oleh beberapa calon penyedia dan kualifikasi atas tenaga ahli lebih umum dan cenderung tidak mengarah kepada satu penyedia sehingga tercipta pemilihan yang transparan. -- Tindak Lanjut Semester I 2023 Surat Nomor HM-180/SET.M.EKON.3/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 mengenai permintaan pengadaan jasa konsultansi perorangan TA 2023 ND No.47/PPK.KEG.4538/TA/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 dari PPK Kegiatan 4538 kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa terkait Permintaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan disertai dengan HPS dan KAK Usulan Status: Belum Sesuai rekomendasi Telah diperoleh dokumen pendukung berupa HPS dan KAK untuk pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Tidak ada temuan berulang mengenai Jasa Konsultansi Perorangan pada Pemeriksaan LK TA 2022		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			Diminta untuk membuat Surat Teguran dan surat teguran tersebut ditembuskan kepada Inspektur Kemenko Perekonomian. Tindak Lanjut Semester I Tahun 2024: Sesmenko Perekonomian telah membuat Surat Teguran kepada 1. PPK Biro KLIP TA 2021 melalui surat nomor PW.05.02/180.1/SES.M.EKON/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 2. PPK KPPIP TA 2021 melalui surat nomor PW.05.02/181.1/SES.M.EKON/06/2024 tanggal 27 Juni 2024		
3.	Belanja Sewa Peralatan Kantor yang Tidak Efisien sebesar Rp610.087.200,00 di Antaranya Terdapat Kelebihan Bayar sebesar Rp2.160.000,00	Sesmenko memerintahkan Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk: a. Lebih cermat dalam merencanakan penganggaran belanja barang dan belanja modal di satuan kerjanya.	Tindak Lanjut Semester II 2022 Sesmenko Bidang Perekonomian telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku KPA melalui surat No. KU.5.1-849/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar lebih cermat dalam merencanakan penganggaran belanja barang dan belanja modal di satuan kerjanya. Usulan Status: Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut Belum diperoleh dokumen yang dapat menunjukkan bahwa KPA telah lebih cermat dalam merencanakan penganggaran belanja barang dan belanja modal di satuan kerjanya.	Desember 2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			-- Tindak Lanjut Semester I 2023 Laporan Reviu RKAKL pada Deputi I-7 dan Sekretariat Kementerian Usulan Status: Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut telah disampaikan RAB dan hasil reviu APIP terhadap RKKL, namun belum ada instruksi atau permintaan dari Biro Umum kepada APIP untuk melakukan reviu		
4.	Terdapat indikasi Pemecahan Kontrak atas beberapa paket Belanja Modal pada Biro Umum sebesar Rp4.179.105.810,00	Sesmenko memerintahkan Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk: a. Menegur PPK Biro Umum agar lebih cermat dalam menyusun HPS serta agar tidak memecah paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan; dan b. Menginstruksikan PPK untuk mempertanggungjawabkan selisih harga pengadaan barang sebesar Rp123.907.500,00	Tindak Lanjut Semester II 2022 a. Surat Sekretaris Kementerian Koordinator kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KU.5.1- 853/SES.M.EKON/06/2022), perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK TA 2021, yang meminta Kepala Biro Umum untuk diantaranya: - Memberikan pembinaan kepada PPK Biro Umum agar lebih cermat dalam menyusun HPS serta agar tidak memecah paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan; dan Usulan Status: Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut Surat KU.5.1- 853/SES.M.EKON/06/2022 tersebut bukan merupakan surat teguran. Belum diperoleh dokumen/bukti bahwa PPK Biro Umum telah terbukti lebih cermat dalam	Desember 2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			menyusun HPS agar tidak terindikasi pemecahan kontrak (pemaketan di aplikasi SIRUP) -- Tindak Lanjut Semester I 2023 Surat dari Kepala Biro Umum kepada PPK Biro Umum Nomor PW.05.02/538/SET.M.EKON.4/07/2023 tanggal 10 Juli 2023 Usulan Status: Belum Sesuai rekomendasi Tidak ditemukan permasalahan yang sama pada pemeriksaan LK TA 2022. Diminta untuk membuat Surat Teguran dan surat teguran tersebut ditembuskan kepada Inspektur Kemenko Perekonomian. Tindak Lanjut Semester I Tahun 2024 Plt. Kepala Biro Umum Kemenko Perekonomian telah membuat Surat Teguran kepada PPK Biro Umum TA 2021 melalui surat nomor PW.05.02/118/SET.M.EKON.4/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 Tindak Lanjut Semester II 2022		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			a. Surat Sekretaris Kementerian Koordinator kepada Kepala Biro Umum Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KU.5.1- 853/SES.M.EKON/06/2022), perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK TA 2021, yang meminta Kepala Biro Umum untuk diantaranya: - Meningkatkan pengendalian dan pengawasan di satuan kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. Surat Kepala Biro Umum kepada PPK Biro Umum (Nomor KU.5. 1-504 /SET.M.EKON.4/06/2022): - Meningkatkan pengendalian dan pengawasan di satuan kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; - Memberikan pembinaan kepada PPK Biro Umum agar lebih cermat dalam menyusun HPS serta agar tidak memecah paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan; dan - Menginstruksikan PPK Biro Umum untuk menyampaikan penjelasan dan bukti pendukung pertanggungjawaban kepada pihak Inspektorat atas selisih harga pengadaan barang sebesar Rp123.907.500,00 Tindak Lanjut Semester II 2022 a. Surat Sekretaris Kementerian Koordinator kepada Kepala Biro Umum Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KU.5.1- 853/SES.M.EKON/06/2022),		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK TA 2021, yang meminta Kepala Biro Umum untuk diantaranya: - Meningkatkan pengendalian dan pengawasan di satuan kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. Surat Kepala Biro Umum kepada PPK Biro Umum (Nomor KU.5. 1-504 /SET.M.EKON.4/06/2022): - Meningkatkan pengendalian dan pengawasan di satuan kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; - Memberikan pembinaan kepada PPK Biro Umum agar lebih cermat dalam menyusun HPS serta agar tidak memecah paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan; dan - Menginstruksikan PPK Biro Umum untuk menyampaikan penjelasan dan bukti pendukung pertanggungjawaban kepada pihak Inspektorat atas selisih harga pengadaan barang sebesar Rp123.907.500,00 Usulan Status: Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut Bukti dari PPK Biro Umum kepada Inspektorat tentang penyampaian penjelasan dan bukti pendukung pertanggungjawaban harga meubelair (tanggal 30 Desember 2022). Akan dibahas oleh tim penelaah		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			-- Tindak Lanjut Semester I 2023 Nota Dinas dari Kepala Biro Umum Kepada Inspektorat PW.02.01/988/SER.M.EKON.4/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 terkait penyampaian penjelasan dan bukti pendukung pertanggungjawaban harga meubelair Nota Dinas dari Inspektur kepada Kepala Biro Umum No.PW.03.03/100.A/INS.M.EKON/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal penyampaian hasil revidu pertanggungjawaban Harga Satuan Peralatan Kantor (Meubelair) Tahun 2021. Berdasar ND Inspektur kepada Kepala Biro Umum No.PW.03.03/100.A/INS.M.EKON/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal penyampaian hasil revidu pertanggungjawaban Harga Satuan Peralatan Kantor (Meubelair) Tahun 2021. Tim revidu Inspektorat Kemenko Perekonomian merekomendasikan kepada kepala Biro Umum untuk: 1. Menegur PPK Biro Umum agar lebih cermat dalam menyusun HPS dan kontrak; 2. Menginstruksikan PPK untuk menagih kelebihan pembayaran atas belanja modal sebesar Rp2.375.000.		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			Per Semester 1 Tahun 2023 belum ada penyetoran sesuai yang direkomendasikan Inspektorat Kemenko Perekonomian Rp2.375.000 Diminta untuk membuat Surat Teguran dan surat teguran tersebut ditembuskan kepada Inspektur Kemenko Perekonomian.		
5.	Terdapat Pemecahan Paket, Kesalahan Anggaran dan Realisasi, Serta Kekurangan Volume Sebesar Rp75.599.000,00 atas Enam Paket Pekerjaan Canopy	Sesmenko memerintahkan Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk: a. Lebih cermat dalam merencanakan penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal; dan b. Menginstruksikan PPK Sekretariat I agar lebih cermat dalam melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang/Jasa	Tindak Lanjut Semester II 2022 a. Surat Sekretaris Kementerian Koordinator kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KU.5.1- 854/SES.M.EKON/06/2022): - Lebih cermat dalam merencanakan penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal; dan - Lebih cermat dalam melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang/Jasa b. Surat Kepala Biro Umum kepada PPK Biro Umum (Nomor KU.5. 1-505/SET.M.EKON.4/06/2022): - Lebih cermat dalam merencanakan penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal; dan - Lebih cermat dalam melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang/Jasa Usulan Status: Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Desember 2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			Belum diperoleh dokumen yang dapat menunjukkan bahwa Kepala Biro Umum sudah Lebih cermat dalam merencanakan penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal -- Tindak Lanjut Semester I 2023 Tidak ada dokumen tindak lanjut baru pada semester I 2023 Berdasarkan pemeriksaan LK TA 2022 tidak ditemukan permasalahan terkait pemecahan paket dan kesalahan anggaran belanja barang dan belanja modal Usulan Status: Belum Sesuai rekomendasi Berdasarkan pemeriksaan LK TA 2022 tidak ditemukan permasalahan terkait pemecahan paket dan kesalahan anggaran belanja barang dan belanja modal. ▪ Diminta untuk membuat Surat Teguran dan surat teguran tersebut ditembuskan kepada Inspektur Kemenko Perekonomian Tindak Lanjut Semester II 2022		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			a. Surat Sekretaris Kementerian Koordinator kepada Kepala Biro Umum Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KU.5.1- 854/SES.M.EKON/06/2022): - Lebih cermat dalam merencanakan penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal; dan - Lebih cermat dalam melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang/Jasa b. Surat Kepala Biro Umum kepada PPK Biro Umum (Nomor KU.5. 1-505 /SET.M.EKON.4/06/2022): - Lebih cermat dalam merencanakan penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal; dan - Lebih cermat dalam melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang/Jasa Usulan Status: Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut Belum diperoleh dokumen yang dapat menunjukkan bahwa PPK Sekretariat I sudah lebih cermat dalam melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang/Jasa -- Tindak Lanjut Semester I 2023		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			Tidak ada dokumen tindak lanjut baru pada semester I 2023. Berdasarkan pemeriksaan LK TA 2022 tidak ditemukan permasalahan terkait pengadaan barang pada Sekretariat I Usulan Status: Belum Sesuai Rekomendasi Berdasarkan pemeriksaan LK TA 2022 tidak ditemukan permasalahan terkait pengadaan barang pada Sekretariat I. Diminta untuk membuat Surat Teguran dan surat teguran tersebut ditembuskan kepada Inspektur Kemenko Perekonomian. Tindak Lanjut Semester I 2024 Sesmenko Perekonomian telah membuat Surat Teguran kepada PPK Sekretariat I TA 2021 melalui surat nomor PW.05.02/182.2/SES.M.EKON/06/2024 tanggal 27 Juni 2024		

**MONITORING TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2020**

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Tanggapan dan Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Ket
1.	Belanja Jasa Konsultansi Pelaksanaan Diagnosis Kesiapan Pendistribusian Vaksin Covid-19 untuk Indonesia Sehat Tahun 2020 Belum Sesuai dengan Ketentuan	Sesmenko agar: 1. Memberikan teguran secara tertulis kepada PPK untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian kontrak; dan 2. Melakukan pengaturan di Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) terkait pengendalian pertanggungjawaban kegiatan dalam pengadaan jasa konsultansi.	Berdasarkan rekomendasi dimaksud, dilakukan langkah: ▪ Menko Perekonomian atas nama Sesmenko Perekonomian telah mengintruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan 5032 melalui surat Nomor KU.5.1-153/M.EKON/06/2021 tgl 16 September 2021, untuk: 1. lebih cermat dalam melakukan pengendalian kontrak; dan 2. Melakukan pengaturan di Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) terkait pengendalian pertanggungjawaban kegiatan dalam pengadaan jasa konsultansi, untuk menghindari terjadinya permasalahan yang sama pada periode berikutnya. Menko Perekonomian atas nama Sesmenko Perekonomian telah mengintruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan 5032 melalui surat Nomor KU.5.1-153/M.EKON/06/2021 tgl 16 September 2021, untuk: 1. lebih cermat dalam melakukan pengendalian kontrak; dan 2. Melakukan pengaturan di Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) terkait pengendalian pertanggungjawaban kegiatan dalam pengadaan jasa konsultansi, untuk menghindari terjadinya permasalahan yang sama pada periode berikutnya. Dalam rangka pengendalian dan pertanggungjawaban kegiatan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, bahwasanya dilakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis sebagai berikut: 1. Pembinaan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Persiapan	Desember 2024	Belum sesuai

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Tanggapan dan Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Ket
			Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 23 September 2021, yang ditujukan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Staf PPK dan Seluruh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) melalui surat Nomor BM.1/203/SET.M.EKON.4/09/2021 Tanggal 20 September 2021; 2. Pembinaan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 24 September 2021, yang ditujukan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Staf PPK dan Seluruh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dan Pokja melalui surat Nomor BM.1/204/SET.M.EKON.4/09/2021 Tanggal 20 September 2021. Namun pada tahun 2021, belum ada pengadaan jasa konsultasi serupa sehingga belum bisa diuji kontraknya Tindak lanjut Semester II 2022: 1. Beberapa dokumen penjelasan tertulis terkait pengendalian PPK (dokumen pertama tanggal 17 Januari 2021, dan kedua 16 Juni 2021, serta dokumen lainnya). Akan ditelaah lebih lanjut Tindak Lanjut Semester II Tahun 2022: -- Tindak Lanjut Semester I 2023 Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK No.PW.5/54/SET.M.EKON.4/01/2023 tanggal 17 Januari 2023 dengan lampiran Bimtek yang menyatakan bahwa pengaturan pengendalian pertanggungjawaban pengadaan jasa konsultasi terkait telah dilakukan sesuai dengan jenis		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Tanggapan dan Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Ket
			kontrak dan pengendalian lain yang tercantum di KAK dan pengendalian lain. Usulan Status: Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut Dokumen belum menjelaskan bahwa telah dilakukan pengaturan di Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) terkait pengendalian pertanggungjawaban kegiatan dalam pengadaan jasa konsultasi. Dokumen tersebut hanya membahas mengenai landasan hukum pengadaan jasa konsultasi nonkonstruksi di antaranya kontrak lumpsum, kontrak waktu penugasan dan kontrak payung. Belum ada dokumen yang menunjukkan bahwa telah dilakukan perbaikan SSUK.		

Lampiran XIV Capaian Rincian Output



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO

periode : DESEMBER satker : 427752

No	Satker	Nama Satker	BAES1	Periode	Program	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)						GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan	Terkonfirmasi	Validasi	Catatan	Tanggal Rekam Di Sakti	Tanggal Kirim Di Sakti	Action			
									Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini										Catatan	Validasi		
														RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO												TPCRO (%)	PCRO (%)
1	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2491	ABA001	Rekomendasi Kebijakan Terkait Ekosistem Ekonomi Digital	1,678,580,000	1,382,304,317	82.35	1	RekomendasiKebijakan	1.00	-94.39	3.28	1.0000	1.00	100.00	17.75	00	Non PN	Proses capaian output selesai		00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
2	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2491	ABA002	Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2023-2030	11,127,035,000	8,499,988,181	76.39	1	RekomendasiKebijakan	1.00	-84.48	0.00	1.0000	1.00	100.00	23.76	01	Non PN	Proses capaian output selesai		00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
3	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2491	EBA001	Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan UMKM	500,000,000	378,327,548	75.67	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	24.33	02	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui		00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
4	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2491	EBA002	Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan UMKM	4,821,419,000	4,138,202,567	85.83	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	14.39	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui		00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
5	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2492	ABA001	Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Moneter dan Sektor Eksternal yang Mendukung Terjaganya Inflasi Di Kisaran Sasaran	1,009,501,000	842,427,035	83.45	3	RekomendasiKebijakan	-2.00	-88.63	0.04	3.0000	3.00	100.00	16.58	00	Non PN	Proses capaian output selesai		00 - Data Valid		06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
6	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2492	ABA002	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Moneter dan Sektor Eksternal	984,499,000	838,336,959	85.15	3	RekomendasiKebijakan	-2.00	-88.63	0.04	3.0000	3.00	100.00	14.86	00	Non PN	Proses capaian output selesai		00 - Data Valid		06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
7	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2492	CCL001	Layanan Sarana Sistem Informasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)	6,000,000	5,780,974	96.35	1	Unit	0.00	-90.63	0.04	1.0000	1.00	100.00	3.65	00	Non PN	Proses capaian output selesai		00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
8	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2493	ABA001	Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Efektifitas Kebijakan Ekonomi	5,000,000,000	2,218,392,975	44.37	2	RekomendasiKebijakan	1.00	-89.02	22.56	2.0000	2.00	100.00	55.63	07	Non PN	Proses capaian output selesai		00 - Data Valid		06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

9	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2499	ABA001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pasar Dalam Negeri	1,000,000,000	768,056,421	76.81	1	RekomendasiKebijakan	1.00	-89.50	9.50	1.0000	1.00	100.00	23.19	07	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
10	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2499	ABA002	Rekomendasi Kebijakan Standardisasi dan Sertifikasi Produk	500,000,000	396,609,207	79.32	1	RekomendasiKebijakan	1.00	-90.12	8.88	1.0000	1.00	100.00	20.68	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
11	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2499	ABA003	Rekomendasi Kebijakan terkait Program Optimalisasi Hak kekayaan intelektual (HKI) untuk mendukung Inovasi Produk Nasional	500,000,000	499,997,422	100.00	1	RekomendasiKebijakan	1.00	-80.76	10.91	1.0000	1.00	100.00	0.06	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
12	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2500	ABA001	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Logistik Nasional	1,000,000,000	997,683,995	99.77	2	RekomendasiKebijakan	-1.00	-98.00	0.00	2.0000	2.00	100.00	0.23	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
13	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2500	ABA002	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Konektivitas Ekonomi, Desa, Kota, dan Pasar Global	1,000,000,000	790,529,249	79.05	5	RekomendasiKebijakan	-4.00	-95.00	0.00	5.0000	5.00	100.00	21.41	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
14	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2501	ABA001	Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Bidang Perekonomian Daerah dan Sektor Riil	500,000,000	432,771,697	86.55	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-99.00	0.00	1.0000	1.00	100.00	13.45	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
15	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2501	ABA002	Rekomendasi Kebijakan terkait Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	1,000,000,000	758,510,036	75.85	3	RekomendasiKebijakan	1.00	-88.39	7.76	3.0000	3.00	100.00	24.15	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
16	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2503	ABA001	Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Bidang Fiskal	1,000,003,000	969,757,633	96.98	3	RekomendasiKebijakan	1.00	-84.84	11.57	3.0000	3.00	100.00	3.02	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
17	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2503	ABA002	Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal	999,997,000	643,271,391	64.33	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-93.51	0.00	1.0000	1.00	100.00	35.67	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
18	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2503	EBA001	Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan	495,955,000	396,592,441	79.97	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	20.03	02	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
19	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2503	EBA002	Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan	2,504,045,000	2,062,080,944	82.35	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	17.71	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

20	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2505	ABK001	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	999,999,000	722,132,829	72.21	1	RekomendasiKebijakan	1.00	-89.85	15.85	1.0000	1.00	100.00	27.79	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
21	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2505	ABK002	Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelesaian Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM	500,001,000	492,231,339	98.45	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-99.00	10.00	1.0000	1.00	100.00	1.55	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
22	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2510	ABA001	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika Pasifik	1,132,373,000	568,220,141	50.18	2	RekomendasiKebijakan	0.00	-98.00	0.00	2.0000	2.00	100.00	49.82	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
23	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2510	ABA002	Rekomendasi Persiapan Forum bilateral Amerika Pasifik	471,911,000	418,162,095	88.61	2	RekomendasiKebijakan	-1.00	-89.63	5.37	2.0000	2.00	100.00	11.39	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
24	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2510	ABA003	Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan	1,515,716,000	1,514,994,214	99.95	2	RekomendasiKebijakan	-1.00	-98.00	0.00	2.0000	2.00	100.00	0.05	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
25	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2511	ABA001	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia	773,535,000	598,514,031	77.37	2	RekomendasiKebijakan	1.00	-88.11	9.17	2.0000	2.00	100.00	22.63	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
26	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2511	ABA002	Rekomendasi Persiapan Forum bilateral Asia	1,306,465,000	996,428,597	76.27	4	RekomendasiKebijakan	1.00	-86.11	5.78	4.0000	4.00	100.00	23.73	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
27	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2511	EBA001	Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional	500,000,000	370,914,369	74.18	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	25.82	02	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
28	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2511	EBA002	Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional	2,500,000,000	2,109,276,199	84.37	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	15.63	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
29	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2512	ABA001	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah	1,013,751,000	750,058,697	73.99	3	RekomendasiKebijakan	1.00	-94.35	49.95	3.0000	3.00	100.00	26.01	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
30	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2512	ABA002	Rekomendasi Persiapan Forum bilateral Eropa, Afrika dan Timur Tengah	400,000,000	378,895,821	94.72	4	RekomendasiKebijakan	0.00	-96.00	45.75	4.0000	4.00	100.00	5.28	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

31	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2512	ABA003	Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan	86,249,000	76,300,427	88.47	1	Rekomendasi Kebijakan	0.00	-82.35	0.00	1.0000	1.00	100.00	11.53	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
32	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2513	ABA001	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral	1,288,911,000	999,119,567	77.52	2	Rekomendasi Kebijakan	-1.00	-98.00	0.00	2.0000	2.00	100.00	22.48	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
33	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2513	ABA002	Rekomendasi Kebijakan Implementasi Joint Crediting Mechanism (JCM)	294,189,000	294,083,715	99.96	2	Rekomendasi Kebijakan	-1.00	-89.63	0.00	2.0000	2.00	100.00	0.04	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
34	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2513	ABA003	Rekomendasi dalam Penguatan Kepemimpinan Indonesia pada Forum Internasional	16,900,000	16,733,000	99.01	1	Rekomendasi Kebijakan	1.00	-90.63	0.00	1.0000	1.00	100.00	0.99	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
35	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2514	ABA001	Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional	1,500,000,000	1,483,726,295	98.92	3	Rekomendasi Kebijakan	0.00	-88.65	0.00	3.0000	3.00	100.00	1.08	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
36	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2514	ABA002	Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan Internasional	191,696,000	191,419,884	99.86	1	Rekomendasi Kebijakan	-2.00	-88.15	0.00	1.0000	1.00	100.00	0.14	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
37	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2514	ABA003	Rekomendasi dalam Penguatan Kepemimpinan Indonesia dalam Forum Kerja Sama Ekonomi Internasional	1,508,304,000	1,036,861,886	68.74	2	Rekomendasi Kebijakan	-3.00	-98.00	1.68	2.0000	2.00	100.00	31.26	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
38	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2516	ABR001	Rekomendasi Kebijakan Stabilitas Harga Pangan	2,140,643,000	1,180,539,242	55.15	5	Rekomendasi Kebijakan	4.00	-87.48	6.64	5.0000	5.00	100.00	45.00	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
39	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2516	ABR002	Rekomendasi Kebijakan yang terkait Produksi, Cadangan, Distribusi dan Konsumsi Pangan	1,777,179,000	1,060,508,556	59.67	8	Rekomendasi Kebijakan	1.00	-84.48	6.64	8.0000	8.00	100.00	40.71	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
40	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2516	ABR003	Rekomendasi Kebijakan terkait Program Pengembangan Pangan Alternatif dan Peningkatan Ekspor	408,562,000	408,560,720	100.00	2	Rekomendasi Kebijakan	1.00	-90.48	6.64	2.0000	2.00	100.00	0.00	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
41	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2516	EBA001	Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis	805,925,000	784,922,577	97.39	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	2.61	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

42	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2516	EBA002	Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis	2,844,319,000	2,320,087,366	81.57	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	18.43	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
43	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2518	ABA001	Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	1,000,436,000	865,006,259	86.46	2	RekomendasiKebijakan	1.00	-89.70	12.38	2.0000	2.00	100.00	14.33	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
44	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2518	ABA002	Rekomendasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat	999,564,000	728,503,908	72.88	2	RekomendasiKebijakan	0.00	-90.96	0.00	2.0000	2.00	100.00	27.12	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
45	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2519	ABK001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri	889,563,000	526,140,439	59.15	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-90.13	0.43	1.0000	1.00	100.00	40.85	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
46	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2519	PBK001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor	900,000,000	895,546,229	99.51	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-99.00	0.10	1.0000	1.00	100.00	0.54	00	PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
47	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2519	PBK002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor	700,000,000	697,069,973	99.58	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-90.76	0.00	1.0000	1.00	100.00	0.49	00	PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
48	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2519	PBK003	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi	900,000,000	836,720,474	92.97	1	RekomendasiKebijakan	1.00	-90.76	3.18	1.0000	1.00	100.00	7.03	01	PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
49	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2520	ABT001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang	500,000,000	397,497,681	79.50	2	RekomendasiKebijakan	1.00	-91.35	0.61	2.0000	2.00	100.00	20.50	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
50	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2520	ABT002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanahan	500,000,000	326,138,345	65.23	2	RekomendasiKebijakan	0.00	-88.34	23.52	2.0000	2.00	100.00	34.77	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
51	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2520	ABT003	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Reforma Agraria (Penetapan Objek TORA, Redistribusi TORA, Legalisasi Aset, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemberdayaan Tanah dan Subjek RA) untuk mendukung Program Pemerataan Ekonomi (PPE)	3,500,000,000	2,075,625,399	59.30	3	RekomendasiKebijakan	-1.00	-86.51	22.35	3.0000	3.00	100.00	40.70	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
52	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2521	ABB001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitas Perdagangan	500,000,000	383,014,731	76.60	1	RekomendasiKebijakan	1.00	-90.64	7.19	1.0000	1.00	100.00	23.40	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

53	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2521	ABB002	Rekomendasi Kebijakan terkait Sistem Monitoring Pengendalian Impor dan Ekspor Terintegrasi	500,000,000	305,578,320	61.12	1	RekomendasiKebijakan	1.00	-91.24	7.76	1.0000	1.00	100.00	38.88	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
54	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2521	PBB001	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bermilai Tambah Tinggi	1,000,000,000	968,748,347	96.87	1	RekomendasiKebijakan	1.00	-91.00	8.22	1.0000	1.00	100.00	3.15	00	PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
55	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2521	PBB002	Rekomendasi Kebijakan Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional	1,000,000,000	868,883,184	86.89	1	RekomendasiKebijakan	1.00	-91.01	7.99	1.0000	1.00	100.00	13.11	01	PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
56	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2524	ABR001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Peternakan	781,937,000	722,674,218	92.42	5	RekomendasiKebijakan	-2.00	-95.00	0.00	5.0000	5.00	100.00	7.58	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
57	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2524	ABR002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perikanan	675,522,000	532,291,701	78.80	4	RekomendasiKebijakan	-2.00	-85.63	21.77	4.0000	4.00	100.00	21.20	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
58	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2524	ABR003	Rekomendasi Kebijakan terkait Peningkatan Populasi dan Produktifitas Sapi Potong dan Sapi Perah	499,006,000	346,429,142	69.42	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-99.00	11.49	1.0000	1.00	100.00	30.58	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
59	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2525	ABR001	Rekomendasi Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)	2,978,544,000	2,943,555,327	98.83	1	RekomendasiKebijakan	-8.00	-99.00	1.11	1.0000	1.00	100.00	1.20	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
60	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2525	ABR002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan	1,497,682,000	1,455,909,036	97.21	9	RekomendasiKebijakan	-1.00	-82.63	3.87	9.0000	9.00	100.00	2.79	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
61	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2525	ABR003	Rekomendasi Kebijakan terkait Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit Berkelanjutan	436,916,000	436,070,675	99.81	1	RekomendasiKebijakan	-1.00	-99.00	1.35	1.0000	1.00	100.00	0.19	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
62	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2526	ABR001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kemiraaan Hulu Hilir Subsektor Hortikultura	999,870,000	825,848,321	82.60	5	RekomendasiKebijakan	-4.00	-95.00	0.10	5.0000	5.00	100.00	17.41	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
63	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2526	ABR002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor	7,653,629,000	767,443,165	10.03	8	RekomendasiKebijakan	7.00	-80.74	5.79	8.0000	8.00	100.00	89.97	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

64	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2527	ABF001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Pembangunan	500,000,000	282,659,671	56.53	2	RekomendasiKebijakan	0.00	-88.12	9.08	2.0000	2.00	100.00	43.47	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
65	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2527	ABF002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemanfaatan Pembangunan	500,000,000	299,518,057	59.90	2	RekomendasiKebijakan	-1.00	-86.86	22.51	2.0000	2.00	100.00	40.10	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
66	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2528	ABR001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Arah Fungsi Lahan Sawah dan Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi	492,997,000	414,487,433	84.08	2	RekomendasiKebijakan	-2.00	-89.63	0.00	2.0000	2.00	100.00	15.99	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
67	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2528	ABR002	Rekomendasi Kebijakan Digitalisasi Penebusan Pupuk Bersubsidi dan Subsidi dan Subsidi Langsung ke Petani (SLP)	1,147,050,000	926,648,228	80.79	3	RekomendasiKebijakan	-2.00	-97.00	0.00	3.0000	3.00	100.00	20.15	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
68	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	2528	ABR003	Rekomendasi Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis	302,715,000	246,778,160	81.52	2	RekomendasiKebijakan	-1.00	-89.63	0.00	2.0000	2.00	100.00	18.48	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
69	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4539	ABA001	Rekomendasi Kebijakan Keuangan Inklusif	4,490,521,000	4,180,655,766	93.10	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-99.00	0.00	1.0000	1.00	100.00	6.90	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
70	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4539	ABA002	Rekomendasi Kebijakan Keuangan Syariah	500,000,000	413,404,100	82.68	2	RekomendasiKebijakan	0.00	-98.00	0.00	2.0000	2.00	100.00	17.32	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
71	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4539	CCL001	Layanan Sarana Sistem Informasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)	9,479,000	9,478,290	99.99	1	Unit	0.00	-98.50	6.66	1.0000	1.00	100.00	0.01	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
72	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4540	ABA001	Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN Sektor Niaga dan Transportasi	900,000,000	844,347,758	93.82	2	RekomendasiKebijakan	1.00	-88.62	4.66	2.0000	2.00	100.00	6.18	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
73	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4540	ABA002	Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Riset dan Inovasi Sektor Niaga dan Transportasi	100,000,000	82,202,893	82.20	2	RekomendasiKebijakan	-2.00	-87.86	2.68	2.0000	2.00	100.00	17.80	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
74	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4541	ABA001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Restrukturisasi, Pengembangan, dan Pembiayaan BUMN Sektor Utilitas dan Industri Manufaktur	700,000,000	669,908,818	95.70	2	RekomendasiKebijakan	-1.00	-89.36	5.89	2.0000	2.00	100.00	4.30	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
75	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4541	ABA002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Riset dan Inovasi Sektor Utilitas dan Industri Manufaktur	300,000,000	272,093,390	90.70	2	RekomendasiKebijakan	1.00	-87.74	12.68	2.0000	2.00	100.00	9.30	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

76	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4542	ABA001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Restrukturisasi, Pengembangan dan Pembiayaan BUMN Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata	500,000,000	421,384,815	84.28	2	RekomendasiKebijakan	2.00	-88.50	13.47	2.0000	2.00	100.00	15.72	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
77	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4542	ABA002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Riset dan Inovasi Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata	500,000,000	366,635,962	73.33	2	RekomendasiKebijakan	0.00	-89.00	14.75	2.0000	2.00	100.00	26.67	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
78	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4542	ABA003	Rekomendasi Kebijakan Perdagangan dan Pajak Karbon	600,000,000	462,116,546	77.02	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-89.14	25.02	1.0000	1.00	100.00	22.98	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
79	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4543	ABA001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Industri Informasi	900,000,000	644,262,898	71.58	2	RekomendasiKebijakan	2.00	-89.23	18.89	2.0000	2.00	100.00	28.42	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
80	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4543	ABA002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Riset dan Inovasi Bidang Jasa keuangan dan Industri Informasi	100,000,000	65,363,152	65.36	2	RekomendasiKebijakan	1.00	-88.01	13.96	2.0000	2.00	100.00	34.64	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
81	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4543	ABA003	Rekomendasi Kebijakan terkait Program Pengembangan Usaha Bullion	500,000,000	384,230,950	76.85	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-87.98	15.33	1.0000	1.00	100.00	23.15	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
82	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4544	ABA001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Restrukturisasi, Pengembangan, dan Pembiayaan BUMN Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia	1,200,000,000	757,276,546	63.11	2	RekomendasiKebijakan	-2.00	-88.77	13.67	2.0000	2.00	100.00	37.02	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
83	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4544	ABA002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Riset dan Inovasi Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia	1,500,000,000	780,397,706	52.03	2	RekomendasiKebijakan	-4.00	-87.14	12.19	2.0000	2.00	100.00	47.97	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
84	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4544	ABA003	Rekomendasi Kebijakan terkait Program Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati	1,000,000,000	717,352,327	71.74	1	RekomendasiKebijakan	1.00	-88.00	17.00	1.0000	1.00	100.00	28.26	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
85	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4544	ABA004	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Petrokimia	300,000,000	240,493,107	80.16	1	RekomendasiKebijakan	1.00	-88.49	22.74	1.0000	1.00	100.00	19.84	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

86	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4544	EBA001	Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi	500,000,000	341,542,528	68.31	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	31.69	02	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
87	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4544	EBA002	Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi	2,500,000,000	1,996,061,594	79.84	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	20.16	02	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
88	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4545	ABK001	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	500,000,000	338,011,709	67.60	1	RekomendasiKebijakan	1.00	-91.00	10.00	1.0000	1.00	100.00	32.91	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
89	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4545	PBK001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	1,500,000,000	1,267,041,115	84.47	1	RekomendasiKebijakan	1.00	-91.40	7.60	1.0000	1.00	100.00	15.94	01	PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
90	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4546	ABA001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Daya Saing Sektoral	1,000,000,000	870,228,826	87.02	1	RekomendasiKebijakan	1.00	-89.53	0.00	1.0000	1.00	100.00	12.98	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
91	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4546	ABA002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Daya Saing Daerah	1,000,000,000	894,089,565	89.41	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-99.00	0.00	1.0000	1.00	100.00	10.59	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
92	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4546	EBA001	Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	500,000,000	446,605,233	89.32	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	10.68	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
93	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4546	EBA002	Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	2,500,000,000	2,159,664,475	86.39	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	13.61	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
94	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4547	ABP001	Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Barat Indonesia	500,000,000	342,972,822	68.59	2	RekomendasiKebijakan	-1.00	-92.00	19.00	2.0000	2.00	100.00	31.41	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

95	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4547	ABP002	Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Timur Indonesia	500,000,000	325,633,868	65.13	2	RekomendasiKebijakan	0.00	-92.00	14.67	2.0000	2.00	100.00	34.87	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
96	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4547	EBA001	Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	500,000,000	404,327,319	80.87	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	19.13	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
97	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4547	EBA002	Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	2,685,000,000	2,158,105,121	80.38	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	19.62	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
98	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4548	ABP001	Rekomendasi Kebijakan Terkait Penyelesaian Kebijakan Kawasan Perkotaan di Indonesia	720,406,000	608,338,840	84.44	2	RekomendasiKebijakan	0.00	-89.63	21.53	2.0000	2.00	100.00	15.56	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
99	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4548	ABP002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Kawasan	386,447,000	299,512,308	77.50	6	RekomendasiKebijakan	-1.00	-94.00	24.35	6.0000	6.00	100.00	22.50	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
100	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4548	ABP003	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Transformasi Kawasan Perkotaan	393,147,000	223,238,169	56.78	1	RekomendasiKebijakan	-5.00	-90.63	21.03	1.0000	1.00	100.00	43.22	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
101	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4549	ABP001	Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pemanfaatan Teknologi	500,000,000	412,987,690	82.60	2	RekomendasiKebijakan	1.00	-87.86	0.00	2.0000	2.00	100.00	17.40	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
102	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4549	ABP002	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Hijau untuk Percepatan Transisi Energi dan Pengembangan Wilayah	400,000,000	283,573,505	70.89	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-89.52	13.92	1.0000	1.00	100.00	29.11	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
103	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4549	ABS001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kebencanaan Untuk Pengembangan Wilayah	500,000,000	434,060,345	86.81	2	RekomendasiKebijakan	0.00	-98.00	0.00	2.0000	2.00	100.00	13.19	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
104	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4549	ABS002	Rekomendasi Kebijakan Valuasi Ekonomi Kebencanaan di Proyek Strategis Nasional (PSN)	400,000,000	306,898,580	76.72	1	RekomendasiKebijakan	-1.00	-89.52	9.67	1.0000	1.00	100.00	23.28	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

105	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	4550	PBK001	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja	10,200,000,000	9,311,205,605	91.29	2	RekomendasiKebijakan	1.00	-87.69	16.63	2.0000	2.00	100.00	8.72	01	PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
106	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	5032	ABA001	Rekomendasi Implementasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi	13,954,113,000	13,738,320,902	98.45	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-99.00	10.09	1.0000	1.00	100.00	1.62	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
107	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	5032	ABA003	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Gerakan Indonesia Mandiri	6,345,349,000	4,075,387,165	64.23	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-99.00	16.14	1.0000	1.00	100.00	35.77	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
108	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	5032	ABA005	Rekomendasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	8,522,595,000	3,014,866,216	35.37	1	RekomendasiKebijakan	1.00	-89.61	31.65	1.0000	1.00	100.00	64.63	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
109	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	5200	ABP001	Rekomendasi Kebijakan Kompilasi, Integrasi, Pemutakhiran dan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang dalam Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta	11,000,000,000	9,191,486,398	83.56	3	RekomendasiKebijakan	0.00	-85.19	6.68	3.0000	3.00	100.00	16.44	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
110	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	5227	ABK001	Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1,012,380,000	829,456,468	81.93	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-90.96	0.00	1.0000	1.00	100.00	18.09	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
111	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	5227	ABK002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan	987,620,000	771,746,699	78.14	1	RekomendasiKebijakan	1.00	-90.21	0.00	1.0000	1.00	100.00	21.86	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
112	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	5229	ABK001	Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1,250,000,000	1,025,509,185	82.04	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-90.64	0.03	1.0000	1.00	100.00	17.96	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
113	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	5229	ABK002	Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Kartu Prakerja	1,250,000,000	1,004,567,009	80.37	1	RekomendasiKebijakan	1.00	-90.64	8.36	1.0000	1.00	100.00	19.63	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
114	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	5266	ABF001	Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)	10,513,253,000	10,443,301,389	99.33	2	RekomendasiKebijakan	1.00	-98.00	4.26	2.0000	2.00	100.00	0.67	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

115	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	5266	ABF002	Rekomendasi Kebijakan Dukungan Pengembangan Wilayah Berdasarkan Infrastruktur Eksisting, Pembangunan yang Berjalan dan Perencanaan Infrastruktur Kedepan	3,661,614,000	2,503,370,322	68.37	3	RekomendasiKebijakan	0.00	-87.52	8.13	3.0000	3.00	100.00	31.63	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
116	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	5266	ABF003	Rekomendasi Kebijakan Persiapan Pembangunan Proyek Strategis di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat sesuai Perpres 79/2019, Perpres 80/2019 dan Perpres 87/2021	3,316,369,000	1,732,726,167	52.25	3	RekomendasiKebijakan	-1.00	-87.10	11.84	3.0000	3.00	100.00	47.75	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	06-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
117	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	CL	5266	CCL001	Layanan Sarana Sistem Informasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)	87,000,000	86,188,392	99.07	1	Unit	0.00	-99.00	0.00	1.0000	1.00	100.00	0.93	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
118	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2486	ABA001	Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan Perekonomian	900,000,000	682,114,895	75.79	4	RekomendasiKebijakan	1.00	-88.52	16.36	4.0000	4.00	100.00	24.21	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
119	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2486	CCL001	Layanan Sarana Sistem Informasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	7,620,000,000	7,278,294,494	95.52	2	Unit	1.00	-88.86	0.00	2.0000	2.00	100.00	4.48	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
120	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2486	EBA963	Layanan Data dan Informasi	2,979,708,000	2,712,595,025	91.04	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	8.96	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
121	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2486	EBD001	Layanan Fasilitas Penguatan Kinerja	1,702,728,000	1,539,734,146	90.43	6	Dokumen	0.00	-85.36	2.31	6.0000	6.00	100.00	9.57	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
122	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2486	EBD952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,565,000,000	1,487,437,793	95.04	6	Dokumen	6.00	-86.85	7.15	6.0000	6.00	100.00	4.96	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
123	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2487	EBA001	Layanan Hukum Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, Pangan, Angribisnis, Perniagaan, Industri dan BUMN	853,475,000	806,115,522	94.45	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	5.55	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

124	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2487	EBA002	Layanan Hukum Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, UMKM, Wilayah dan Tata Ruang, Kerja Sama Ekonomi Internasional, dan Perpajakan	900,105,000	839,399,202	93.26	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	6.74	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
125	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2487	EBA960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,000,000,000	853,308,510	85.33	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	14.67	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
126	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2487	EBD001	Layanan Reformasi Birokrasi	1,000,000,000	792,206,916	79.22	2	Dokumen	0.00	-87.44	18.00	2.0000	2.00	100.00	20.78	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
127	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2488	EBA959	Layanan Protokol	1,621,650,000	1,544,466,587	95.24	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	4.79	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
128	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2488	EBA962	Layanan Umum	4,938,591,000	2,441,028,700	49.43	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	50.57	02	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
129	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2488	EBA994	Layanan Perkantoran	218,818,970,000	207,454,529,493	94.81	2	Layanan	2.00	-89.63	8.37	2.0000	2.00	100.00	5.20	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
130	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2488	EBB951	Layanan Sarana Internal	3,638,115,000	3,437,678,552	94.49	223	Paket	9.00	128.43	15.05	223.0000	223.00	100.00	5.51	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
131	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2488	EBC954	Layanan Manajemen SDM	3,840,720,000	3,669,730,755	95.55	653	Orang	43.00	555.31	9.98	653.0000	653.00	100.00	4.45	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
132	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2488	EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	600,000,000	345,355,112	57.56	3	Dokumen	3.00	-87.00	0.00	3.0000	3.00	100.00	42.44	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
133	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2489	CCL001	Layanan Sarana Sistem Informasi Inspektorat	25,000,000	0	0.00	1	Unit	0.00	-90.63	1.26	1.0000	1.00	100.00	100.00	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

134	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2489	EBD965	Layanan Audit Internal	1,125,000,000	944,458,113	83.95	1	Dokumen	0.00	-90.63	30.36	1.0000	1.00	100.00	16.05	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
135	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2490	ABA001	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi	250,000,000	239,839,787	95.94	1	RekomendasiKebijakan	1.00	-90.90	5.88	1.0000	1.00	100.00	4.06	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
136	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2490	ABA002	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam	1,000,000,000	838,110,811	83.81	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-90.90	0.00	1.0000	1.00	100.00	16.19	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
137	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2490	ABA003	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia	1,000,000,000	700,554,016	70.06	1	RekomendasiKebijakan	1.00	-90.90	5.88	1.0000	1.00	100.00	29.94	01	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
138	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2490	ABA004	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Pembangunan Daerah	250,000,000	245,595,686	98.24	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-90.90	0.00	1.0000	1.00	100.00	1.76	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
139	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	2490	ABA005	Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi	160,425,000	150,221,960	93.64	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-90.90	0.00	1.0000	1.00	100.00	6.36	00	Non PN	Proses capaian output selesai	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
140	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	4538	EBA001	Layanan Kegiatan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	471,677,000	471,236,228	99.91	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	0.09	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
141	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	4538	EBA002	Layanan Penyiapan Naskah Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	540,651,000	528,228,700	97.70	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	2.30	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
142	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	4538	EBA003	Layanan Manajemen Strategi dan Publikasi	7,289,341,000	7,254,242,170	99.52	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	0.48	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-



143	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	03501	12	WA	4538	EBA958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3,009,700,000	2,908,735,976	96.65	1	Layanan	1.00	-90.63	8.37	1.0000	1.00	100.00	3.35	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid	02-JAN-25	07-JAN-25	Lihat catatan	-
-----	--------	---------------------------	-------	----	----	------	--------	---	---------------	---------------	-------	---	---------	------	--------	------	--------	------	--------	------	----	--------	---	-----------------	-----------	-----------	---------------	---



DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO

periode : DESEMBER satker : 427755

No	Satker	Nama Satker	BAES1	Periode	Program	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)						GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan	Terkonfirmasi	Validasi	Catatan	Tanggal Rekam Di Sakti	Tanggal Kirim Di Sakti	Action			
									Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini										Catatan	Validasi		
														RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO												TPCRO (%)	PCRO (%)
1	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	03501	12	CL	6920	ABP001	Rekomendasi Perencanaan dan Pembentukan KEK	3,568,592,000	2,788,767,476	78.15	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-90.90	7.93	1.0000	1.00	100.00	22.30	01	Non PN	Pembahasan Tatacara Revisi Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Monitoring Pedoman Masterplan KEK Edukasi Teknologi Kesehatan Internasional Banten, Audiensi dengan Bintang Industrial Estate, Kunjungan Lapangan dan Penyusunan Draf Rencana Aksi KEK ITTS dan KEK Patimban, Koordinasi Perkembangan KEK MBTK dan Tinjauan Kesiapan Lahan dan Infrastruktur KEK IKKT, Perjalanan Dinas Masterplan Setangga, Perjalanan Dinas Tanjung Lesung, Perjadin KIT Batang, Perjalanan Dinas BSD, FGD pembahasan RPJMN dan Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK		00 - Data Valid		08-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-
2	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	03501	12	CL	6920	ABP002	Rekomendasi Pengawasan Internal	488,843,000	275,116,023	56.28	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-90.93	7.62	1.0000	1.00	100.00	45.53	01	Non PN	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi HAKORDIA		00 - Data Valid		08-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-



3	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	03501	12	CL	6921	ABP001	Rekomendasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK	8,736,567,000	7,294,197,777	83.49	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-92.00	5.18	1.0000	1.00	100.00	16.52	00	Non PN	Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jawa Barat, Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2024, Kick Off Meeting dengan GGGI, Pemantauan perkembangan investasi KEK Sei Mangkei, Pembahasan Isu Strategis KEK Arun Lhokseumawe, Perjalanan Dinas ke Malaysia dalam Rangka Benchmarking Fasilitas dan Kemudahan di Johor-Singapore SEZ, Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Kinerja KEK Triwulan III, Rapat Kerja Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2024, Bimbingan Teknis Fasilitas dan Kemudahan SAS Alkes dan Obat di KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali, Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jawa Barat, Pembahasan Skema Penerbitan Izin Distribusi Alat Kesehatan di KEK, Audiensi dengan PT Beurer Indonesia Technology, Sosialisasi Pedoman Masterplan dan Pedoman Bangunan atau Estate Regulation Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten (ETKI Banten), Rapat Persiapan Pembahasan Hasil Kinerja KEK Triwulan III Tahun 2024, Rapat Kerja Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2024	00 - Data Valid	08-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-
---	--------	--	-------	----	----	------	--------	---	---------------	---------------	-------	---	----------------------	------	--------	------	--------	------	--------	-------	----	-----------	--	-----------------------	-----------	-----------	------------------	---



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

4	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	03501	12	CL	6922	ABP001	Rekomendasi Peningkatan Investasi Kerja Sama Komunikasi dan Sistem Informasi di KEK	8,565,638,000	7,686,380,290	89.74	1	Rekomendasi Kebijakan	0.00	-93.55	4.36	1.0000	1.00	100.00	10.26	00	Non PN	dilaksanakan Pembahasan Pengembangan Sistem Aplikasi Kawasan Ekonomi Khusus, koordinasi dgn K/L teknis terkait LNSW, BKPM, Kemenkeu (DJP, DJBC), Pembahasan Kepsekjen, Satgas, Pengelolaan Website, Indonesia SEZ Business Forum 2024, Audiensi ke Kementerian Luar Negeri RI, Audiensi ke Perusahaan Konsultan Deloitte, Kick Off Meeting GGGI, - Setup Server Cloud VM Machine untuk Aplikasi Absensi dan Tukin KEK, Migrasi aplikasi absensi dan tukin KEK, Setup Config Call Center KEK, Update Data di Website KEK.GO.ID	00 - Data Valid	08-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-
5	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	03501	12	CL	6923	BAH001	Pelayanan Investasi Administrator KEK Tipe A	4,703,780,000	3,582,772,805	76.17	1	layanan	1.00	-90.63	7.75	1.0000	1.00	100.00	23.83	01	Non PN	Pelaksanaan Layanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha di Administrator KEK	00 - Data Valid	08-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-
6	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	03501	12	CL	6923	BAH002	Pelayanan Investasi Administrator KEK Tipe B	1,485,435,000	418,679,189	28.19	1	layanan	1.00	-90.63	8.36	1.0000	1.00	100.00	71.81	01	Non PN	Pelaksanaan Layanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha di Administrator KEK	00 - Data Valid	08-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-



7	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	03501	12	CL	6924	ABP051	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	5,139,579,000	3,682,312,702	71.65	1	RekomendasiKebijakan	0.00	-87.33	9.77	1.0000	1.00	100.00	28.35	01	Non PN	Rapat Tindak Lanjut RPP tentang KEK Industri Hijau Bungku, Perjalanan Dinas Sosialisasi Golden Visa di KEK Kendal, Persiapan Rapat PAK dan Legal Drafting SE ER, Rapat PAK Penyusunan RPP tentang KEK Industri Halal Sidoarjo, RPP tentang KEK Kimia Kutai Timur, RPP tentang KEK Palimban, RPP tentang KEK Industri Teknologi Terpadu Subang, RPP tentang KEK Mangkupadi, RPP tentang KEK Industropolis Batang, dan RPP tentang Perubahan atas PP 68/2021 tentang KEK Nongsa, Rapat Tindak Lanjut Pembahasan PAK RPP KEK, Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Batas-batas Wilayah Usulan 6 KEK Baru, Meeting Dalam Kota Pelaksanaan SKB Tambahan Non CAT Wawancara di Jakarta, Rapat pembahasan capacity building, Rapat lanjutan pembahasan capacity building, Perjadin survey lokasi capacity building, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Rapat Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja SJDNKEK dan Administrator KEK	00 - Data Valid	08-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-
---	--------	--	-------	----	----	------	--------	--	---------------	---------------	-------	---	----------------------	------	--------	------	--------	------	--------	-------	----	-----------	--	-----------------------	-----------	-----------	------------------	---



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

8	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	03501	12	WA	6919	EBA001	Layanan Manajemen Internal	2,873,668,000	2,664,339,312	92.72	1	Layanan	1.00	-90.63	7.92	1.0000	1.00	100.00	7.41	00	Non PN	Telah dilaksanakan rapat pedoman kearsipan serta konsolidasi terkait tata kelola pengarsipan elektronik serta tata kelola administrasi keuangan di administrator KEK Sanur dan Kura-Kura Bali serta administrator KEK Mandalika. Telah selesai pelaksanaan penatausahaan BMN di lingkungan administrator tipe A. Telah dilaksanakan rapat pembahasan rancangan peraturan tentang pedoman penyelenggaraan sidang dewan nasional KEK.	00 - Data Valid	08-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-
9	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	03501	12	WA	6919	EBA994	Layanan Perkantoran	27,006,323,000	26,354,553,797	97.59	2	Layanan	2.00	-89.63	7.75	2.0000	2.00	100.00	2.47	00	Non PN	Telah dilaksanakan penggajian pegawai Setjen DN KEK. Telah dilaksanakan pemindahan server dedicated ke server cloud serta pengadaan paket kalender tahun 2025.	00 - Data Valid	08-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-
10	427755	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS	03501	12	WA	6919	EBB951	Layanan Sarana Internal	6,416,829,000	6,416,645,427	100.00	1	Paket	0.00	-99.00	0.00	1.0000	1.00	100.00	0.00	00	Non PN	Telah selesai pengadaan peralatan kantor dan peralatan studio.	00 - Data Valid	08-JAN-25	08-JAN-25	Lihat catatan	-



MENAMPILKAN DATA KONTRAK DENGAN MEKANISME RPATA

No	BA	BAES1	KPPN	KODE SATKER	NAMA SATKER	NOMOR KONTRAK	URAIAN KONTRAK	NAMA SUPPLIER	TOTAL NILAI KONTRAK	NILAI KONTRAK SUDAH DIBAYARKAN	NILAI TERMIN RPATA	BEL NILAI SP2D PENAMPUNGAN	POT NILAI SP2D PENAMPUNGAN	BEL NILAI SP2D PEMBAYARAN	POT NILAI SP2D PEMBAYARAN	BEL NILAI SP2D PE NIHILAN	POT NILAI SP2D PE NIHILAN	SALDO RPATA	PERPANJANGAN KONTRAK	JENIS_P ROYEK	JENIS_P EKERJAN	STATUS _PERPA NJANGAN
1	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	PERJ-02/PPK.KEG.2486/ISP.3/02/2024 A/019.24002587/0/0	Pengadaan Jasa Layanan Internet Service Provider (ISP) 3 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI TA 2024	PT. MILE NIAL INTI TELEKOMUNIKASI	1,150,000,000	690,000,000	460,000,000	460,000,000	460,000,000	460,000,000	53,873,873	0	0	0	TIDAK	-	-	-
2	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	PERJ-03/PPK.KEG.2493/TA/10/2024 A/019.24010083/0/0	Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Tenaga Ahli Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029	RATIH TWI SEP TIRIANA	75,000,000	50,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	1,875,000	0	0	0	TIDAK	-	-	-
3	035	03501	019	427752	MENKO	PERJ-1/P	Jasa Kon	LELA	108,000,000	97,200,000	21,600,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	670,000	0	0	0	TIDAK	-	-	-



					BIDANG PEREKONOMIAN	PK.DEP. VI/5200/TA/RANC-KOTA/03/2024 A/019.24002795/0/0	sultansi Pterorangan Tenaga Ahli Arsitektur/Rancangan Kota pada Sekretariat PKSP Tahun Anggaran 2024	ALIFAH RAHMI	000	00	00	00	00	00								
4	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	PERJ-2/PK.DEP. VI/5200/TA/PER-WIL/03/2024 A/019.24002796/0/0	Jasa Konsultansi Pterorangan Tenaga Ahli Pengembangan Wilayah pada Sekretariat PKSP Tahun Anggaran 2024	GATOT SUBROTO	120,000,000	103,090,909	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	900,000	0	0	0	TIDAK	-	-	-
5	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	PERJ-3/PK.DEP. VI/5200/TA/DTBASE/03/2024 A/019.24002797/0/0	Jasa Konsultansi Pterorangan Tenaga Ahli Database pada Sekretariat PKSP Tahun Anggaran 2024	EDY KUSUBUDI HARJO	92,349,000	83,009,158	9,234,900	9,234,900	9,234,900	9,234,900	230,872	0	0	0	TIDAK	-	-	-
6	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	PERJ-33/PPK.KEG.2486/ISP.1/12/2023 A/019.24000159/	Pengadaan Jasa Layanan Anggana Internet Service Provider	PT. MORATELEMATIKA INDONESIA	2,859,600,000	2,144,700,000	714,900,000	714,900,000	714,900,000	714,900,000	12,881,081	0	0	0	TIDAK	-	-	-



					0/0	(ISP) 1 K ementer an Koordi nator Bidang P erekono mian RI TA 2024																
7	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	PERJ-34/ PPK.KEG .2486/ISP 2/12/202 3 A/019.2 4000170/ 0/0	Pengada an Jasa L Lintas Anggana n Internet Service Provider (ISP) 2 K ementer an Koordi nator Bidang P erekono mian RI TA 2024	PT. JALA LINTAS MEDIA	2,856,00 0,000	2,142,00 0,000	714,000, 000	714,000, 000	714,000, 000	714,000, 000	12,864,8 64	0	0	0	TIDAK	-	-	-
8	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	PERJ-4/P PK.DEP. VI/5200/T A/GEO-L K/03/202 4 A/019.2 4002798/ 0/0	Jasa Kon sultansi P eroranga n Tenaga Ahli Geografi Lingkung an pada Sekretari at PKSP Tahun Anggaran 2024	GRACE SONDAN G YUNIKA	88,000,0 00	79,200,0 00	8,800,00 0	8,800,00 0	8,800,00 0	8,800,00 0	220,000	0	0	0	TIDAK	-	-	-
9	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	PERJ-5/P PK.DEP. VI/5200/T A/SIG/03/ 2024 A/0 19.24002 799/0/0	Jasa Kon sultansi P eroranga n Tenaga Ahli Sistem Informasi Geospasi al pada S	MUHAM AD KOM ARUDIN	188,288, 270	143,783, 770	18,828,8 27	18,828,8 27	18,828,8 27	14,549,5 48	1,091,21 6	0	0	4,279,27 9	TIDAK	-	-	-



							ekretariat PKSP Tahun 2024															
10	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	PERJ-69/ 8/PPK.S ET.I/BM/ 12/2023 A/019.24 000195/0 /3	Pengada an Jasa Building Manage ment Tahun 2024	PT PROV ICES IND ONESIA	12,354,6 83,188	11,303,4 14,262	1,051,26 8,926	1,051,26 8,926	1,051,26 8,926	957,939, 849	112,191, 153	0	0	93,329,0 77	TIDAK	-	-	-
11	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	PERJ-96/ PPK.KEG .5032/CE IC/12/202 3 A/019.2 4000233/ 0/0	Pengada an Langg anan Database Perekono mian CEIC Data untuk Unit Lintas Sektor Tahun 2024 Pada Ke menteria n Koordin ator Bidang P erekono mian RI Tahun Anggaran 2024.	PT. ADA UTAMA	380,712, 240	190,356, 120	190,356, 120	190,356, 120	190,356, 120	190,356, 120	22,293,9 60	0	0	0	TIDAK	-	-	-
12	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	PRJ-569/ PPK.SET .I/SG/12/ 2024 A/0 19.24012 172/0/0	Sewa Gedung Kemenko Pangan	PT. BUMI DAYA PLAZA	700,000, 000	0	700,000, 000	700,000, 000	700,000, 000	359,767, 403	68,064,1 02	0	0	340,232, 597	TIDAK	-	-	-
13	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO	PRJ-699/ PPK.SET .I/SF/12/2	Pengada an Sewa Mesin	PT. PT TRITANU (PT. TRIT	2,033,21 9,944	1,833,80 9,554	182,860, 290	182,860, 290	182,860, 290	166,310, 190	19,477,7 70	0	0	16,550,1 00	TIDAK	-	-	-



					NOMIAN	023 A/01 9.240001 34/0/2	Fotocopy	ANU NUSA)														
14	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	PRJ-700/ PPK.SET .I/SM/12/ 2023 A/0 19.24000 135/0/0	Pengada an Jasa Lainnya Sewa Mebelair dan AC	PT. ABHI NAYA KANAKA DIYANTI	1,432,29 0,840	1,360,67 6,298	71,614,5 42	71,614,5 42	71,614,5 42	71,614,5 42	8,387,28 9	0	0	0	TIDAK	-	-	-
15	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	SP-23/PP K.KPPIP/ PMO/03/ 2024 A/0 19.24002 890/0/0	JASA KO NSULTA NSI BADAN USAHA P ENDUKU NG PRO JECT MA NAGEME NT OFFICE (PMO) DALAM PROYEK STRATE GIS NASI ONAL (PSN) DAN KEB IJAKAN PERCEP ATAN IN FRASTR UKTUR DAN PE NGEMBA NGAN WILAYA H UNTUK K EMUDAH AN PSN TAHUN A NGGARA N 2024	PT. INSIVIA PARTNE RS INDO NESIA	5,153,75 7,750	4,689,30 5,253	464,451, 750	464,451, 750	464,451, 750	464,451, 750	54,395,2 50	0	0	0	TIDAK	-	-	-



16	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	SP-24/PP K.KPPIP/ TA-OFFI CE-MAN AGER/03 /2024 A/0 19.24003 273/0/0	JASA KO NSULTA SI PERO RANGAN OFFICE MANAGE R KOMITE PERCEP ATAN PE NYEDIAA N INFRA STRUKT UR PRIO RITAS (KPPIP) TAHUN A NGGARA N 2024	SRI PUR WANTI	116,850, 000	104,550, 000	12,300,0 00	12,300,0 00	12,300,0 00	12,300,0 00	307,500	0	0	0	TIDAK	-	-	-
17	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	SP-564/P PK.SET.I/ FM.PAN GAN/12/2 024 A/01 9.240120 78/0/0	Pengada an Facility M anageme nt Kemenko Pangan	PT PROV ICES IND ONESIA	381,859, 774	0	381,859, 774	381,859, 774	381,859, 774	305,402, 974	35,767,9 16	0	0	76,456,8 00	TIDAK	-	-	-
18	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	SP-567/P PK.SET.I/ SK.PAN GAN/12/2 024 A/01 9.240121 39/0/0	Sewa Ke ndaraan Dinas Kemenko Pangan	PT. SATRIA PIRANTI PERKAS A	471,480, 000	0	471,480, 000	471,480, 000	471,480, 000	471,480, 000	55,218,3 78	0	0	0	TIDAK	-	-	-
19	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	SPK- 008 /2516/AB R.002.05 4C/12/20 24 A/019. 2401247 3/0/0	Pembaya ran Fullday Meeting Mercure Sabang tanggal 23 Dese mber 2024 ber dasarkan	PT. JAKARTA A REGE NCY HOTEL	13,500,0 00	0	13,500,0 00	13,500,0 00	13,500,0 00	13,500,0 00	0	0	0	0	TIDAK	-	-	-



						SPK no SPK- 008 /2516/AB R.002.05 4C/12/20 24 tanggal 19 Dese mber 2024 (Kopang)																
20	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	SPK-03/P PK.KEG. 4538/MM .ARTHA/I /2024 A/0 19.24000 565/0/0	Jasa Analisis P emberita an Media Monitorin g Tahun 2024	ARTHA S EMESTA PUANA	178,488, 000	133,866, 000	44,622,0 00	44,622,0 00	44,622,0 00	44,622,0 00	892,440	0	0	0	TIDAK	-	-	-
21	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	SPK-08/2 516/ABR. 002.054B /12/2024 A/019.24 012477/0 /0	Paket fullday meeting di Jakarta tanggal 23 Dese mber 2024	GESIT SARANA PERKAS A PT	33,350,0 00	0	33,350,0 00	33,350,0 00	33,350,0 00	33,350,0 00	0	0	0	0	TIDAK	-	-	-
22	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	SPK-21/P PK.KPPI P/TA-LE GAL/02/2 024 A/01 9.240015 05/0/0	Jasa Kon sultasi Pe rorangan Tenaga Ahli Legal KPPIP Tahun Anggaran 2024	STEVE MARIOT J NOYA	167,750, 000	152,347, 500	15,250,0 00	15,250,0 00	15,250,0 00	15,250,0 00	1,143,75 0	0	0	0	TIDAK	-	-	-
23	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	SPK-25/P PK.KEG. 2486/AP P/10/202 4 A/019.2 4010756/ 0/0	Pengada an Baran g/Jasa untuk Pe ngemban gan Aplikasi JDIH Ke menteria	PT. LAKE SWARA PERKAS A UTAMA	78,771,1 50	0	78,771,1 50	78,771,1 50	78,771,1 50	78,771,1 50	9,225,45 0	0	0	0	TIDAK	-	-	-



							n Koordin ator Bidang P erekono mian															
24	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	SPK-26/P PK.KPPI P/VPS-W EB/05/20 24 A/019. 2400453 1/0/2	PAKET P EKERJA AN LAYA NAN PE NGELOL AAN WEBSIT E DAN BACKUP DATA KOMITE PERCEP ATAN PE NYEDIAA N INFRA STRUKT UR PRIO RITAS (KPPIP) TAHUN A NGGARA N 2024	PT ETCE TERA AR TECHSIN DO	86,188,3 92	47,869,1 96	38,319,1 96	38,319,1 96	38,319,1 96	38,319,1 96	4,487,83 4	0	0	0	TIDAK	-	-	-
25	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	SPK-30/P PK.KPPI P/TA-GE OGRAFI/ 10/2024 A/019.24 009979/0 /0	JASA KO NSUULT ASI PER ORANGA N TENAGA AHLI GE OGRAFI- PERENC ANAAN RUANG DAN LAHAN KPPIP TA 2024	AKBAR MUAMM AR SYARIF	35,250,0 00	23,500,0 00	11,750,0 00	11,750,0 00	11,750,0 00	11,750,0 00	293,750	0	0	0	TIDAK	-	-	-
26	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG	SPK-32/P PK.KEG.	Pengada an Jasa L	PT. ADA UTAMA	190,356, 120	95,178,0 60	95,178,0 60	95,178,0 60	95,178,0 60	95,178,0 60	11,146,9 80	0	0	0	TIDAK	-	-	-



					PEREKO NOMIAN	2486/CEI C/12/202 3 A/019.2 4000157/ 0/0	angguna n Database Perekono mian CEIC Data Tahun 2024															
27	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	SPK-405/ PPK.SET .I/Lift/08/2 024 A/01 9.240087 16/0/1	Pekerjaa n Perawa tan dan P emelihara an Lift Gedung Ali Wardh ana	PT. KONE INDO EL EVATOR	56,832,0 00	28,416,0 00	28,416,0 00	28,416,0 00	28,416,0 00	28,416,0 00	3,328,00 0	0	0	0	TIDAK	-	-	-
28	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	SPK-456/ PPK.453 9/TA-PK/ 12/2023 A/019.24 000219/0 /0	Jasa Kon sultansi P eroranga n Tenaga Ahli Pere ncanaan Keuanga n	FATMAH, S.SOS,M M	99,511,2 00	88,580,0 46	8,292,60 0	8,292,60 0	8,292,60 0	8,292,60 0	207,315	0	0	0	TIDAK	-	-	-
29	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	SPK-457/ PPK.453 9/TA-KS/ 12/2023 A/019.24 000022/0 /0	Pekerjaa n Jasa K onsultans i Peroran gan Tenaga Ahli Keua ngan Syariah	ANDRIA WAN YOGA	96,000,0 00	85,818,1 82	8,000,00 0	8,000,00 0	8,000,00 0	8,000,00 0	200,000	0	0	0	TIDAK	-	-	-
30	035	03501	019	427752	MENKO BIDANG PEREKO NOMIAN	SPK-696/ PPK.SET .I/PR/12/ 2023 A/0 19.24000 095/0/0	Pengada an Sewa Pengharu m Ruangan (Scenting Machine) TA 2024	PT.SON GCO TIR TAJAYA LESTARI	103,896, 000	95,238,0 00	8,658,00 0	8,658,00 0	8,658,00 0	8,658,00 0	1,014,00 0	0	0	0	TIDAK	-	-	-
Total								31,701,9 83,868	25,765,9 08,308	5,894,66 2,135	5,883,86 2,135	5,883,86 2,135	5,353,01 4,282	492,649, 743	0	0	530,847, 853					



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENKO BIDANG PEREKONOMIAN

NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL**LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
(BA035) TAHUN 2024**

Nomor: NKF-32/035/PB.6/2025

Pada hari **Rabu, 07 Mei 2025**, telah dilaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak** yang menyepakati angka-angka sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan ini. **KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (BA 035)** akan menyusun dan menyampaikan asersi final Laporan Keuangan Tahun 2024 secara lengkap kepada Ditjen Perbendaharaan dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara **paling lambat tanggal 08 Mei 2024.**

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

No	Nama	Unit Instansi
1	Randika Pratama Wibisono, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	KEMENTERIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN – selaku Penyusun LKKL
2	Emirenciana Nyantyasningsih, Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara I	DJKN – selaku Penyusun LBMN
3	Rahmat Mulyono, Plt. Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara	DJPb – selaku Penyusun LKPP
4	Puji Rahayu, Ketua Tim	BPK RI - selaku Auditor BPK K/L



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Gedung Ali Wardhana
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta Pusat
Kode Pos 10710
Telp : (021) 3522003
Fax : (021) 3511467
Web : www.ekon.go.id

